

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **7.1. PENDAHULUAN**

#### **7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pengguna yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah daerah.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan DPRD.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

#### **7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### **7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

#### **7.1. PENDAHULUAN**

- 7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
- 7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **7.2. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**

- 7.2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 7.2.2. Kebijakan Keuangan

#### **7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 7.3.3. Pergeseran dan Perubahan APBD

#### **7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 7.4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

#### **7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 7.5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL
- 7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

7.5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

7.5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

7.5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

## **7.6. KEWAJIBAN KONTIJENSI**

## **7.7. PENUTUP**

## **7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **7.2.1. Ekonomi Makro / Ekonomi Regional**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan senilai 11,49%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka senilai 2,27%;
3. *Gini Ratio* senilai 0,351;
4. Indeks Pembangunan Manusia senilai 69,80;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) senilai 5,25%;
6. Tingkat Inflasi senilai 1,82%;
7. Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat; dan
8. Penanganan *Stunting*

#### **7.2.1.1. Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat**

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1.	Provinsi (%)	11,92%	11,49%	-0,43%
2.	Provinsi (Ribuan Orang)	169,26	164,14	-5,12
3.	Nasional (%)	9,57%	9,36%	-0,21%
4.	Peringkat Regional Sulampua	6	6	0
5.	Peringkat Nasional	30	8	22

Sumber Dokumen: <http://sulbar.bps.go.id> dan [bps.go.id](http://bps.go.id)

Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023 senilai 11,49% mengalami penurunan sebesar 0,43% dibandingkan persentase tahun 2022 sebesar 11,92%. Tingkat kemiskinan Sulawesi Barat tahun 2023 menunjukkan angka terendah selama delapan tahun terakhir. Dengan mulai bangkitnya perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif, diharapkan dapat membuat tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat semakin mengikis. Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat masih di atas Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku untuk wilayah Sulampua. Dari persentase ini diharapkan dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapatkan prioritas untuk terus menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat**

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	2,09	1,80	-0,29
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,53	-0,03
3.	Peringkat Regional Sulampua	4	3	-1
4.	Peringkat Nasional	25	34	9

Sumber Dokumen: [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id) dan [bps.go.id](http://bps.go.id)

**Tabel 3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat**

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,52	0,42	-0,10
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,50	0,38	-0,12
3.	Peringkat Regional Sulampua	4	4	0
4.	Peringkat Nasional	26	26	0

Sumber Dokumen: [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id) dan [bps.go.id](http://bps.go.id)

#### 7.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 menurut data BPS

menunjukkan angka senilai 2,27%. TPT pada tahun 2022 adalah senilai 2,34%. atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2022. Data ini jauh lebih rendah dengan TPT Nasional. Rincian dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat**

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	2,34%	2,27%	-0,07%
2.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86%	5,32%	-0,54%
3.	Peringkat Regional Sulampua	10	10	0
4.	Peringkat Nasional	38	38	0

Sumber Dokumen: [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id) dan [bps.go.id](http://bps.go.id)

#### 7.2.1.3. Gini Ratio

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1, yaitu:

1. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
2. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah senilai 0,351. Angka ini turun 0,02 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2022 yang senilai 0,371 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional. Rincian Gini Ratio Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 5. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Barat**

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1.	Tingkat Provinsi	0,371	0,351	-0,02
2.	Tingkat Nasional	0,381	0,388	0,007
3.	Peringkat Regional Sulampua	10	8	2
4.	Peringkat Nasional	30	24	6

Sumber Dokumen: [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id) dan [bps.go.id](http://bps.go.id)

#### 7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent*

*standart of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu

1. Rendah ( $< 60$ );
2. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ );
3. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ); dan
4. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Sulawesi Barat, realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 adalah sebesar 69,80 dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia**

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1.	Provinsi	69,19	69,80	0,61
2.	Indonesia/Nasional	72,91	73,55	0,64
3.	Peringkat Regional Sulampua	8	8	0
4.	Peringkat Nasional	31	31	0

Sumber Dokumen sulbar.bps.go.id dan bps.go.id

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 adalah senilai 69,80 poin, mengalami kenaikan senilai 0,61 poin dibandingkan tahun 2022 senilai 66,19 poin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM Sulawesi Barat pada tahun 2023 tercatat meningkat. Pengeluaran per kapita riil pada tahun 2023 adalah Rp9.718,00 meningkat sebesar Rp360,00 dibandingkan tahun 2022 senilai Rp9.358,00. Sementara Umur Harapan Hidup (UHH) bayi yang baru lahir pada 2023 di provinsi ini tercatat memiliki peluang untuk hidup hingga 70,76 tahun, lebih lama 3,10 tahun dibandingkan tahun 2022. Kemudian, Harapan Lama Sekolah (HLS) anak-anak berusia 7 tahun pada 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,88 tahun. Angka tersebut lebih lama 0,01 tahun dibandingkan kondisi tahun 2022 dan sedikit lebih tertinggal dari capaian nasional yang sudah mencapai 13,15 tahun. Kemudian, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk yang berusia 16-18 tahun ke atas pada tahun 2023 secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,13 tahun. Angka ini lebih lama 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dan masih tertinggal 0,64 tahun dari capaian nasional sebesar 8,77 tahun. IPM di Provinsi Sulawesi Barat pada saat ini berada pada urutan ke-8 dari provinsi yang ada di wilayah regional Sulampua dan berada pada urutan ke-31 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia.

#### **7.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010.

**Tabel 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat**

No.	Uraian	Provinsi			Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1.	PDRB (harga konstan 2010) (Miliar Rp)	32.898	33.658	35.426	12.301,4
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,57%	2,31%	5,25%	5,05%
3.	Peringkat Regional Sulampua	8	9	6	-
4.	Peringkat Nasional (Indonesia)	28	33	8	-

Sumber Dokumen: [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id) dan [bps.go.id](http://bps.go.id)

Perekonomian Sulawesi Barat tahun 2023 dibanding tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,25 persen (*cumulative to cumulative* atau c-to-c). Besaran pertumbuhan pada tahun 2023 lebih laju dibanding pertumbuhan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 2,31 persen secara c-to-c. Skala ini berada diatas Laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05%. Skala provinsi wilayah Sulampua laju pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat menempati urutan ke-6 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Sulampua. Sedangkan secara nasional Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari peringkat 33 menjadi peringkat 8. Sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat utamanya disumbang oleh kategori industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan.

#### 7.2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*)

Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.

2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)

Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.

3. Inflasi Berat (*High Inflation*)

Kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.

4. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*)

Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Dengan adanya isu inflasi pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai upaya menekan laju inflasi antara lain melakukan operasi pasar untuk mengontrol harga kebutuhan pokok, pasar murah, mendistribusikan pasokan pangan, melakukan gerakan merdeka pangan



sehingga pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil menekan laju inflasi.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Tingkat Inflasi Kabupaten di Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju) Tahun 2023 adalah senilai 1,82% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 8. Tingkat Inflasi di Sulawesi Barat**

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	4,85%	1,82%	-3,03%
2.	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51%	2,61%	-2,90%
3.	Peringkat Nasional	13	8	-5

Sumber Dokumen: [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id) dan [bps.go.id](http://bps.go.id)

Tingkat inflasi di Sulawesi Barat tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka senilai 1,82%, sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2022 adalah senilai 4,85% atau lebih rendah 3,03% dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2022. Berdasarkan data statistik BPS Pusat dan BPS Sulawesi Barat inflasi di Sulawesi Barat masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional 90 kota senilai yaitu 2,61%. Untuk perhitungan inflasi, hanya ada satu kota pada Sulawesi Barat yaitu Mamuju. Untuk Inflasi kabupaten lain belum tersedia di data statistik BPS Provinsi Sulbar dan BPS Nasional. Sebagai informasi, perhitungan inflasi hanya dihitung berdasarkan kabupaten/kota bukan dihitung per provinsi.

#### 7.2.1.7. Struktur Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat

Struktur perekonomian Provinsi di Sulawesi Barat dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 9. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023**

(Dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.161,88	23.895,23	26.182,73
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.112,49	1.161,17	1.263,83
3.	Industri Pengolahan	5.395,01	5.905,20	6.534,44
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	18,86	20,54	23,17
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,58	71,46	75,05
6.	Konstruksi	3.889,80	4.031,58	4.294,63
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.998,51	5.360,30	5.821,08
9.	Transportasi dan Pergudangan	645,34	757,56	892,70
10.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110,90	126,36	142,15
11.	Informasi dan Komunikasi	2.076,69	2.129,12	2.335,13
12.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.189,98	1.272,78	1.236,13
13.	Real Estate	1.237,19	1.346,03	1.471,07
14.	Jasa Perusahaan	30,51	32,75	36,18

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.572,52	3.650,26	3.731,32
16.	Jasa Pendidikan	2.303,44	2.414,94	2.483,22
17.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	917,68	1.004,89	1.055,39
18.	Jasa Lainnya	833,17	898,16	973,59
19.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	50.565,53	54.078,35	58.551,82
20.	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	50.565,53	54.078,35	58.551,82
21.	PDRB Provinsi	50.565,53	54.078,35	58.551,82
22.	PDB Nasional	16.976.751,40	19.588.089,90	20.892.376,70
23.	Peringkat Provinsi Sulampua	8	8	9
24.	Peringkat Nasional	32	32	33

#### 7.2.1.8. Penanganan *Stunting*

Berdasarkan penyampaian Gubernur di Rapat Koordinasi menteri PPN / Ka. Bappenas dengan Gubernur Seluruh Indonesia Tahun 2024 membahas terkait permasalahan tingginya angka *stunting* di Sulawesi Barat ditahun 2023. Melihat data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dimuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Barat, angka *stunting* Provinsi Sulawesi Barat sebesar 33,80% dari 1.419.229 penduduk. Kabupaten Polewali Mandar menjadi wilayah tertinggi angka *stunting* di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 36,00%. Selanjutnya ada Kabupaten Majene dengan angka *stunting* sebesar 35,70%, disusul Kabupaten Mamasa yang berada di urutan ketiga tertinggi dengan angka *stunting* sebesar 33,70%. Selain itu angka *stunting* di Kabupaten Mamuju sebesar 30,30%, dan Kabupaten Pasangkayu sebesar 28,60%. Sementara Kabupaten Mamuju Tengah merupakan kabupaten dengan angka *stunting* terendah di Provinsi Sulawesi Barat yakni 26,30%, sedangkan berdasarkan angka prevalensi *stunting* Sulbar Tahun 2023 sebesar 30,03% mengalami penurunan sebesar 4,97% dari 35% di tahun 2022.

Salah satu penyebab tingginya angka *stunting* di Sulawesi Barat adalah perkawinan anak Tahun 2022 sebesar 11,70%, kemiskinan Sulbar Tahun 2022 diangka 11,92% atau diatas Nasional diangka 9,57%, fasilitas dan tenaga kesehatan belum maksimal dengan jumlah posyandu sebanyak 2.140, namun yang aktif 1.168 posyandu atau sebesar 54,5% dan tenaga kesehatan dokter terbatas.

Jika semakin banyak anak *stunting* baru yang lahir dikhawatirkan pada tahun 2035 ketika penduduk Indonesia mulai memasuki transisi penuaan demografi, banyak anak muda yang harus menanggung beban lebih banyak. Indonesia dikhawatirkan tidak bisa memetik bonus demografi yang berkualitas sehingga bisa berbahaya dalam pembangunan bangsa di masa depan. Pemerintah daerah dalam mengatasi masalah *stunting* memperhatikan penyebab dari meningkatnya angka *stunting* di daerahnya, misalnya *stunting* yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, kekurangan protein hewani, anak terkena penyakit berulang akibat tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, atau kondisi lingkungan dan sanitasi yang kotor.

Hal yang harus diperbaiki agar program/kegiatan yang dilakukan bisa lebih efektif menurunkan *stunting* adalah dengan melakukan pendataan secara terpadu (data balita *stunting by name by address*) sehingga program/kegiatan yang dilakukan bisa tepat sasaran

dan efektif dalam menanggulangi dan menurunkan *stunting*. Selama ini pendataan belum dilakukan secara terpadu, sehingga balita *stunting* tidak teridentifikasi secara jelas dan pasti. Data yang ada hanya berupa data gambaran umum saja, tidak berdasarkan *by name by address* balita *stunting*. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan atas program-program yang sudah dijalankan dalam rangka memastikan pencapaian tujuan program sebagaimana yang diharapkan, misalnya pemberian makanan tambahan untuk balita dan/atau keluarga miskin hendaknya benar-benar dipantau apakah dimakan atau tidak oleh objek sasaran. Hal ini pada akhirnya menyebabkan program yang dijalankan tidak mencapai target sasaran, sehingga upaya untuk penanggulangan dan penurunan *stunting* menjadi kurang efektif. Sementara itu, terkait besaran dan alokasi anggaran, besaran anggaran yang dialokasikan terkait penanggulangan *stunting* sudah dirasa memadai, hanya perlu pengoptimalan dalam pelaksanaannya saja agar dapat terlihat signifikansi hasil yang diharapkan.

Sesuai arahan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, salah satu tugas provinsi adalah mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penurunan *Stunting* (RAN-PASTI). Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penurunan *stunting* tahun 2023 antara lain:

1. Melaksanakan rapat koordinasi percepatan penurunan *stunting* yang melibatkan seluruh kepala daerah kabupaten se-Sulawesi Barat dan seluruh *stakeholder* terkait baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Forum ini bertujuan dalam rangka penguatan komitmen provinsi dan kabupaten serta membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan *stunting* yang terjadi;
2. Penguatan pendataan pada kelompok sasaran prioritas melalui Data Desa Presisi yang diintegrasikan dengan sistem pendataan lainnya baik sistem pencatatan dan pelaporan gizi rutin (e-PPGBM) pada Dinas Kesehatan, serta pendataan keluarga berisiko *stunting* (PK 2023) yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Sulawesi Barat;
3. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sebagai daerah lokus penanganan *stunting*;
4. Penguatan peran Tim Pendamping Keluarga dan Kader Konvergensi lainnya dalam pendampingan keluarga dengan berkoordinasi dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat; dan
5. Melakukan penguatan terhadap pendanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.

### **7.2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 meliputi:

#### **7.2.2.1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan**

Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah untuk TA 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dari pendapatan daerah yang terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah;
2. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan, yang meliputi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; dan
3. Meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta mencari sumber-sumber PAD yang belum tersentuh.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya mendorong berdirinya Kantor Bea dan Cukai di Sulawesi Barat dalam rangka meningkatkan PAD. Pendirian Kantor Bea dan Cukai diharapkan membantu meningkatkan pendapatan pajak dan pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat Sulawesi Barat melalui pengenalan produk-produk asli Sulawesi Barat dalam skala Nasional bahkan Internasional. Peningkatan PAD diharapkan dapat terus berjalan seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Usaha yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan perekonomian daerah.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menyinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat, serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemampuan fiskal daerah dengan mengedepankan sumber pendapatan potensial untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Pajak Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor masih merupakan sumber pendapatan potensial dengan kontribusi rata-rata 82,19% terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sekitar 19,85% terhadap APBD. Karena dampaknya yang begitu besar, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus kepada ketiga jenis pajak daerah tersebut, tentu saja dengan tetap mengupayakan peningkatan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Strategi yang dilakukan antara lain:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
3. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
5. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
6. Meningkatkan kerja sama dan dukungan antar instansi pengelola pendapatan daerah;
7. Meningkatkan evaluasi, monitoring, dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah; dan
9. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
  - a. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
  - b. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak;
  - c. Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan;

- d. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
- e. Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)*;
- f. Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah; dan
- g. Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.

#### **7.2.2.2. Kebijakan Umum Anggaran Belanja**

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum anggaran belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat; dan
3. Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.

#### **7.2.2.3. Penggunaan Pembiayaan**

Anggaran Pembiayaan dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2023 senilai Rp54.472.675.667,00. Realisasi pembiayaan netto mengalami surplus senilai Rp75.861.133.017,84 namun dalam realisasi setelah pelaksanaan kegiatan tahun 2023 ternyata terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp64.105.879.694,22. Rencana dan realisasi pembiayaan daerah TA 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan  
Penerimaan pembiayaan TA 2023 direncanakan senilai Rp116.924.453.299,00 dan terealisasi senilai Rp116.545.164.888,84. Realisasi penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA dan pinjaman dalam negeri.
2. Pengeluaran  
Pengeluaran pembiayaan TA 2023 direncanakan senilai Rp62.451.777.632,00 dan terealisasi senilai Rp40.684.031.871,00 yang terdiri dari pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank.

### **7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Belanja mandatori (*mandatory spending*) merupakan belanja yang besar alokasinya dalam pengeluaran APBD telah ditetapkan secara terpisah oleh peraturan perundang-undangan. Besarnya dana tersebut telah dialokasikan secara pasti (*earmarked*) setiap tahun berdasarkan konstitusi (UUD 1945) atau dalam undang-undang organik secara sektoral. Belanja mandatori yang harus mendapat alokasi besaran tertentu dalam APBD tersebut meliputi, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran infrastruktur. Keharusan untuk mengalokasikan belanja setiap tahun ini diatur dalam peraturan perundangan di luar wilayah keuangan daerah.

Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2023 semula senilai Rp734.917.859.396,00 atau sebesar 35,07% dari total belanja daerah, namun dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat perubahan sehingga nilai Rp744.007.410.438,00 atau sebesar 35,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2023. Dengan rincian pada Lampiran 1.

Nilai alokasi anggaran tersebut telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, sebagaimana maksud butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

2. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2023 semula senilai Rp276.802.237.703,00 atau 16,38% dari total belanja daerah di luar gaji, namun dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2023 bertambah senilai Rp13.732.679.217,00 menjadi senilai Rp290.534.916.920,00 atau sebesar 17,30% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian pada Lampiran 1.

Nilai alokasi anggaran tersebut telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

### 3. Alokasi Anggaran Infrastruktur

Alokasi anggaran untuk memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2023 senilai Rp528.680.988.790,00 atau sebesar 28,21% dari total belanja daerah, sedangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan APBD TA 2023 bertambah senilai Rp3.442.061.278,00 menjadi senilai Rp532.123.050.068,00 atau sebesar 28,10% dari total belanja daerah. Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk memperkuat kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan rincian pada Lampiran 2.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

#### 7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada TA 2023, Pendapatan Daerah dianggarkan senilai Rp2.048.907.120.318,00 dan pencapaian realisasi senilai Rp2.020.337.607.783,38 sehingga pencapaian target kinerja keuangan mencapai 98,61%. Ditinjau dari sisi pendapatan daerah, pencapaian target kinerja adalah sudah sangat baik.

Alokasi Belanja Daerah dan Transfer dianggarkan senilai Rp2.103.379.795.985,00 dan realisasi mencapai senilai Rp2.032.092.861.107,00 yang berarti tingkat penyerapan belanja daerah terpenuhi 96,61%. Realisasi Belanja dan Transfer diprioritaskan untuk mendukung peningkatan profesionalisme aparatur (*personal capacity building*) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi vital, peningkatan promosi dan kerja sama dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pemerintahan yang peduli lingkungan, kesesuaian dengan visi misi Gubernur Sulawesi Barat, serta dengan tetap menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara maksimal. Ditinjau dari sisi belanja daerah, pencapaian target kinerja keuangan adalah sudah cukup baik dengan capaian 96,61%.

Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah TA 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Penerimaan Daerah pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp116.924.453.299,00 dan terealisasi senilai Rp116.545.164.888,84 atau 99,68%; dan
2. Pembiayaan Pengeluaran Daerah dianggarkan pada tahun 2023 senilai Rp62.451.777.632,00 dan terealisasi senilai Rp40.684.031.871,00 atau 65,14%.

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD TA 2023 dapat diuraikan pada Tabel 10.

**Tabel 10. Realisasi APBD pada Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	2023			2022
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(%)	Realisasi
1.	Jumlah Pendapatan	2.048.907.120.318,00	2.020.337.607.783,38	98,61	Error! Reference source not found.
2.	Jumlah Belanja Dan Transfer	2.103.379.795.985,00	2.032.092.861.107,00	96,61	Error! Reference source not found.
3.	Surplus/Defisit	(54.472.675.667,00)	(11.755.253.323,62)	21,58	Error! Reference source not found.
4.	Pembiayaan	54.472.675.667,00	75.861.133.017,84	139,26	312.023.875.190,74
	Penerimaan	116.924.453.299,00	116.545.164.888,84	99,68	365.969.587.736,74
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	116.924.453.299,00	116.545.164.888,84	99,68	Error! Reference source not found.
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0.00	0,00	Error! Reference source not found.
	Jumlah Penerimaan	116.924.453.299,00	116.545.164.888,84	99,68	Error! Reference source not found.
	Pengeluaran	62.451.777.632,00	40.684.031.871,00	65,14	53.945.712.546,00
	Pembayaran Pokok Utang	62.451.777.632,00	40.684.031.871,00	65,14	Error! Reference source not found.
	Jumlah Pengeluaran	62.451.777.632,00	40.684.031.871,00	65,14	Error! Reference source not found.
	Pembiayaan Netto	54.472.675.667,00	75.861.133.017,84	139,26	Error! Reference source not found.
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	64.105.879.694,22		Error! Reference source not found.

### 7.3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala / Hambatan Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2023 antara lain:

1. Hambatan utama pendapatan daerah yaitu:
  - a. Masih kurangnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendapatan dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak;
  - b. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan mengganti plat kendaraan mereka menjadi kode DC untuk wilayah Sulawesi Barat; dan
  - c. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar pajak, retribusi, maupun pungutan lainnya (tunggakan, sumbangan pihak ketiga, dll) yang dipungut di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Permasalahan lain yang tiap tahunnya perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait pendapatan, khususnya instansi pengelola pendapatan daerah antara lain:

- a. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pemungutan pendapatan daerah;
- b. Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat belum seluruhnya direalisasikan tepat waktu;



- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan;
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah untuk mendukung penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi informasi, terutama dalam bidang pelayanan, perlu ditingkatkan;
- e. Beberapa sumber-sumber PAD yang potensial belum memberikan kontribusi, disebabkan belum adanya regulasi pemerintah daerah yang menjadi dasar pemungutan;
- f. Kesadaran dari wajib pajak dan retribusi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini didukung dengan belum siapnya pemerintah memberikan jaminan kepada wajib pajak dan wajib retribusi bahwa dana yang dipungut dari mereka akan memberikan manfaat pada mereka dan masyarakat luas pada umumnya; dan
- g. Kesadaran taat bayar pajak dari warga masyarakat wajib pajak belum berbudaya.

Selain itu upaya peningkatan penerimaan daerah perlu pula dilakukan dengan optimalisasi investasi, yang dapat menghasilkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tingkat ketergantungan keuangan ke pemerintah pusat dapat dikurangi. Oleh karena itu, pemerintah dalam upaya mendorong perkembangan investasi perlu melakukan perbaikan pelayanan publik, antara lain melalui pemberian kepastian hukum dan kepastian berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan investasi, peningkatan perlindungan investasi, peningkatan perlindungan investasi, dan penciptaan sistem insentif sehingga Sulawesi Barat senantiasa menjadi wilayah yang menarik untuk berinvestasi.

## 2. Hambatan utama Belanja Daerah

Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, hambatan-hambatan dalam realisasi belanja daerah sebagai berikut:

- a. Penetapan belanja yang tidak didukung dengan kelengkapan dokumen pencairan (hibah) sehingga menyebabkan tertundanya pencairan;
- b. Penatausahaan keuangan daerah pada SKPD maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) belum dilaksanakan secara tertib yaitu antara lain penyetoran sisa kas tidak tepat waktu (menyeberang tahun);
- c. Laporan pertanggungjawaban bendahara baik secara fungsional maupun administratif belum dilaksanakan secara tepat waktu sehingga penyampaian laporan semesteran dan laporan akhir tahun tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan;
- d. Pelaporan dana BOS Satdikmen dan Satdikdas belum sesuai dengan ketentuan yang ada; dan
- e. Tidak tertibnya administrasi keuangan BLUD dan Laporan Keuangan BLUD.

### 7.3.3. Pergeseran dan Perubahan APBD

Pemerintah daerah dapat melakukan Perubahan APBD apabila terjadi:

- 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 3. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4. Keadaan darurat; dan/atau
- 5. Keadaan luar biasa

Selama tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan sepuluh kali pergeseran anggaran dengan rincian enam kali mendahului perubahan APBD dan empat kali setelah perubahan APBD serta sekali perubahan APBD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran pertama ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022. Pergeseran anggaran pertama ini untuk mengakomodir pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja pada uraian objek belanja atau pemaketan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.  
Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 11. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pertama sesuai Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	438.341.642.094,00	438.341.642.094,00
4.2	Dana Transfer	1.567.440.205.466,00	1.567.440.205.466,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>
5.1	Belanja Operasi	1.415.249.385.141,00	1.415.249.385.141,00
5.2	Belanja Modal	433.285.810.931,00	433.285.810.931,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	15.087.642.656,00	15.087.642.656,00
5.4	Belanja Transfer	218.151.052.974,00	218.151.052.974,00
	<b>Total Belanja</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>

2. Pergeseran anggaran kedua ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022. Pergeseran anggaran kedua ini juga untuk mengakomodir pergeseran anggaran setelah perubahan untuk penambahan anggaran yang bersumber dari BTT pada Biro Umum Sekretariat Daerah Rangka Kunjungan Wakil Presiden RI di Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 12. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kedua Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	438.341.642.094,00	438.341.642.094,00
4.2	Dana Transfer	1.567.440.205.466,00	1.567.440.205.466,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>
5.1	Belanja Operasi	1.415.249.385.141,00	1.416.495.085.141,00
5.2	Belanja Modal	433.285.810.931,00	433.285.810.931,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	15.087.642.656,00	13.841.942.656,00

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
5.4	Belanja Transfer	218.151.052.974,00	218.151.052.974,00
	<b>Total Belanja</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>

3. Pergeseran anggaran ketiga ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022. Pergeseran anggaran ketiga dilakukan untuk mengakomodir:
- Pergeseran Anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja pada uraian objek belanja atau pemaketan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - Pergeseran Anggaran untuk Memenuhi pengembalian anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah yang telah dilakukan pergeseran dari Belanja Tidak Terduga (BTT).

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 13. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketiga sesuai Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	438.341.642.094,00	438.341.642.094,00
4.2	Dana Transfer	1.567.440.205.466,00	1.567.440.205.466,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>
5.1	Belanja Operasi	1.415.249.385.141,00	1.415.249.385.141,00
5.2	Belanja Modal	433.285.810.931,00	433.285.810.931,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	15.087.642.656,00	15.087.642.656,00
5.4	Belanja Transfer	218.151.052.974,00	218.151.052.974,00
	<b>Total Belanja</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>

4. Pergeseran anggaran keempat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022. Pergeseran anggaran keempat dilakukan untuk mengakomodir:
- Pemenuhan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
  - Pergeseran anggaran pada seluruh SKPD disebabkan karena ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
  - Pergeseran terhadap belanja gaji dan tunjangan (TPP) pada seluruh SKPD.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 14. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Keempat  
sesuai Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	438.341.642.094,00	438.341.642.094,00
4.2	Dana Transfer	1.567.440.205.466,00	1.567.440.205.466,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>
5.1	Belanja Operasi	1.415.249.385.141,00	1.404.308.355.441,00
5.2	Belanja Modal	433.285.810.931,00	459.852.488.837,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	15.087.642.656,00	15.087.642.656,00
5.4	Belanja Transfer	218.151.052.974,00	202.525.404.768,00
	<b>Total Belanja</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>

5. Pergeseran anggaran kelima ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022. Pergeseran anggaran kelima dilakukan untuk mengakomodir pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja pada uraian objek belanja atau pemaketan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan dan Bangsa Politik, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 15. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kelima  
sesuai Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	438.341.642.094,00	438.341.642.094,00
4.2	Dana Transfer	1.567.440.205.466,00	1.567.440.205.466,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>
5.1	Belanja Operasi	1.415.249.385.141,00	1.404.308.355.441,00
5.2	Belanja Modal	433.285.810.931,00	459.852.488.837,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	15.087.642.656,00	15.087.642.656,00
5.4	Belanja Transfer	218.151.052.974,00	202.525.404.768,00
	<b>Total Belanja</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>

6. Pergeseran anggaran keenam ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022. Pergeseran anggaran keenam dilakukan untuk mengakomodir:
- Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja pada uraian objek belanja atau pemaketan pada Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Transmigrasi, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- b. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penghubung, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- c. Pergeseran Perubahan Target Pendapatan Jasa Layanan BLUD dan Perubahan Belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 16. Ringkasan Perubahan APBD Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	438.341.642.094,00	452.188.490.192,00
4.2	Dana Transfer	1.567.440.205.466,00	1.567.440.205.466,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>	<b>2.020.720.695.658,00</b>
5.1	Belanja Operasi	1.415.249.385.141,00	1.413.662.197.726,00
5.2	Belanja Modal	433.285.810.931,00	464.345.494.650,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	15.087.642.656,00	15.087.642.656,00
5.4	Belanja Transfer	218.151.052.974,00	202.525.404.768,00
	<b>Total Belanja</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>	<b>2.095.620.739.800,00</b>

7. Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 tanggal 6 November 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 tanggal 6 November 2023.

Perubahan APBD dilakukan antara lain:

- a. Asumsi perubahan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 direncanakan senilai Rp2.006.873.847.560,00 atau mengalami peningkatan senilai Rp23.669.749.068,00 menjadi Rp2.030.543.596.628,00;
- b. Kebijakan perencanaan belanja dengan mengacu pada APBD TA 2023 sebelum perubahan senilai Rp2.081.773.891.702,00 dan setelah perubahan bertambah senilai Rp3.242.380.593,00 atau mengalami kenaikan senilai 0,9 persen, sehingga menjadi Rp2.085.016.272.295;
- c. Belanja Tidak Terduga, mengalami perubahan menjadi senilai Rp7.154.492.055,00 atau mengalami penurunan senilai Rp7.933.150.601 atau 53% dari sebelum perubahan yaitu senilai Rp15.087.642.656,00;
- d. Belanja Transfer, mengalami perubahan menjadi senilai Rp209.840.321.348,00 atau mengalami penurunan senilai Rp8.310.731.626 atau 4% dari sebelum perubahan yaitu senilai Rp218.151.052.974,00;

- e. Penerimaan Pembiayaan, mengalami perubahan menjadi senilai Rp116.924.453.299,00 atau mengalami penurunan senilai Rp20.530.018.072 atau 15% dari sebelum perubahan yaitu senilai Rp137.454.471.371,00; dan
- f. Pengeluaran Pembiayaan, mengalami perubahan menjadi senilai Rp62.451.777.632,00 atau mengalami penurunan senilai Rp102.649.597 atau 0,9% dari sebelum perubahan yaitu senilai Rp62.554.427.229,00.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 17. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	438.341.642.094,00	479.470.440.628,00
4.2	Dana Transfer	1.567.440.205.466,00	1.549.981.156.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.006.873.847.560,00</b>	<b>2.030.543.596.628,00</b>
5.1	Belanja Operasi	1.415.249.385.141,00	1.422.718.325.036,00
5.2	Belanja Modal	433.285.810.931,00	445.303.133.856,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	15.087.642.656,00	7.154.492.055,00
5.4	Belanja Transfer	218.151.052.974,00	209.840.321.348,00
	<b>Total Belanja</b>	<b>2.081.773.891.702,00</b>	<b>2.085.016.272.295,00</b>

8. Pergeseran Kesatu Setelah Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 tanggal 6 November 2023. Pergeseran anggaran Kesatu Setelah Perubahan dilakukan untuk mengakomodir:
  - a. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Rumah sakit Umum Daerah;
  - b. Pergeseran Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana hasil rapat tanggal 30 September 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - c. Pergeseran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) ke Belanja Bunga berdasarkan hasil Rekonsiliasi dengan PT. SMI pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - d. Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja pada uraian objek belanja atau pemaketan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
  - e. Penambahan anggaran Dana Insentif Fiskal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2023 tentang Keputusan Menteri Keuangan Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 18. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kedua Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	479.470.440.628,00	479.470.440.628,00
4.2	Dana Transfer	1.549.981.156.000,00	1.558.601.664.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.030.543.596.628,00</b>	<b>2.039.164.104.628,00</b>
5.1	Belanja Operasi	1.422.718.325.036,00	1.431.946.597.923,00
5.2	Belanja Modal	445.303.133.856,00	445.236.101.531,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	7.154.492.055,00	6.613.759.493,00
5.4	Belanja Transfer	209.840.321.348,00	209.840.321.348,00
	<b>Total Belanja</b>	<b>2.085.016.272.295,00</b>	<b>2.093.636.780.295,00</b>

9. Kemudian Pergeseran Kedua Setelah Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 tanggal 6 November 2023. Pergeseran anggaran Kedua Setelah Perubahan dilakukan untuk mengakomodir:
  - a. Pergeseran anggaran diakibatkan belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pelayaran perdana pada tanggal 9 Desember 2023 dan kelanjutan pelayaran antar bangsa dari pelabuhan Tanjung Silopo Polewali Mandar ke Lahad Datu Sabah (Malaysia) (BTT) pada Dinas Perhubungan;
  - b. Pergeseran Dana Insentif Fiskal tahun 2023 yang telah disampaikan sebelumnya, dan mendapatkan koreksi pada tanggal 29 November 2023 dari *account representatif* (AR) Wilayah Sulawesi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa rencana penggunaan kegiatan rapat koordinasi Pemerintah Desa pada Dinas Pemerintahan Desa dalam rangka penanganan inflasi dan kemiskinan dialihkan pada kegiatan yang bersentuhan langsung pada masyarakat pada Dinas Sosial kegiatan bantuan beras miskin;
  - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Sekretariat Dewan DPRD, Dinas Perkebunan, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, dan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - d. Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja pada uraian objek belanja atau pemaketan pada Sekretariat DPRD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 19. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketiga  
Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	479.470.440.628,00	479.470.440.628,00
4.2	Dana Transfer	1.549.981.156.000,00	1.558.601.664.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.030.543.596.628,00</b>	<b>2.039.164.104.628,00</b>
5.1	Belanja Operasi	1.422.718.325.036,00	1.431.928.483.948,00
5.2	Belanja Modal	445.303.133.856,00	445.772.978.540,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	7.154.492.055,00	6.094.996.459,00
5.4	Belanja Transfer	209.840.321.348,00	209.840.321.348,00
	<b>Total Belanja</b>	<b>2.085.016.272.295,00</b>	<b>2.093.636.780.295,00</b>

10. Kemudian Pergeseran Ketiga Setelah Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 tanggal 6 November 2023. Pergeseran anggaran Ketiga Setelah Perubahan dilakukan untuk mengakomodir:

- Pergeseran anggaran diakibatkan masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP dalam rangka menyambut Pemilu Serentak di Provinsi Sulawesi Barat (BTT) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Kehutanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Umum Sekretariat Daerah, dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 20. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketiga  
Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	479.470.440.628,00	479.470.440.628,00
4.2	Dana Transfer	1.549.981.156.000,00	1.558.601.664.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.030.543.596.628,00</b>	<b>2.039.164.104.628,00</b>
5.1	Belanja Operasi	1.422.718.325.036,00	1.432.033.210.948,00
5.2	Belanja Modal	445.303.133.856,00	445.772.978.540,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	7.154.492.055,00	5.990.269.459,00
5.4	Belanja Transfer	209.840.321.348,00	209.840.321.348,00
	<b>Total Belanja</b>	<b>2.085.016.272.295,00</b>	<b>2.093.636.780.295,00</b>



11. Kemudian Pergeseran Keempat Setelah Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 tanggal 6 November 2023. Pergeseran anggaran Ketiga Setelah Perubahan dilakukan untuk mengakomodir pergeseran anggaran antar sub kegiatan untuk melakukan penyesuaian belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 392 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Adapun besaran perubahan pada pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 21. Ringkasan Perubahan Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketiga Setelah Perubahan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023**

Kode	Uraian	Sebelum Pergeseran (Rp)	Setelah Pergeseran (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	479.470.440.628,00	479.470.440.628,00
4.2	Dana Transfer	1.549.981.156.000,00	1.568.344.679.690,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.030.543.596.628,00</b>	<b>2.048.907.120.318,00</b>
5.1	Belanja Operasi	1.422.718.325.036,00	1.441.776.226.638,00
5.2	Belanja Modal	445.303.133.856,00	445.772.978.540,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	7.154.492.055,00	5.990.269.459,00
5.4	Belanja Transfer	209.840.321.348,00	209.840.321.348,00
	<b>Total Belanja</b>	<b>2.085.016.272.295,00</b>	<b>2.103.379.795.985,00</b>

## 7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 7.4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat TA 2022, entitas pelaporan yang dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sementara itu, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

#### **7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggunakan basis pengakuan dan pengukuran sebagai berikut:

##### **1. Basis Kas**

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA. Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada LRA.

Pengakuan Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Pengakuan Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

##### **2. Basis Akrual**

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pengakuan pendapatan-LO dan beban-LO, dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian. Basis akrual

untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO.

Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, serta surplus atau defisit.

#### **7.4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2023, penerapan sistem akuntansi pemerintahan terhadap semua jenis laporan telah didasarkan pada SAP yang berbasis akrual dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

###### **a. Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Pendapatan telah diterima pada RKUD;
- 2) Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 3) Pendapatan telah diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
- 4) Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- 5) Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

###### **b. Pengukuran**

- 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat; dan

- 4) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- c. Penyajian dan Pengungkapan
- 1) Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS);
  - 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
    - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
    - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
    - c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
    - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## 2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- a. Pengakuan
- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
    - a) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
    - b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
  - 2) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
  - 3) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
  - 4) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
  - 5) Dalam hal BLUD, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum (BLU);
  - 6) Pengakuan Pendapatan-LO pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah:
    - a) Pendapatan Transfer  
Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur;
    - b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO

mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

7) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui Penetapan, PAD tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a) PAD melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan SK atas pendapatan terkait.

b) PAD tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa SK atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat

ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;

- 4) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur senilai aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
- 5) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- 6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut; dan
- 8) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan;
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
  - a) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c) Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;
  - d) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 3. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- 3) Dalam hal BLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.

b. Pengukuran

- 1) Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan

nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;

- 3) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA; dan
- 4) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- 2) Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 3) Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;
- 4) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a) Belanja Operasi;
  - b) Belanja Modal; dan
  - c) Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam CaLK;
- 5) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu; dan
- 6) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
  - a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
  - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  - d) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

#### **4. Kebijakan Akuntansi Beban**

a. Pengakuan

- 1) Beban diakui pada:
  - a) Saat timbulnya kewajiban;
  - b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak

dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;

- 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- 5) Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu beban diakui sebelum pengeluaran kas, beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dan beban diakui setelah pengeluaran kas.
  - a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;
  - b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran Kas Daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas; dan
  - c) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran Kas Daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya;
- 6) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sementara itu, pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
- 7) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- 8) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran atau pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- 9) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap



pengakuan beban, yaitu:

- a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
- b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
- c) Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
- f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas;
- g) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran Kas Daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban, pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca) komponen Aset Lancar dengan perhitungan secara bulanan tanpa memperhatikan tanggal transaksi.

b. Pengukuran

- 1) Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak);
- 2) Beban diukur berdasarkan:
  - a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
  - b) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- 3) Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-Lain;
  - b) Beban Transfer;
  - c) Beban Non Operasional; dan
  - d) Beban Luar Biasa.
- 2) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional; dan
- 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
  - a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
  - b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
  - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## 5. Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional diakui pada saat diterimanya Surat Keputusan yang menimbulkan adanya hak daerah terhadap transfer masuk (Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden);
- 2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
  - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
  - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- 3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 4) Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan LRA diakui pada saat transfer tersebut masuk ke RKUD.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa;
- 2) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar; dan

- 3) Transfer Keluar untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengukuran

Akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen penerimaan atau pengeluaran yang sah.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD; dan
- 2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat senilai nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
- 2) Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat senilai kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku/Keputusan Gubernur.

c. Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan; dan

- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukuran Transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.

d. Pengungkapan

- 1) Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
  - a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
  - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
  - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
  - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
  - a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
  - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
  - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO; dan
  - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

a. Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD; dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

b. Pengukuran

- 1) Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan;
- 2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
- 3) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

c. Akuntansi Pembiayaan Netto

- 1) Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto; dan
- 2) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

d. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

- 1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat

- lainnya sebagai dana bergulir;
- 2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan;
  - 3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan;
  - 4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang; dan
  - 5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- e. Transaksi dalam Mata Uang Asing  
Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- f. Pengungkapan  
Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:
- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
  - 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

## **7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

- a. Pengakuan  
Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah.
- b. Pengukuran  
  - 1) Kas dan Setara kas dicatat senilai nilai nominal; dan
  - 2) Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- c. Pengungkapan  
  - 1) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas antara lain:
    - a) Saldo Kas di Kas Daerah;
    - b) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan;
    - c) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
    - d) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah.
  - 2) Rincian Kas, baik yang ada di Kas Daerah, di Bendahara Penerimaan, di Bendahara Pengeluaran maupun di Badan Layanan Umum Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

- 3) Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Oleh karena itu jurnal untuk Utang PFK disatukan dalam jurnal Kas Daerah; dan
- 4) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

## 8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Investasi jangka pendek terdiri dari:

- a. Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. Surat Utang Negara (SUN);
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

### a. Pengakuan

- 1) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:
  - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
  - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

### b. Pengukuran

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat senilai biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- 2) Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;

- 3) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito, dicatat senilai nilai nominal deposito tersebut;
- 4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi;
- 5) Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka pendek diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut; dan
- 6) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

c. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi jangka pendek;
- 3) Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- 6) Perubahan pos investasi.

## 9. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dimiliki tidak berkelanjutan) merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen dapat berupa:

- 1) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir; dan
- 4) Investasi non permanen lainnya.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen (dimiliki berkelanjutan) merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu

kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan; dan

- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Pengakuan, Pengukuran, dan Metode Penilaian serta Pelepasan dan Pemindahan Investasi sebagai berikut:

a. Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

b. Pengukuran

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat senilai biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
- 2) Investasi jangka panjang non permanen:
  - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur senilai nilai perolehannya;
  - b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
  - c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat senilai harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

c. Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:



1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai senilai biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai senilai harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

d. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

- 1) Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;
- 2) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
- 3) Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara

membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan

- 4) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

e. Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- 1) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- 2) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- 3) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- 4) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- 5) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

Pengakuan, pengukuran dan penyajian Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebagai berikut:

1) Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat senilai jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.

2) Pengukuran

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat senilai harga perolehan dana bergulir, yaitu senilai jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

3) Penyajian

- a) Pengeluaran Dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam LRA maupun LAK. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat senilai jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir;
- b) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang - Investasi Non Permanen - Dana Bergulir;
- c) Penyajian Dana Bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat senilai harga perolehan, ditambah dengan penguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir;
- d) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku; dan

- e) Dalam hal Kepala Daerah belum menetapkan keputusan yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penghapusan Piutang atas Dana Bergulir, maka pelaksanaan penghapusan atas Piutang Dana Bergulir berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

Penyajian Nilai Bersih yang Dapat Direalisasi (*Net Realizable Value*)

- 1) Agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Penatausahaan dan penyajian selayaknya akun Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan umur dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir.
- 2) Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
- 3) Kebijakan akuntansi penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:
  - a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk senilai persentase tertentu dari akun Investasi Non Permanen Dana Bergulir berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir;
  - b) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya Investasi Non Permanen Dana Bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;
  - c) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa atas umur saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih *outstanding* pada akhir periode pelaporan;
  - d) Saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih *outstanding* pada akhir periode pelaporan dapat diperoleh jika Satuan Kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*);
  - e) Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui:
    - (1) Jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih;
    - (2) Jumlah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih;
    - (3) Jumlah dana bergulir yang dapat ditagih; dan
    - (4) Kebijakan akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
- 4) Adapun Tata Cara Penyisihan, Perhitungan Dana Bergulir dan penetapan *aging schedule* adalah sebagai berikut:
  - a) Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:
    - (1) Penentuan kualitas dana bergulir;
    - (2) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
    - (3) Pencatatan penyisihan dana bergulir;

- (4) Pelaporan dana bergulir; dan
- (5) Penghapusan dana bergulir.
- b) Penentuan kualitas dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf a diklasifikasikan atas:
  - (1) Kualitas lancar;
  - (2) Kualitas kurang lancar;
  - (3) Kualitas diragukan; dan
  - (4) Kualitas macet.
- c) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf b diklasifikasikan atas:
  - (1) Kualitas lancar, senilai 0,0% (nol koma nol persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
  - (2) Kualitas kurang lancar, senilai 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
  - (3) Kualitas diragukan, senilai 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - (4) Kualitas macet, senilai 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- d) Pencatatan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf c dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat senilai nilai kotor (bruto).
- e) Pelaporan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf d meliputi:
  - (1) Beban penyisihan dana bergulir; dan
  - (2) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih
- f) Beban penyisihan dana bergulir pada huruf a disajikan dalam LO.
- g) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada huruf b disajikan dalam neraca.
- h) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 huruf e meliputi:
  - (1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
  - (2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- i) Penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- j) Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
  - (1) Dana bergulir dengan kelola sendiri
    - (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
      - (1)) Umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
      - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
      - (3)) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
      - (4)) Penerima dana kooperatif.
    - (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
      - (1)) Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau

- (2)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (3)) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (4)) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (1)) Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
  - (2)) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3)) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (4)) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (1)) Umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
  - (2)) Penerima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3)) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - (4)) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
  - (5)) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
- (2) Dana Bergulir dengan *executing agency*
  - (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (1)) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
    - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
  - (b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (1)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
    - (2)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
    - (3)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bangkrut; dan/atau
    - (4)) LKB, LKBB, Koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah (*force majeure*).
- (3) Dana Bergulir dengan *chanelling agency*
  - (a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (1)) Umur Dana Bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
    - (2)) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
  - (b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
    - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau

- (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
- (c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- (d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
  - (1)) Umur Dana Bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
  - (2)) Apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3)) Penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - (4)) Penerima Dana Bergulir bangkrut /meninggal dunia; dan/atau
  - (5)) Penerima Dana Bergulir mengalami musibah (*force majeure*).
- k) Kebijakan Akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori, dan tingkat kolektibilitas serta persentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:
  - (1) Kualitas lancar, senilai 0,0% (nol koma nol persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
  - (2) Kualitas kurang lancar, senilai 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
  - (3) Kualitas diragukan, senilai 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - (4) Kualitas macet, senilai 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

## 10. Kebijakan Akuntansi Piutang

### a. Pengakuan

- 1) Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
  - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
  - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - b) Jumlah piutang dapat diukur.
- 3) Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat

dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi.

- 4) Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.
- 5) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku senilai hak daerah yang belum dibayarkan.
- 6) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 7) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya senilai jumlah yang belum ditransfer.
- 8) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 9) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
  - a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
  - b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 10) Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 11) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

- 12) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 13) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

b. Pengukuran

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
  - a) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
  - b) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - c) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - d) Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - a) Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
  - b) Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya;
  - c) Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;



- d) Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
  - a) DBH disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;
  - b) DAU senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
  - c) DAK, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
  - a) Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan;
- 6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*);
- 7) Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a) Kualitas Piutang Lancar;
  - b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
  - d) Kualitas Piutang Macet.
- 9) Penggolongan Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
  - a) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
  - b) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- 10) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
    - (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
    - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
    - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- (1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
  - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
    - (1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
    - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    - (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
    - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya melalui SKPD dan SKRD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
    - (2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
    - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
    - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
    - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
    - (3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
    - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - (1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
    - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 12) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi (misalnya Retribusi Kesehatan di RSUD), dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 13) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari 1 (satu) tahun;

- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 (satu) s.d.2 (dua) tahun;
  - c) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang 2 (dua) s.d. 3 (tiga) tahun;
  - d) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- 1) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
  - 2) Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.
  - 3) Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan pada akun Cadangan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
  - 4) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
  - 5) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
  - 6) Penyajian Penyisihan Piutang  
Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).
- d. Pemberhentian Pengakuan
- 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
  - 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).
  - 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
  - 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
  - 5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
  - 6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
    - a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.

- (1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
  - (2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan
  - (3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan;
  - c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write-off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut;
  - d) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik;
  - e) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan;
  - f) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD;
  - g) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
    - (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
    - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
    - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
    - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
    - (5) Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;

- (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write-off* di negara lain; dan
- (7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write-down* maupun *write-off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

e. Pengungkapan

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
  - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  - b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
  - d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

## 11. Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Pengakuan

- 1) Persediaan diakui pada saat:
  - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
  - b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

b. Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

1) Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*.

Metode perpetual digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan memperhatikan masa berlakunya pemanfaatan barang, seperti obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Metode periodik digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

c. Penilaian

1) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Penilaian dengan metode FIFO digunakan untuk menghitung persediaan obat-obatan.

2) Penilaian persediaan menggunakan metode Periodik. Persediaan akhir dihitung dan dinilai dengan menggunakan persediaan akhir dengan harga pembelian terakhir. Penilaian dengan metode periodik digunakan untuk menghitung persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi yaitu:

- a) persediaan alat tulis kantor;
- b) persediaan alat listrik;
- c) persediaan material/bahan;
- d) persediaan benda pos;
- e) persediaan bahan bakar;
- f) persediaan bahan makanan pokok; dan
- g) persediaan bahan/barang yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

3) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

4) Persediaan disajikan senilai:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar

pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

d. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar;
- 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - a) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - b) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

## 12. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a. Pengakuan

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Berwujud;
  - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - f) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 2) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
- 3) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 5) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

- 1) Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).
- 2) Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit *Air Conditioner* (AC) dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
- 3) Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh pengeluaran yang memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
- 4) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 5) Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset, jika memenuhi kriteria (a) dan (b) sebagai berikut:
  - a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
    - (1) Bertambah ekonomis/efisiensi; dan/atau
    - (2) Bertambah umur ekonomis; dan/atau
    - (3) Bertambah volume; dan/atau
    - (4) Bertambah kapasitas produksi; dan/atau
    - (5) Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
  - b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi atas aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

#### b. Pengukuran

##### Nilai Perolehan Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 3) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya



langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- 5) Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung adalah:
  - a) Biaya Konstruksi Fisik, yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual;
  - b) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan;
  - c) Biaya Pengawasan Konstruksi, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan;
  - d) Biaya Pengelolaan Kegiatan, yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan.
- 6) Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:
  - a) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran  
Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/ dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.
  - b) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis  
Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya.
- c. Penyajian dan Pengungkapan
  - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - a) Penambahan;
    - b) Pelepasan;
    - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
    - d) Mutasi aset tetap lainnya.
  - 3) Informasi penyusutan, meliputi:
    - a) Nilai penyusutan;
    - b) Metode penyusutan yang digunakan;
    - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
    - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  - 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
    - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
    - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
    - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
    - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
  - 5) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
  - c) Jika ada, nama penilai independen;
  - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
  - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- 6) Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
- d. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap
- 1) Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan untuk setiap jenis aset tetap dan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan/renovasi terhadap aset tetap berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
  - 2) Penyusutan aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan, perhitungan penyusutannya pada tahun perolehan aset tersebut.
  - 3) Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun, ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tahun berjalan adalah pendekatan tahunan dengan memperhitungkan penyusutan secara bulanan, yaitu penyusutan dihitung bulanan mulai tanggal perolehan sampai 31 Desember.
  - 4) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

### 13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- a. Pengakuan
- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
  - 2) Kewajiban dapat timbul dari:
    - a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
    - b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
    - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
    - d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
  - 3) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya.

Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

- 4) Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran.
- 5) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
- 6) Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.
- 7) Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

b. Pengukuran

- 1) Kewajiban dicatat senilai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 2) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

- 3) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- c. Penyajian dan Pengungkapan
- Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
  - 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
  - 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
  - 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
    - a) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
      - (1) Pengurangan pinjaman;
      - (2) Modifikasi persyaratan utang;
      - (3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
      - (4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
      - (5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
      - (6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
    - b) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
    - c) Biaya pinjaman:
      - (1) Perlakuan biaya pinjaman;
      - (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
      - (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

#### **14. Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

##### **Pengukuran**

- a. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit - LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain-lain.
- b. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit- LRA.
- c. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

## 7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 7.5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan antara realisasi dengan anggarannya.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.1. Pendapatan</b>	<b>2.020.337.607.783,38</b>	Error! Reference source not found.

Pendapatan Daerah TA 2023 dianggarkan senilai Rp2.048.907.120.318,00 dengan realisasi senilai Rp2.020.337.607.783,38 atau 98,61% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan TA 2022, realisasi pendapatan TA 2023 meningkat senilai Rp125.718.812.448,99 atau 6,64%. Secara rinci anggaran dan realisasi pendapatan TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 22.

**Tabel 22. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	479.470.440.628,00	464.752.317.440,38	(14.718.123.187,62)	96,93	Error! Reference source not found.
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.568.344.679.690,00	1.552.930.071.938,00	(15.414.607.752,00)	99,02	Error! Reference source not found.
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.092.000.000,00	2.655.218.405,00	1.563.218.405,00	243,15	2.062.209.100,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.048.907.120.318,00</b>	<b>2.020.337.607.783,38</b>	<b>(28.569.512.534,62)</b>	<b>98,61</b>	<b>1.894.618.795.334,39</b>

Dari tabel di atas tergambar bahwa realisasi pendapatan belum melampaui target yang ditetapkan yakni mencapai 98,61%. Secara rinci akan diuraikan jenis-jenis pendapatan sebagai berikut.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>464.752.317.440,38</b>	Error! Reference source not found.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah TA 2023 terealisasi senilai Rp464.752.317.440,38 atau 96,93% dari anggaran senilai Rp479.470.440.628,00. Realisasi tersebut naik senilai Rp6.789.031.739,99 atau 1,48% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp457.963.285.700,39. Secara rinci anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 23.

**Tabel 23. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	(%)	Realisasi
Pajak Daerah	393.538.458.610,00	383.079.135.260,00	(10.459.323.350,00)	97,34	Error! Reference source not found.
Retribusi Daerah	3.896.180.000,00	2.523.518.343,00	(1.372.661.657,00)	64,77	Error! Reference source not found.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.183.285.026,00	8.097.676.056,00	(85.608.970,00)	98,95	Error! Reference source not found.
Lain-lain PAD yang Sah	73.852.516.992,00	71.051.987.781,38	(2.800.529.210,62)	96,21	Error! Reference source not found.
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>479.470.440.628,00</b>	<b>464.752.317.440,38</b>	<b>(14.718.123.187,62)</b>	<b>96,93</b>	Error! Reference source not found.

Dari tabel di atas tergambar bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak melampaui target yang ditetapkan yakni mencapai 96,93%.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.1.1. Pajak Daerah</b>	<b>383.079.135.260,00</b>	Error! Reference source not found.

Realisasi Pendapatan

Pajak Daerah TA 2023 senilai Rp383.079.135.260,00 atau senilai 97,34% dari anggaran senilai Rp393.538.458.610,00. Realisasi tersebut meningkat senilai Rp6.660.385.277,00 atau 1,77% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp**Error! Reference source not found.** Secara rinci nilai anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 24.

**Tabel 24. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	89.941.937.347,00	95.190.105.335,00	5.248.167.988,00	105,84	89.715.129.926,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	86.774.040.401,00	89.006.716.233,00	2.232.675.832,00	102,57	92.158.454.750,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	96.479.108.462,00	88.532.410.557,00	(7.946.697.905,00)	91,76	79.361.420.457,00
Pajak Air Permukaan	550.750.800,00	379.668.000,00	(171.082.800,00)	68,94	350.306.208,00
Pajak Rokok	119.792.621.600,00	109.970.235.135,00	(9.822.386.465,00)	91,80	114.833.438.642,00
<b>Jumlah Pajak Daerah</b>	<b>393.538.458.610,00</b>	<b>383.079.135.260,00</b>	<b>(10.459.323.350,00)</b>	<b>97,34</b>	Error! Reference source not found.

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari lima jenis pendapatan untuk pemerintah Provinsi terdapat dua pajak daerah yang mencapai target penerimaan, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 105,84% dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai 102,57%, sementara Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) mencapai 91,76%, Pajak Air Permukaan hanya mencapai 68,94% dan Pajak Rokok mencapai 91,80%. Secara keseluruhan target Pendapatan Pajak Daerah mengalami

penurunan senilai 97,34% dari pendapatan yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan penerimaan Pajak Daerah tahun 2022, Realisasi Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan senilai Rp6.660.385.277,00 atau 1,77%. Adapun kendala atau penyebab tidak tercapainya pajak air permukaan karena kurang kooperatifnya pihak perusahaan memberikan informasi besaran penggunaan dalam setiap pemakaian dan juga belum tersedianya alat yang dapat mengukur besaran penggunaan dalam setiap penggunaan pajak air permukaan.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.1.1.2. Retribusi Daerah</b>	<b>2.523.518.343,00</b>	Error! Reference source not found.
Realisasi Pendapatan		

Retribusi Daerah TA 2023 senilai Rp2.523.518.343,00 atau 64,77% dari anggaran senilai Rp3.896.180.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tersebut turun senilai Rp913.693.257,00 atau 26,58% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp3.437.211.600,00. Secara rinci anggaran dan realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 25.

**Tabel 25. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00	520.498.940,00	220.498.940,00	173,50	634.522.000,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	8.000.000,00	17.460.000,00	9.460.000,00	218,25	15.780.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	827.680.000,00	0,00	(827.680.000,00)	0,00	1.099.340.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	180.000.000,00	215.540.000,00	35.540.000,00	119,74	177.315.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	780.000.000,00	887.401.303,00	107.401.303,00	113,77	727.663.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	285.000.000,00	101.030.000,00	(183.970.000,00)	35,45	63.365.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	965.500.000,00	781.588.100,00	(183.911.900,00)	80,95	719.226.600,00
Retribusi Perizinan Tertentu	550.000.000,00	0,00	(550.000.000,00)	0,00	0,00
<b>Jumlah Retribusi Daerah</b>	<b>3.896.180.000,00</b>	<b>2.523.518.343,00</b>	<b>(1.372.661.657,00)</b>	<b>64,77</b>	Error! Reference source not found.

Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya ada 4 (empat) komponen retribusi yang tidak mencapai target penerimaan, yaitu Retribusi Pelayanan kepelabuhan sebesar 35,45%, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 80,59%, sedangkan pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak punya realisasi dan komponen retribusi lainnya mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

7.5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	8.097.676.056,00	Error! Reference source not found.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut merupakan laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah yaitu Bank Sulselbar.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2023 senilai Rp8.097.676.056,00 atau senilai 98,95% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut menurun senilai Rp85.608.970,00 atau 1,05% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai RpError! Reference source not found..

7.5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	71.051.987.781,38	69.924.039.091,39

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 senilai Rp71.051.987.781,38 atau 96,21% dari anggaran senilai Rp73.852.516.992,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp1.127.948.689,99 atau 1,61% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp69.924.039.091,39. Secara rinci anggaran dan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 26.

**Tabel 26. Daftar Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.970.312.940,00	518.873.401,00	(1.451.439.539,00)	26,33	2.756.667.142,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	45.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	111,11	73.000.000,00
Jasa Giro	12.977.988.956,00	5.831.801.131,00	(7.146.187.825,00)	44,94	11.333.594.692,73
Pendapatan Bunga	0,00	48.106.083,00	48.106.083,00	0,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.320.302.059,00	1.320.302.059,00	0,00	1.381.805.034,10
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.272.200.000,00	1.527.390.987,00	(744.809.013,00)	67,22	10.194.783.186,89
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.960.839.332,00	2.014.896.061,00	54.056.729,00	102,76	1.526.572.312,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	210.000.000,00	0,00	(210.000.000,00)	0,00	3.422.230.525,26
Pendapatan dari Pengembalian	38.850.000,00	1.429.244.200,38	1.390.394.200,00	3.678,88	277.831.656,40
Pendapatan BLUD	53.668.745.764,00	57.677.351.409,00	4.008.313.690,00	107,47	38.405.879.342,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas	708.580.000,00	634.022.450,00	(74.557.550,00)	89,48	551.675.200,00



Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)					
<b>Jumlah Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>73.852.516.992,00</b>	<b>71.051.987.781,38</b>	<b>(2.800.529.211,00)</b>	<b>96,21</b>	Error! Reference source not found.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.1.2. Pendapatan Transfer</b>	<b>1.552.930.071.938,00</b>	Error! Reference source not found.

Pendapatan Transfer dalam bentuk Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah senilai Rp1.552.930.071.938,00 atau senilai 99,02% dari anggaran senilai 1.568.344.679.690,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp118.336.771.404,00 atau 8,25% dibandingkan TA 2022. Secara rinci anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 27.

**Tabel 27. Daftar Rincian Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.559.724.171.690,00	1.544.309.563.938,00	(15.414.607.752,00)	99,01	Error! Reference source not found.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	8.620.508.000,00	8.620.508.000,00	0,00	Error! Reference source not found.	Error! Reference source not found.
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>1.568.344.679.690,00</b>	<b>1.552.930.071.938,00</b>	<b>(15.414.607.752,00)</b>	<b>99,02</b>	Error! Reference source not found.

Dari tabel di atas terlihat bahwa komponen Pendapatan Transfer tidak mencapai target penerimaan. Pendapatan Transfer hanya mencapai 99,02% dari anggaran.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>	<b>1.544.309.563.938,00</b>	<b>1.391.730.167.534,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 senilai Rp1.544.309.563.938,00 atau senilai 99,01% dari anggaran senilai Rp1.559.724.171.690,00. Realisasi penerimaan tersebut mengalami peningkatan senilai Rp152.579.396.404,00 atau 10,96% dibanding realisasi TA 2022 senilai Rp1.391.730.167.534,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 28.

**Tabel 28. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –  
Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak	13.085.566.000,00	15.032.557.628,00	1.946.991.628,00	114,88	Error! Reference source not found.
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	604.482.000,00	9.263.130.578,00	8.658.648.578,00	1.532,41	Error! Reference source not found.
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.006.215.801.000,00	1.013.152.771.627,00	6.936.970.627,00	100,69	Error! Reference source not found.
Dana Alokasi Khusus (DAK)	539.818.322.690,00	506.861.104.105,00	(32.957.218.585,00)	93,89	Error! Reference source not found.
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>	<b>1.559.724.171.690,00</b>	<b>1.544.309.563.938,00</b>	<b>15.414.607.752,00</b>	<b>99,01</b>	<b>1.391.730.167.534,00</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang melampaui target adalah Dana Bagi Hasil Pajak senilai 114,88%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam senilai 1.532,04%, dan Dana Alokasi Umum senilai 100,69%, sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tidak mencapai target adalah Dana Alokasi Khusus senilai 93,89%.

	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>15.032.557.628,00</b>	<b>18.629.983.935,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Pajak untuk TA 2023 senilai Rp15.032.557.628,00 atau senilai 114,88% dari anggaran senilai Rp13.085.566.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.597.426.307,00 atau senilai 19,31% dibandingkan realisasi TA 2022. Secara rinci anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 29.

**Tabel 29. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.317.938.000	2.818.182.758,00	500.244.758,00	121,58	5.041.950.598,00
DBH PPh Pasal 21	10.767.628.000	12.058.634.664,00	1.291.006.664,00	111,99	13.193.252.510,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	0,00	155.740.206,00	155.740.206,00	0,00	394.780.827,00
<b>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>13.085.566.000,00</b>	<b>15.032.557.628,00</b>	<b>1.946.991.628,00</b>	<b>114,88</b>	Error! Reference source not found.

	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>	<b>9.263.130.578,00</b>	Error! Reference source not found.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk TA 2023 senilai Rp9.263.130.578,00 atau 1.532,41% dari anggaran senilai Rp604.482.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan realisasi TA 2022 senilai Rp8.958.521.664,00. Secara rinci anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bagi Hasil Sumber Daya TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 30.

**Tabel 30. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - <i>Landrent</i>	57.480.000,00	42.404.544,00	(15.075.456,00)	73,77	134.485.575,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - <i>Royalty</i>	0,00	12.927.774,00	12.927.774,00	0,00	104.302.339,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	169.709.000,00	171.935.300,00	2.226.300,00	101,31	20.589.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	8.653.679.000,00	8.653.679.000,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Dana Reboisasi (DR)	377.293.000	382.183.960,00	4.890.960,00	101,30	45.232.000,00
<b>Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>	<b>604.482.000,00</b>	<b>9.263.130.578,00</b>	<b>8.054.166.578,00</b>	<b>1.532,41</b>	Error! Reference source not found.

**7.5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>1.013.152.771.627,00</b>	Error! Reference source not found.

Realisasi Dana Alokasi

Umum TA 2023 senilai Rp1.013.152.771.627,00 atau 100,69% dari anggaran senilai Rp1.006.215.801.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp43.298.875.298,00 atau 4,46% dibandingkan realisasi TA 2022.

**7.5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>506.861.104.105,00</b>	Error! Reference source not found.

Realisasi Dana Alokasi

Khusus (DAK) TA 2023 senilai Rp506.861.104.105,00 atau 93,89% dari anggaran senilai Rp539.818.322.690,00. Realisasi DAK terdiri dari realisasi DAK Fisik senilai Rp308.579.832.429,00 dan realisasi DAK Non Fisik senilai Rp198.281.271.676,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp103.919.425.749,00 atau 25,79% dibandingkan realisasi TA 2022 senilai Rp402.941.678.356,00. Secara rinci anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Khusus TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 31.

**Tabel 31. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  
Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	53.750.593.000,00	42.450.748.488,00	(11.299.844.512,00)	78,98	54.429.759.400,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	0,00	0,00	0,00	0,00	20.436.198.330,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	0,00	104.837.169.599,00	104.837.169.599,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	483.429.420,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.947.560,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	12.343.925.000,00	11.812.467.204,00	(531.457.796,00)	95,69	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	16.100.314.000,00	13.736.983.049,00	(2.363.330.951,00)	85,32	5.360.652.970,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	45.102.326.000,00	0,00	(45.102.326.000,00)	0,00	6.651.773.174,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	43.544.930.039,00	43.544.930.039,00	0,00	3.943.407.660,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.274.086.000,00	2.893.087.974,00	(380.998.026,00)	88,36	2.842.810.598,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	16.832.639.515,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	118.882.995.000,00	0,00	0,00	0,00	112.136.412.316,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	90.282.347.000,00	72.838.283.706,00	(17.444.063.294,00)	80,68	2.484.723.830,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	16.466.162.370,00	16.466.162.370,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	97.665.090.000,00	97.380.991.830,00	(284.098.170,00)	99,71	96.846.571.523,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.442.500.000,00	4.102.500.000,00	(340.000.000,00)	92,35	932.500.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	84.426.848.690,00	84.426.846.000,00	(2.690,00)	100,00	67.048.830.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.550.000.000,00	2.084.236.111,00	(465.763.889,00)	81,73	2.612.250.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	925.743.000,00	925.743.000,00	0,00	100,00	1.805.624.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.500.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.712.500.000,00	1.563.566.712,00	(148.933.288,00)	91,30	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.061.222.000,00	4.835.031.343,00	(226.190.657,00)	95,53	2.014.209.000,00

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
DAK Non Fisik-PK2UKM	1.728.533.000,00	1.455.732.498,00	(272.800.502,00)	84,22	1.622.678.340,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.130.500.000,00	1.116.477.200,00	(14.022.800)	98,76	850.365.720,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	390.146.982,00	(48.653.018,00)	88,91	198.395.000,00
<b>Jumlah Dana Alokasi Umum</b>	<b>539.818.322.690,00</b>	<b>506.861.104.105,00</b>	<b>(32.957.218.585,00)</b>	<b>93,89</b>	<b>402.941.678.356,00</b>

**7.5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>8.620.508.000,00</b>	<b>42.863.133.000,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 senilai Rp8.620.508.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp8.620.508.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp34.242.625.000,00 atau 79,89% dibandingkan realisasi TA 2022. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari Dana Insentif Daerah dan Insentif Fiskal, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 32. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.863.133.000,00
Insentif Fiskal	8.620.508.000,00	8.620.508.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>8.620.508.000,00</b>	<b>8.620.508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42.863.133.000,00</b>

**7.5.1.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>0,00</b>	<b>42.863.133.000,00</b>

Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah TA 2023 senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp42.863.133.000,00 atau 100,00% dibandingkan realisasi TA 2022.

**7.5.1.1.2.2.2. Insentif Fiskal**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>8.620.508.000,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Pendapatan Insentif Fiskal TA 2023 senilai Rp8.620.508.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp8.620.508.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 100,00% dibandingkan realisasi TA 2022.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>2.655.218.405,00</b>	Error! Reference source not found.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 senilai Rp2.655.218.405,00 atau 243,15% dari anggaran senilai Rp1.092.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp593.009.305,00 atau 28,76% dibandingkan realisasi TA 2022. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 33. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Pendapatan Hibah	1.092.000.000,00	2.655.218.405,00	1.563.218.405,00	243,15	2.062.209.100,00
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>1.092.000.000,00</b>	<b>2.655.218.405,00</b>	<b>1.563.218.405,00</b>	<b>243,15</b>	<b>2.062.209.100,00</b>

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah</b>	<b>2.655.218.405,00</b>	Error! Reference source not found.

Realisasi Pendapatan Hibah pada TA 2023 senilai Rp2.655.218.405,00 atau 243,15% dari anggaran senilai Rp1.092.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp593.009.305,00 atau 28,76% dibandingkan realisasi TA 2022. Anggaran dan realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 34. Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan dalam Negeri Lainnya	347.400.000,00	7.814.357,00	(339.585.643,00)	2,25	0,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri	744.600.000,00	355.444.200,00	(994.960.000,00)	47,74	347.040.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya	0,00	2.291.959.848,00	2.291.959.848,00	<b>0,00</b>	1.715.169.100,00

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Jumlah Pendapatan Hibah	1.092.000.000,00	2.655.218.405,00	1.563.218.405,00	243,15	Error! Reference source not found.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.2. Belanja dan Transfer</b>	<b>2.032.092.861.107,00</b>	<b>2.089.718.217.226,29</b>

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Belanja dan Transfer Daerah TA 2023 dianggarkan senilai Rp2.103.379.795.985,00 dengan realisasi senilai 2.032.092.861.107,00 atau 96,61% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding TA 2022, realisasi Belanja dan Transfer mengalami penurunan senilai Rp57.625.356.119,29 atau 2,76%. Adapun rincian Belanja dan Transfer ditunjukkan pada Tabel 35.

**Tabel 35. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Operasi	1.441.776.226.638,00	1.412.033.398.809,00	(29.742.827.829,00)	97,94	Error! Reference source not found.
Belanja Modal	445.772.978.540,00	414.597.343.450,00	(31.175.635.090,00)	93,01	Error! Reference source not found.
Belanja Tak Terduga	5.990.269.459,00	349.322.500,00	(5.640.946.959,00)	5,83	Error! Reference source not found.
Transfer	209.840.321.348,00	205.112.796.348,00	(4.727.525.000,00)	97,75	Error! Reference source not found.
<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>	<b>2.103.379.795.985,00</b>	<b>2.032.092.861.107,00</b>	<b>(71.287.226.093,00)</b>	<b>96,61</b>	Error! Reference source not found.

Dari tabel belanja dan transfer dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pada belanja dan transfer mencapai 96,61% dari anggaran.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>1.412.033.398.809,00</b>	Error! Reference source not found.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Subsidi, Belanja Hibah, dan Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah senilai Rp1.412.033.398.809,00 atau 97,94 % dari anggaran senilai Rp1.441.776.226.638,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp96.089.655.310,71 atau 7,30% dibandingkan TA 2022. Rincian Belanja Operasi ditunjukkan dalam Tabel 36.

**Tabel 36. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai	644.454.066.816,00	641.336.657.512,00	(3.117.409.304,00)	99,52	Error! Reference source not found.
Belanja Barang dan Jasa	733.250.373.532,00	707.493.944.795,00	(25.756.428.737,00)	96,49	Error! Reference source not found.
Belanja Bunga	18.432.685.502,00	18.432.685.502,00	0,00	100,00	Error! Reference source not found.
Belanja Hibah	41.574.100.788,00	40.715.111.000,00	(858.989.788,00)	97,93	Error! Reference source not found.
Belanja Bantuan Sosial	4.065.000.000,00	4.055.000.000,00	(10.000.000,00)	99,75	Error! Reference source not found.
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.441.776.226.638,00</b>	<b>1.412.033.398.809,00</b>	<b>(29.742.827.829,00)</b>	<b>97,94</b>	Error! Reference source not found.

#### 7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

**TA 2023  
(Rp)**  
**641.336.657.512,00**

**TA 2022  
(Rp)**  
Error! Reference source not found.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 senilai Rp641.336.657.512,00, sedangkan TA 2022 senilai Rp606.681.872.761,29 atau terdapat kenaikan belanja pegawai senilai Rp34.654.784.751,00 atau 5,71%. Adapun rincian Belanja Pegawai tersebut dapat dilihat pada Tabel 37.

**Tabel 37. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	403.614.948.344,00	402.856.400.385,00	(758.547.959,00)	99,81	389.126.758.397,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	97.729.442.108,00	97.192.968.799,00	(536.473.309,00)	99,45	96.425.259.392,29
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.201.600.000,00	1.201.506.192,00	(93.808,00)	99,99	1.201.288.050,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.016.824.874,00	118.331.814.756,00	(1.685.010.118,00)	98,60	97.953.820.473,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.819.631.573,00	21.683.131.622,00	(136.499.951,00)	99,37	21.833.032.404,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	71.619.917,00	70.835.758,00	(784.159,00)	98,91	141.714.045,00
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>644.454.066.816,00</b>	<b>641.336.657.512,00</b>	<b>(3.117.409.304,00)</b>	<b>99,52</b>	Error! Reference source not found.

Dari tabel di atas secara umum dapat dijelaskan bahwa realisasi Belanja Pegawai mencapai 99,52% dari anggaran.

#### 7.5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

**TA 2023  
(Rp)**  
**707.493.944.795,00**

**TA 2022  
(Rp)**  
Error! Reference source not found.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 senilai Rp707.493.944.795,00, sedangkan TA 2022 senilai Rp628.999.130.965,00. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 terjadi peningkatan



senilai Rp78.494.813.830,00 atau 12,48%. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada Tabel 38.

**Tabel 38. Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%	Realisasi
Belanja Barang	246.491.565.464,00	229.461.357.731,00	(17.030.207.733,00)	93,09	209.675.048.552,00
Belanja Jasa	190.702.733.661,00	182.286.181.760,00	(8.416.551.901,00)	95,59	152.593.485.946,00
Belanja Pemeliharaan	26.263.486.928,00	26.005.283.720,00	(258.203.208,00)	99,02	23.193.779.516,00
Belanja Perjalanan Dinas	122.916.459.704,00	119.265.822.252,00	(3.650.637.452,00)	97,03	115.406.392.772,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.950.190.250,00	2.842.855.280,00	(107.334.970,00)	96,36	2.984.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	85.192.738.812,00	84.635.627.314,00	(557.111.498,00)	99,35	82.154.409.462,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.733.198.713,00	62.996.816.738,00	4.263.618.025,00	107,26	42.991.814.717,00
<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>733.250.373.532,00</b>	<b>707.493.944.795,00</b>	<b>(25.756.428.737,00)</b>	<b>96,49</b>	Error! Reference source not found.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan semua Belanja Barang dan Jasa terealisasi senilai 96,49% dari anggaran.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.2.1.3. Belanja Bunga</b>	<b>18.432.685.502,00</b>	Error! Reference source not found.

Realisasi Belanja Bunga

TA 2023 adalah senilai Rp18.432.685.502,00, sedangkan TA 2022 adalah senilai RpError! Reference source not found. atau terjadi kenaikan senilai Rp6.457.523.235,00 atau 25,94%. Belanja Bunga tersebut merupakan pembayaran bunga atas utang pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna mendanai pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Provinsi Sulawesi Barat. Serta pinjaman PEN yang digunakan untuk pembangunan empat ruas jalan provinsi.

**Tabel 39. Rincian Realisasi Belanja Bunga TA 2023**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran Bunga Pinjaman PIP-RSUD	2.359.257.795,00
2.	Pembayaran Bunga Pinjaman PEN 2022	15.532.695.143,00
3.	Pembayaran Biaya Pengelolaan Rekening Pinjaman PEN Tahun 2021	500.739.386,00
4.	Pembayaran Biaya Pengelolaan Rekening Pinjaman PEN Tahun 2020	39.993.178,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.432.685.502,00</b>

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.2.1.4. Belanja Hibah</b>	<b>40.715.111.000,00</b>	<b>53.762.531.035,00</b>

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 adalah senilai Rp40.715.111.000,00, sedangkan TA 2022 adalah senilai Rp53.762.531.035,00 atau terjadi penurunan senilai Rp13.047.420.035,00 atau 24,27%, Rincian belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 40. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.074.249.600,00	1.074.249.600,00	0,00	100,00	1.074.249.600,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	21.085.000.000,00	20.233.500.000,00	(851.500.000,00)	95,96	36.397.136.434,00
Belanja Hibah Dana BOS	16.914.851.188,00	16.907.361.400,00	(7.489.788,00)	99,96	16.291.145.001,00
<b>Jumlah Belanja Hibah</b>	<b>41.574.100.788,00</b>	<b>40.715.111.000,00</b>	<b>(858.989.788,00)</b>	<b>97,93</b>	Error! Reference source not found.

Dari tabel di atas secara umum dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja hibah mencapai 97,93% dari anggaran.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>4.055.000.000,00</b>	Error! Reference source not found.

Realisasi Belanja

Bantuan Sosial TA 2023 adalah senilai Rp4.055.000.000,00 dari pagu anggaran senilai Rp4.065.000.000,00 atau sebesar 99,75%, sedangkan TA 2022 adalah senilai Rp1.610.000.000,00 atau terjadi penurunan senilai Rp2.445.000.000,00 atau 151,86%.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>414.597.343.450,00</b>	Error! Reference source not found.

Belanja Modal adalah

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta aset tak berwujud. Realisasi Belanja Modal TA 2023 senilai Rp414.597.343.450,00 atau sebesar 93,01% dari pagu anggaran senilai Rp445.772.978.540,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp132.949.503.391,00 atau 24,28% dari TA 2022 senilai Rp547.546.846.841,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada

Tabel 41.

**Tabel 41. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)	(%)	Realisasi
Belanja Modal Tanah	19.005.138.018,00	18.719.773.147,00	(285.364.871,00)	98,50	Error! Reference source not found.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.998.778.925,00	156.584.512.680,00	(1.414.266.245,00)	99,10	Error! Reference source not found.
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.882.209.047,00	123.131.105.879,00	(21.751.103.168,00)	84,99	Error! Reference source not found.
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	112.112.668.610,00	106.195.431.644,00	(5.917.236.966,00)	94,72	Error! Reference source not found.
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.882.950.880,00	2.221.525.096,00	(661.425.784,00)	77,06	Error! Reference source not found.
Belanja Modal Aset Lainnya	8.891.233.060,00	7.744.995.004,00	(1.146.238.056,00)	87,11	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>445.772.978.540,00</b>	<b>414.597.343.450,00</b>	<b>(31.175.635.090,00)</b>	<b>93,01</b>	Error! Reference source not found.

Adapun rincian belanja modal dapat diuraikan sebagai berikut:

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.2.2.1. Belanja Modal - Tanah</b>	<b>18.719.773.147,00</b>	<b>17.898.298.672,00</b>

Realisasi Belanja Modal berupa Tanah TA 2023 adalah senilai Rp18.719.773.147,00, sedangkan TA 2022 senilai Rp17.898.298.672,00 atau terjadi peningkatan senilai Rp821.474.475,00 atau 4,59%. Belanja Modal – Tanah TA 2023 diperuntukkan untuk Belanja Modal Tanah Persil senilai Rp18.719.773.147,00.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.2.2.2. Belanja Modal - Peralatan dan Mesin</b>	<b>156.584.512.680,00</b>	Error! Reference source not found.

Realisasi Belanja Modal berupa Peralatan dan Mesin TA 2023 senilai Rp156.584.512.680,00, sedangkan TA 2022 senilai Rp91.589.673.273,00 atau terjadi peningkatan senilai Rp64.994.839.407,00 atau 70,96%. Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2023 diperuntukkan:

- Belanja Modal Alat Besar	Rp	474.314.600,00
- Belanja Modal Alat Angkutan	Rp	3.278.788.150,00
- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp	5.520.989.922,00
- Belanja Modal Alat Pertanian	Rp	3.686.566.110,00
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp	22.062.164.851,00
- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp	6.552.422.236,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp	84.718.005.120,00
- Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp	17.782.188.318,00
- Belanja Modal Komputer	Rp	7.272.356.205,00
- Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	Rp	68.257.000,00

- Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	Rp	263.632.600,00
- Belanja Modal Alat Peraga	Rp	49.455.000,00
- Belanja Modal Rambu-Rambu	Rp	114.084.690,00
- Belanja Modal Peralatan Olahraga	Rp	114.481.600,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp	4.626.806.278,00
	Rp	<u>156.584.512.680,00</u>

	<u>TA 2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>TA 2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>7.5.1.2.2.3. Belanja Modal – Gedung dan Bangunan</b>	<b>123.131.105.879,00</b>	<b>131.955.470.775,00</b>

Realisasi Belanja Modal berupa Gedung dan Bangunan TA 2023 senilai Rp123.131.105.879,00 sedangkan TA 2022 senilai Rp131.955.470.775,00 atau terjadi penurunan senilai Rp8.824.364.896,00 atau 6,69%. Realisasi Belanja Modal – Gedung dan Bangunan TA 2023 diperuntukan:

- Pengadaan Bangunan Gedung	Rp	119.144.067.108,00
- Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp	3.987.038.771,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b><u>123.131.105.879,00</u></b>

	<u>TA 2023</u> <u>(Rp)</u>	<u>TA 2022</u> <u>(Rp)</u>
<b>7.5.1.2.2.4. Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>106.195.431.644,00</b>	<b>272.994.673.862,00</b>

Realisasi Belanja Modal berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 senilai Rp106.195.431.644,00 sedangkan TA 2022 senilai Rp272.994.673.862,00 atau terjadi penurunan senilai Rp166.799.242.218,00 atau 61,10%. Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 diperuntukkan:

- Belanja Modal Jalan	Rp	64.588.153.468,00
- Belanja Modal Jembatan	Rp	9.295.694.931,00
- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	Rp	4.358.577.009,00
- Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp	5.531.015.704,00
- Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	Rp	833.539.412,00
- Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	Rp	1.019.557.740,00
- Belanja Modal Bangunan Air Kotor	Rp	13.612.041.695,00
- Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	Rp	4.856.096.707,00
- Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Rp	296.254.566,00
- Belanja Modal Instalasi Air Kotor	Rp	1.756.454.062,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp	48.046.350,00
<b>Jumlah</b>		<b><u>106.195.431.644,00</u></b>

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.2.2.5. Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2.221.525.096,00</b>	<b>33.108.730.259,00</b>

Realisasi Belanja Modal berupa Aset Tetap Lainnya TA 2023 senilai Rp2.221.525.096,00, sedangkan TA 2022 senilai Rp33.108.730.259,00 atau terjadi penurunan senilai Rp30.887.205.163,00 atau 93,29%. Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2023 diperuntukkan:

- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	Rp	1.129.435.800,00
- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	Rp	99.944.400,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	Rp	992.144.896,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.221.525.096,00</b>

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.2.2.6. Belanja Modal – Aset Lainnya</b>	<b>7.744.995.004,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 senilai Rp7.744.995.004,00, sedangkan TA 2022 senilai Rp0,00, karena tidak di anggarkan di rekening Belanja Modal- Aset Lainnya yang merupakan Aset Tak Berwujud.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.2.3 Belanja Tak Terduga</b>	<b>349.322.500,00</b>	<b>1.323.158.559,00</b>

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 senilai Rp349.322.500,00 atau 5,83% dari yang dianggarkan senilai Rp5.990.269.459,00 atau terjadi penurunan senilai Rp 973.836.059,00 atau 73,60% dari realisasi TA 2022 senilai Rp1.323.158.559,00. Realisasi TA 2023 digunakan untuk pengembalian dana BOS Kinerja Tahun 2023 terhadap sekolah yang termasuk dalam program SMK Pusat Keunggulan namun masih menerima dana BOS Kinerja.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.2.4 Transfer</b>	<b>205.112.796.348,00</b>	Error! Reference source not found.

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Realisasi Belanja Transfer TA 2023 senilai Rp205.112.796.348,00 atau senilai 97,75% dari anggaran senilai Rp209.840.321.348,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp19.791.671.980,00 atau 8,80% dibanding TA 2022 senilai Rp224.904.468.328,00. Rincian Belanja Transfer ke Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 42.

Tabel 42. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer ke Kabupaten TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	196.905.296.348,00	196.905.296.348,00	0,00	Error! Reference source not found.	Error! Reference source not found.
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, dan Desa	12.935.025.000,00	8.207.500.000,00	(4.727.525.000,00)	63,45	Error! Reference source not found.
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>209.840.321.348,00</b>	<b>205.112.796.348,00</b>	<b>(4.727.525.000,00)</b>	<b>97,75</b>	<b>Error! Reference source not found.</b>

**7.5.1.3. Surplus/Defisit**

**TA 2023**  
**(Rp)**  
**(11.755.253.323,62)**

**TA 2022**  
**(Rp)**  
Error! Reference source not found.

Surplus/Defisit adalah

selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Pada TA 2023 terdapat defisit senilai Rp(11.755.253.323,62) sedangkan TA 2022 defisit senilai Rp(195.099.421.891,90). Perhitungan surplus/defisit TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 43.

Tabel 43. Daftar Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Pendapatan	2.048.907.120.318,00	2.020.337.607.783,38	(28.569.512.534,62)	98,61	Error! Reference source not found.
Belanja Dan Transfer	2.103.379.795.985,00	2.032.092.861.107,00	(71.286.934.878,00)	96,61	Error! Reference source not found.
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(54.472.675.667,00)</b>	<b>(11.755.253.323,62)</b>	<b>42.717.422.343,38</b>	<b>21,58</b>	<b>(195.099.421.891,90)</b>

**7.5.1.3.1. Pembiayaan Netto**

**TA 2023**  
**(Rp)**  
**75.861.133.017,84**

**TA 2022**  
**(Rp)**  
**312.023.875.190,74**

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Pembiayaan Netto TA 2023 senilai Rp75.861.133.017,84, sedangkan TA 2022 senilai Rp312.023.875.190,74. Pembiayaan Netto TA 2023 mengalami penurunan senilai Rp236.163.821.512,90 atau 75,69%. Realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 mencapai 139,26% dari anggaran. Rincian dan perhitungan Pembiayaan Netto TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 44.

Tabel 44. Daftar Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	116.924.453.299,00	116.545.164.888,84	(379.288.410,16)	99,68	Error! Reference source not found.
Pengeluaran Pembiayaan	62.451.777.632,00	40.684.031.871,00	(21.767.745.761,00)	65,14	Error! Reference source not found.
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>54.472.675.667,00</b>	<b>75.861.133.017,84</b>	<b>21.388.457.350,84</b>	<b>139,26</b>	Error! Reference source not found.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.3.1.1. Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>116.545.164.888,84</b>	<b>365.969.587.736,74</b>

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan Pembiayaan TA 2023 senilai Rp116.545.164.888,84 sedangkan TA 2022 senilai Rp365.969.587.736,74. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 mencapai 99,68% dari anggaran. Rincian Penerimaan Pembiayaan TA 2023 ditunjukkan dalam Tabel 45.

Tabel 45 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2023				Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)	
Penggunaan SiLPA	116.924.453.299,00	116.545.164.888,84	(0,16)	99,68	170.299.649.601,74
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	195.669.938.135,00
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>116.924.453.299,00</b>	<b>116.545.164.888,84</b>	<b>(0,16)</b>	<b>99,68</b>	<b>365.969.587.736,74</b>

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 lebih kecil dibandingkan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 senilai Rp249.424.422.847,90 atau 68,15%.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.1.3.1.2. Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>40.684.031.871,00</b>	Error! Reference source not found.

#### Pengeluaran

Pembiayaan adalah seluruh transaksi pengeluaran keuangan pemerintah yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan antara lain digunakan untuk pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pembayaran kembali

pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 senilai Rp40.684.031.871,00 sedangkan TA 2022 senilai Rp40.684.031.871,00 dengan rincian ditunjukkan dalam Tabel 46.

**Tabel 46. Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah  
Provinsi Sulawesi Barat TA 2023**

*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Realisasi
1.	Pembayaran Pokok PEN	40.684.031.871,00
	<b>Jumlah</b>	<b>40.684.031.871,00</b>

1. Pada Tahun 2023 dilakukan pembayaran pokok pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai Rp23.112.511.917,00 melalui:
  - SP2D Nomor 34.00/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.30.0000/P.01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 senilai Rp11.556.255.964,00;
  - SP2D Nomor 34.00/04.0/000002/LS/5.02.0.00.0.00.30.0000/P.03/05/2022, tanggal 15 Juni 2023 senilai Rp11.556.255.953,00;
2. Pada Tahun 2023 dilakukan pembayaran pokok pinjaman PEN 2020 melalui Potongan transfer DAU 2023 sesuai dengan:
  - Kewajiban Angsuran PEN 2020 PT. SMI tanggal 02 Januari 2023 senilai Rp772.068.869,00;
  - Kewajiban Angsuran PEN 2020 PT. SMI tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp772.068.869,00;
  - Kewajiban Angsuran PEN 2020 PT. SMI tanggal 28 Februari 2023 senilai Rp772.068.869,00;
  - Kewajiban Angsuran PEN 2020 PT. SMI tanggal 31 Maret 2023 senilai Rp772.068.869,00;
  - Kewajiban Angsuran PEN 2020 PT. SMI tanggal 28 April 2023 senilai Rp772.068.869,00;
  - Kewajiban Angsuran PEN 2020 PT. SMI tanggal 31 Mei 2023 senilai Rp772.068.869,00;
  - Kewajiban Angsuran PEN 2020 PT. SMI tanggal 30 Juni 2023 senilai Rp772.068.869,00;
  - Kewajiban Angsuran PEN 2020 PT. SMI tanggal 31 Juli 2023 senilai Rp772.068.869,00;
  - Kewajiban Angsuran PEN 2020 PT. SMI tanggal 31 Agustus 2023 senilai Rp772.068.869,00;
  - Kewajiban Angsuran PEN 2020 PT. SMI tanggal 29 September 2023 senilai Rp772.068.869,00;
  - Kewajiban Angsuran PEN 2020 PT. SMI tanggal 31 Oktober 2023 senilai Rp772.068.869,00;
  - Kewajiban Angsuran PEN 2020 PT. SMI tanggal 30 November 2023 senilai Rp772.068.869,00;
3. Pada Tahun 2023 Pengembalian Pokok Pinjaman yang ditarik oleh Penyedia Jasa Pinjaman Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PT.SMI (PEN 2021)
  - SP2D Nomor 34.00/04.0/3/LS/5.02.0.00.0.00.30.0000/P.13/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 senilai Rp788.083.532,00.



#### 7.5.1.4. Sisa Lebih

<b>Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Realisasi SiLPA TA 2023 senilai Rp64.105.879.694,22 atau mengalami penurunan senilai Rp52.818.573.604,62 atau 45,17% dibanding SiLPA TA 2022. Perhitungan SiLPA TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 47.	<b>64.105.879.694,22</b>	Error! Reference source not found.

**Tabel 47. Rincian SiLPA TA 2023 dan 2022**

*(dalam rupiah)*

<b>Uraian</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2022</b>
Pendapatan (A)	2.020.337.607.783,38	Error! Reference source not found.
Belanja dan Transfer (B)	2.032.092.861.107,00	Error! Reference source not found.
Surplus/(Defisit) (C) = (A - B)	(11.755.253.323,62)	Error! Reference source not found.
Pembiayaan Netto (D)	75.861.133.017,84	Error! Reference source not found.
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (E) = (C+D)</b>	<b>64.105.879.694,22</b>	Error! Reference source not found.

Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3.

#### 7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Tujuan kebijakan akuntansi pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian LPSAL untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian LPSAL yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis akrual untuk entitas pelaporan.

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Adapun perbandingan LPSAL per 31 Desember 2023 dengan LPSAL tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	<b>116.924.453.298,84</b>	<b>170.299.649.601,74</b>

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 senilai Rp116.924.453.298,84, sedangkan untuk Tahun 2022 senilai Rp170.299.649.601,74. SiLPA digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023.

	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan</b>	<b>116.545.164.888,84</b>	<b>170.299.649.601,74</b>

Sampai dengan 31 Desember 2023, SAL yang digunakan sebagai penerimaan tahun

berjalan senilai Rp116.545.164.888,84. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal karena terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp379.288.410,00. Jika dibandingkan dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022, nilai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 lebih kecil senilai Rp53.754.484.712,90.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>64.105.879.694,22</b>	Error! Reference source not found.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 senilai Rp64.105.879.694,22 sedangkan Tahun 2022 senilai Rp116.924.453.298,84 dapat diuraikan sebagai berikut:

	<u>SiLPA 2023 (Rp)</u>	<u>SiLPA 2022 (Rp)</u>
Surplus/Defisit Anggaran	(11.755.253.323,62)	(195.099.421.891,90)
Pembiayaan Netto	75.861.133.017,84	312.023.875.190,74
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>64.105.879.694,22</b>	Error! Reference source not found.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>64.105.879.694,22</b>	Error! Reference source not found.

Sampai dengan berakhirnya TA 2023 Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah senilai Rp64.105.879.694,22, sedangkan untuk TA 2022 adalah senilai RpError! Reference source not found..

### 7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.1. Aset</b>	<b>3.445.928.693.960,26</b>	<b>3.343.152.636.287,71</b>

Saldo Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp3.445.928.693.960,26 dan Rp3.343.152.636.287,71 atau naik 3,07% dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 48. Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Aset Lancar	163.678.255.738,07	Error! Reference source not found.
2.	Investasi Jangka Panjang	75.773.207.446,00	Error! Reference source not found.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.	Aset Tetap	3.098.371.703.077,19	Error! Reference source not found.
4.	Aset Lainnya	108.105.527.699,00	Error! Reference source not found.
	<b>Jumlah</b>	<b>3.445.928.693.960,26</b>	<b>3.343.152.636.287,71</b>

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.3.1.1. Aset Lancar</b>	<b>163.678.255.738,07</b>	<b>183.457.037.851,26</b>

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian saldo Aset Lancar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Tabel 49.

**Tabel 49. Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	60.747.618.338,33	Error! Reference source not found.
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	38.357.794,89	Error! Reference source not found.
3.	Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	73.538.118,00	Error! Reference source not found.
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran BOS	34.090,00	Error! Reference source not found.
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	3.246.331.353,00	Error! Reference source not found.
6.	Kas Lainnya	3.899.846,00	Error! Reference source not found.
7.	Beban Dibayar Dimuka	268.205.175,71	Error! Reference source not found.
8.	Piutang Lainnya	6.614.077.453,00	Error! Reference source not found.
9.	Penyisihan Piutang	(1.766.255.800,00)	0,00
10.	Persediaan	94.452.449.369,14	Error! Reference source not found.
	<b>Jumlah</b>	<b>163.678.255.738,07</b>	<b>Error! Reference source not found.</b>

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.3.1.1.1. Kas di Kasda</b>	<b>60.747.618.338,33</b>	Error! Reference source not found.

Saldo kas tersebut merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 yang berada di rekening Kas Daerah sesuai Buku Kas Umum (BKU) Kas Daerah (Kasda) senilai Rp60.747.618.338,33 atau turun senilai Rp41.270.653.439,62 atau 40,45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp102.018.271.777,95. Rincian saldo kas di rekening giro Kas Daerah dapat dilihat pada Tabel 50.

**Tabel 50. Rincian Kas di Kasda per 31 Desember 2023 dan 2022**

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	BPD Sulselbar Mamuju	071.001.000008776-6	Rekening Kasda Prov. Sulbar	49.822.408.550,32	92.143.299.793,72
2.	BPD Sulselbar Mamuju	071.001.000010480-6	Pend. Asli Daerah Sulbar	10.383.191.788,01	9.338.453.984,23
3.	BPD Sulselbar Mamuju	071-001-000100103-2	Dana BOS Prov. Sulbar	542.018.000,00	536.518.000,00
	<b>Jumlah</b>			<b>60.747.618.338,33</b>	Error! Reference source not found.

Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5.

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>38.367.794,89</b>	<b>961.851.446,89</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas di SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 senilai Rp38.367.794,89 atau turun senilai 96,01% dibanding saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp961.851.446,89, dengan rincian ditunjukkan dalam Tabel 51.

**Tabel 51. Rincian Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Sisa Dana DAK Swakelola	19.872.307,89	19.872.307,89
	Rekening yang tidak digunakan	18.031.816,00	0,00
	Dana PFK DAK	0,00	687.882.801,98
2.	Dinas Pencatatan Sipil		
	Sisa UP	0,00	130.982.160,00
	Utang PFK	0,00	26.005.611,00
3.	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Sisa UP	0,00	93.280.539,00
	Utang PFK	0,00	159.068,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Utang PFK	0,00	914.275,02
5.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM		
	Utang PFK	0,00	1.126.126,00
6.	Dinas Transmigrasi		
	Utang PFK	0,00	1.132.072,00
7.	RSUD Provinsi Sulawesi Barat		
	Utang PFK	0,00	496.486,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		
	Rekening yang tidak digunakan	463.671,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>38.367.794,89</b>	<b>961.851.446,89</b>

Adapun rincian penjelasan sisa dana DAK swakelola dan rincian rekening yang tidak digunakan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 dan 7.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.1.1.3. Kas Dana Kapitasi Pada FKTP</b>	<b>73.538.118,00</b>	<b>121.425.084,00</b>

Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo kas di Bendahara JKN pada Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Poliklinik Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 senilai Rp73.538.118,00 dan terjadi penurunan senilai Rp47.886.966,00 atau 39,44% dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp121.425.084,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.1.1.4. Kas di Bendahara BOS</b>	<b>34.090,00</b>	Error! Reference source not found.

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah di Bendahara Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 senilai Rp34.090,00 atau turun senilai Rp59.497.624,00 atau 99,94% dibanding saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp59.530.974,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran BOS ditunjukkan pada Tabel 52.

**Tabel 52. Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Sisa Kas BOS	34.090,00	59.530.974,00
	<b>Jumlah</b>	<b>34.090,00</b>	Error! Reference source not found.

Rincian sisa Kas BOS dapat dilihat pada Lampiran 8.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.1.1.5. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD</b>	<b>3.246.331.353,00</b>	<b>14.439.677.645,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD merupakan saldo kas di Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Barat yang sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak Tahun 2020. Saldo kas Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 senilai Rp3.246.331.353,00 atau turun senilai Rp11.193.346.292,00 atau 77,52 % dibanding saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp14.439.677.645,00. Saldo Kas di

Bendahara Pengeluaran BLUD senilai Rp3.246.331.353,00 terdiri dari terdiri dari saldo bank senilai Rp3.086.034.274,00 dan saldo kas tunai senilai Rp160.297.079,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.1.1.6. Kas Lainnya</b>	<b>3.889.846,00</b>	<b>2.806.779.137,80</b>

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp3.889.846,00 atau mengalami penurunan sebesar 99,86%, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp2.806.779.137,80. Penyebab terjadinya penurunan kas lainnya karena adanya reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya sesuai Buletin Teknis Nomor 14 berupa penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Jaminan Kesungguhan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP).

Saldo Kas lainnya merupakan sisa pajak yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2023, dengan rincian ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 53 Rincian Kas Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	SKPD	Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas ESDM	Jaminan Reklamasi dan Pascatambang	0,00	1.251.008.469,60
2.	Dinas PM dan PTSP	Jaminan Kesungguhan	0,00	1.555.770.668,20
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DAK Swakelola (Utang PFK)	3.889.846,00	0,00
<b>Jumlah</b>			<b>3.889.846,00</b>	<b>2.806.779.137,80</b>

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.1.1.7. Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>268.205.175,71</b>	<b>4.351.240.650,83</b>

Beban Dibayar Dimuka adalah biaya-biaya yang sudah dilakukan perjanjian kerja sama dan melewati batas akhir tahun anggaran (*cut off*) sehingga diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 senilai Rp268.205.175,71 atau mengalami penurunan sebesar 93,84%, dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp4.351.240.650,83. Secara rinci Beban Dibayar Dimuka dijelaskan dalam Tabel 54.

**Tabel 54. Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	SKPD	Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Inspektorat Daerah	Asuransi Kendaraan	0,00	15.709.358,04
2.	B P K P D	Sewa Rumah, Gudang/Kantor	85.897.753,45	87.854.838,71
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	DAK Swakelola SMK	0,00	4.247.676.454,08
4	Dinas ESDM	Sewa Kendaraan	182.307.422,26	0,00

No	SKPD	Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Jumlah		268.205.175,71	Error! Reference source not found.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.1.1.8. Piutang Lainnya</b>	<b>6.614.077.453,00</b>	<b>1.873.372.869,96</b>

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp6.614.077.453,00. Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp1.873.372.869,96 atau terjadi peningkatan senilai Rp4.740.704.583,04 atau 253,06%. Rincian Piutang Lainnya ditunjukkan dalam Tabel 55.

**Tabel 55. Rincian Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	SKPD	Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	Uang Muka	1.766.255.800,00	1.766.255.800,00
2.	RSUD BLUD	Piutang Pendapatan BLUD	4.847.821.653,00	106.643.660,00
3	BPKPD	Remunerasi <i>Treasury Deposit Facility</i> Transfer ke Daerah	0.00	473.409,96
	Jumlah		<b>6.614.077.453,00</b>	Error! Reference source not found.

Saldo Piutang Lainnya pada Dinas PUPR tersebut merupakan sisa uang muka atas pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung-Urekang Kabupaten Majene, dengan Nomor Perjanjian 602/821/DPU.PR/BM/IV/2018, tanggal 10 April 2018, atas nama PT SPA, dengan nilai perjanjian senilai Rp8.831.279.000,00. Pada tanggal 5 Juni 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) telah mencairkan uang muka senilai 20%, dengan nilai Rp1.766.255.800,00 dengan SP2D Nomor 01137/SP2D-LS/VI/2018. Namun demikian PT SPA tidak dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud sehingga pada tanggal 3 September 2018 telah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Dinas PUPR sesuai dengan surat Nomor 1800-000.001/1656/IX/2018. Atas kejadian tersebut pihak penyedia diwajibkan untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima ke Kas Daerah karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan sampai selesai. Sampai dengan 31 Desember 2023, PT SPA belum melakukan penyetoran ke Kas Daerah dan masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Mamuju.

Adapun rincian penjelasan terkait dengan piutang jasa medik pada RSUD BLUD senilai Rp4.847.821.653,00 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 9.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang Lainnya</b>	<b>(1.766.255.800,00)</b>	<b>0,00</b>

Saldo Penyisihan Piutang terhadap uang muka pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak bisa tertagih per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.766.255.800,00.

**Tabel 56. Aging Schedule Penyisihan Piutang Uang Muka  
Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Jasa**

No.	Umur Tunggakan	Nilai Kontrak (Rp)	% Perkiraan Piutang Diragukan Tak Tertagih	Penyisihan Piutang (Rp)
1.	0 s.d 1 Tahun	1.766.255.800,00	0%	-
2.	> 1 Tahun s/d 3 tahun	1.766.255.800,00	10%	176.625.580
3.	> 3 Tahun s/d 5 tahun	1.766.255.800,00	50%	883.127.900
4.	> 5 Tahun	1.766.255.800,00	100%	1.766.255.800

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.3.1.1.10. Persediaan</b>	<b>94.452.449.369,14</b>	<b>56.824.888.264,83</b>

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 senilai Rp94.452.449.369,14 atau mengalami kenaikan senilai Rp37.627.561.104,31 atau 66,20% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp56.824.888.264,83. Rincian persediaan terdapat pada Tabel 57.

**Tabel 57. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	37.603.431,00	66.714.930,00
2.	Kertas dan Cover	26.668.436,00	3.799.800,00
3.	Benda Pos	130.000,00	140.000,00
4.	Bahan Cetak	670.095.231,00	699.855.462,00
5.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	130.019.100,00	29.053.000,00
6.	Bahan Kimia	1.618.414.412,00	746.743.480,00
7.	Bahan/Bibit Tanaman	354.359.800,00	857.228.050,00
8.	Bahan/ Bibit Ternak/Bibit Ikan	251.385.000,00	239.706.000,00
9.	Bahan Lainnya	381.299.220,00	5.900.000,00
10.	Obat	22.139.427.588,00	25.317.186.660,00
11.	Obat-obatan Lainnya	4.881.334.722,00	9.452.091.916,00
12.	Isi Tabung Gas	5.508.000,00	0,00
13.	Bahan Baku	548.729.192,00	7.784.948.390,00
14.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	62.268.308.037,14	10.570.369.376,83
15.	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-Jaga	1.139.167.200,00	1.051.151.200,00
<b>Total</b>		<b>94.452.449.369,14</b>	<b>56.824.888.264,83</b>

Adapun rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 10.

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang</b>	<b>75.773.207.446,00</b>	<b>70.274.776.128,00</b>



Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 senilai Rp75.773.207.446,00 mengalami peningkatan senilai Rp5.498.431.318,00 atau 7,82% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp70.274.776.128,00 dengan rincian pada Tabel 58.

**Tabel 58. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	1.832.449.250,00	1.832.449.250,00
2.	Penyisihan Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	(1.832.449.250,00)	(1.832.449.250,00)
3.	Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	75.773.207.446,00	70.274.776.128,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>75.773.207.446,00</b>	Error! Reference source not found.

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir</b>	Error! Reference source not found.	Error! Reference source not found.

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara permanen. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merupakan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir. Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Daerah, serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Penjelasan atas mutasi Investasi Non Permanen – Dana Bergulir ditunjukkan pada Tabel 59.

**Tabel 59. Mutasi Investasi Non Permanen - Dana Bergulir per 31 Desember 2023**

No.	SKPD	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.427.575.000,00	0,00	0,00	1.427.575.000,00
2.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	73.525.000,00	0,00	0,00	73.525.000,00
3.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM	331.349.250,00	0,00	0,00	331.349.250,00
<b>Jumlah</b>		Error! Reference source not found.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Error! Reference source not found.

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.3.1.2.2. Cadangan Penyisihan Piutang Dana Bergulir</b>	Error! Reference source not found.	Error! Reference source not found.

Saldo Cadangan Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai piutang dana bergulirnya, yaitu senilai (Rp1.832.449.250,00).

Atas ditetapkannya Kebijakan Akuntansi Nomor 38 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016, maka dilakukan penyesuaian dan perhitungan atas dana bergulir tersebut terhadap nilai yang dapat tertagih dengan kualifikasi lancar, kurang lancar, diragukan tertagih, dan macet. Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa dana bergulir dimaksud sudah macet 100% dan telah dibuatkan dalam cadangan penyisihan piutang dana bergulir.

Dari hasil perhitungan dan pengelompokan dana bergulir tersebut dimana sudah 100% masuk dalam kategori macet, dan telah disisihkan 100%, adapun langkah penanganan untuk dana bergulir yang macet tersebut adalah pada tahun 2017 telah dilakukan sidang oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) terhadap dana bergulir dan disepakati akan segera dilakukan penghapusan dengan melibatkan semua pihak setelah itu akan diajukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat segera dihapuskan.

<b>7.5.3.1.2.3. Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
	<b>75.773.207.446,00</b>	<b>70.274.776.128,00</b>

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berupa Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar, Perumda Sebuku Energi Malaqbi, dan PT Sulawesi Barat Malaqbi. Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp75.773.207.446,00 mengalami peningkatan Rp5.498.431.325,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp70.274.776.128,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 60. Rincian Investasi Permanen – Penyertaan Modal  
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
1.	PT Bank Sulselbar	44.769.000.000,00	44.769.000.000,00
2.	Perumda Sebuku Energi Malaqbi	29.504.207.446,00	24.005.776.128,00
3.	Perumda Sulawesi Barat Malaqbi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>75.773.207.446,00</b>	Error! Reference source not found.

1. Penyertaan Modal kepada PT Bank Sulselbar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Provinsi Sulawesi Barat pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar). Sesuai Perda tersebut ditetapkan nilai penyertaan modal adalah senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pada tahun 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada BPD Sulselbar, yang menetapkan besaran nilai penyertaan modal senilai Rp30.000.000.000,00 untuk jangka waktu 3 tahun.

Total penyertaan modal ke PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2022 tidak mengalami peningkatan terhadap investasi permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat) pada Bank Sulselbar. Terdapat deviden lembar sahamnya (RUPS 02 Desember 2021) per tanggal 2 Agustus 2022 senilai Rp4.769.000.000,00 sehingga nilai tersebut diakui sebagai pendapatan dan dicatat sebagai Pendapatan Hasil Investasi. Total investasi per 31 Desember 2022 senilai Rp44.769.000.000,00 atau sebanyak 44.769 lembar saham, dengan nomor rincian sertifikat ditunjukkan dalam Tabel 61 sebagai berikut.

**Tabel 61. Rincian Nomor Sertifikat Saham Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar Sampai Dengan 31 Desember 2023**

No.	Nomor Sertifikat	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Nilai Total (Rp)
1.	508.123 s/d 510.122	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
2.	555.435 s/d 557.434	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
3.	604.035 s/d 606.034	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
4.	677.771 s/d 679.770	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
5.	798.671 s/d 800.670	2.000	1.000.000,00	2.000.000.000,00
6.	874.671 s/d 882.670	8.000	1.000.000,00	8.000.000.000,00
7.	939.661 s/d 949.660	10.000	1.000.000,00	10.000.000.000,00
8.	1.084.411 – 1.096.410	12.000	1.000.000,00	12.000.000.000,00
9.	1.096.410 s/d 1.101.179	4.769	1.000.000,00	4.769.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>44.769</b>		<b>44.769.000.000,00</b>

Persentase kepemilikan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar per tanggal 31 Desember 2023 senilai 2,03%, sehingga penyajian nilai penyertaan modal menggunakan metode biaya.

2. Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sebuku Energi Malaqbi senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Penyertaan modal tersebut merupakan pemenuhan modal dasar dan modal disetor dalam rangka pendirian Perumda Sebuku Energi Malaqbi untuk memenuhi persyaratan penerimaan penawaran *Participating Interest* 10% (PI) atas Pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh Pengelola pada Wilayah Kerja Blok Sebuku. Penyertaan Modal kepada Perumda Sebuku Energi Malaqbi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Sebuku Energy Malaqbi, dimana ditetapkan nilai penyertaan modal adalah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pada Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyetorkan penyertaan modal kepada Perumda Sebuku Energy Malaqbi senilai Rp2.000.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 03652/SP2D-LS/XI/2019 tanggal 15 November 2019. Persentase kepemilikan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Perumda Sebuku Energi Malaqbi senilai 100%, sehingga penyajian nilai penyertaan modal menggunakan metode ekuitas.

Tahun 2022 Investasi Permanen Penyertaan Modal-Perumda Sebuku Energy Malaqbi sampai per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp24.005.776.128,00. Nilai tersebut berasal dari penambahan saldo awal senilai Rp311.712.790,00 dengan laba Perumda Sebuku Energy Malagbi Tahun 2022 senilai Rp27.415.657.284,00 dikurangi koreksi

awal ekuitas senilai Rp3.721.593.946,00 sesuai hasil Audit Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan hasil laporan Auditor Independen Nomor 00027/2.0890/AU.2/11/1495-2/1/1V/2024 terdapat laporan Perubahan Ekuitas pertanggal 31 Desember 2023 senilai Rp29.504.207.446,00. Nilai tersebut terdiri dari saldo awal Rp24.005.776.121,00 ditambah laba periode berjalan senilai Rp7.505.795.028,00 di kurang Rp2.007.363.703,00

3. Pada Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyetorkan penyertaan modal kepada Perumda Sulawesi Barat Malaqbi senilai Rp1.500.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 00818/SP2D-LS/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2021 ditetapkan bahwa kepengurusan PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) di demisioner. Kemudian atas hasil RUPS tersebut Gubernur Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemegang saham mengeluarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Nomor 2100.01.01.01/P.BUMD/01/1/2021 tentang Pemberhentian Komisaris PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) pada tanggal 28 Desember 2021, serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Nomor 2100.01.01.01/P.BUMD/02/1/2021 tentang Pemberhentian Direktur Utama dan Direktur Anak-Anak Perusahaan PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) pada tanggal 28 Desember 2021.

Pada tanggal 18 Agustus 2022 dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menetapkan dan mengangkat Komisaris PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) masa jabatan 2022-2026, serta mengangkat Direksi PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) masa jabatan 2022-2027.

Hasil RUPS tersebut kemudian dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Nomor 07 Tanggal 30 September 2022 (Notaris Khadijah Candra Mustafa, SH.).

Pada Tahun 2022 PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) telah menyajikan Laporan Keuangan periode 31 September – 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Masnawaty Sangkala, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CPA.” dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam Laporan Keuangan tersebut menyajikan nilai modal sebesar Rp0,00 dan rugi bersih Tahun 2022 senilai Rp3.996.066.441,00. Penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp1.500.000.000,00 tidak tercatat dalam Laporan Keuangan tersebut.

Namun demikian pada Tahun 2023 PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) tidak menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu belum terdapat laporan atau pernyataan dari pihak Perseroda (manajemen yang baru) terkait penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp1.500.000.000,00.

Terkait pengelolaan dana investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp1.500.000.000,00 oleh manajemen yang lama, pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat telah menyerahkan berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk selanjutnya menunggu putusan persidangan yang berkekuatan hukum tetap.

**7.5.3.1.3. Aset Tetap**

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya.	<b>3.098.371.703.077,19</b>	<b>2.986.112.145.870,31</b>

Aset tetap antara lain terdiri dari:

- Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
- Peralatan dan Mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, alat angkutan, alat kantor dan rumah tangga, alat bengkel/studio/pertanian/kedokteran/laboratorium, mesin dan peralatan persenjataan, dan lain-lain sejenisnya;
- Gedung dan Bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi dan instalasi;
- Aset Tetap Lainnya, meliputi buku perpustakaan, barang bercorak seni dan budaya, serta hewan ternak dan tanaman; dan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 setelah penyusutan adalah senilai Rp3.098.371.703.077,19 terdiri dari:

**Tabel 62. Rincian Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Tanah	515.570.403.443,03	Error! Reference source not found.
2.	Peralatan dan Mesin	1.155.718.960.875,14	Error! Reference source not found.
3.	Gedung dan Bangunan	1.748.556.044.690,84	Error! Reference source not found.
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.834.548.109.237,02	Error! Reference source not found.
5.	Aset Tetap Lainnya	31.190.162.064,10	Error! Reference source not found.
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	41.160.498.055,98	Error! Reference source not found.
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.228.372.475.288,92)	Error! Reference source not found.
	<b>Jumlah</b>	<b>3.098.371.703.077,19</b>	<b>2.986.112.145.870,31</b>

Adapun rincian Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran 11.

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>7.5.3.1.3.1. Tanah</b>	<b>515.570.403.443,03</b>	<b>485.627.108.776,03</b>

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Saldo tanah per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp515.570.403.443,03. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp29.943.294.667,00 atau 6,17% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp485.627.108.776,03.

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>485.627.108.776,03</b>
<b>Penambahan</b>		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	18.719.773.147,00
2. Mutasi Masuk	Rp	74.948.787,00
3. Aset Baru Tercatat	Rp	0,00
4. Utang	Rp	21.979.813.373,00
5. Hibah	Rp	8.627.213.000,00
6. Reklasifikasi KIB	Rp	696.618.536,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>50.098.366.843,00</b>
<b>Pengurangan</b>		
1. Mutasi Keluar	Rp	74.948.787,00
2. Hibah	Rp	18.840.775.516,00
3. Reklasifikasi KIB	Rp	1.239.347.873,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>20.155.072.176,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>515.570.403.443,03</b>

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

1. Penambahan senilai Rp50.098.366.843,00 yang terdiri dari:
  - a) Penambahan dari realisasi Belanja Modal Tahun 2023 senilai Rp18.719.773.147,00 dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b) Penambahan mutasi masuk ke Biro Tata Pemerintahan dan Kesra senilai Rp74.948.787,00 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c) Penambahan dari koreksi Utang Belanja Modal oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp21.979.813.373,00 yang peruntukan lokasinya terdiri dari:
    - 1) Bandara Tamba Padang senilai Rp4.343.524.820,00;
    - 2) Kawasan Perkantoran senilai Rp6.325.500.000,00;
    - 3) UPT BKN senilai Rp648.135.000,00;
    - 4) Arteri Lanal senilai Rp5.104.400.000,00;
    - 5) Sport Centre Ulumanda senilai Rp539.653.900,00;
    - 6) Rumah Sakit Jiwa senilai Rp556.712.000,00;
    - 7) Balai Latihan Kerja senilai Rp565.263.956,00;
    - 8) Tanah untuk Pekuburan Madatte Polewali Mandar senilai Rp339.306.000,00; dan
    - 9) Markas Kepolisian Resor Kota Mamuju senilai Rp3.557.317.697,00;
  - d) Penambahan dari hibah tanah untuk Jalan Nasional dari Kabupaten Majene senilai Rp8.627.213.000,00;
  - e) Reklasifikasi KIB ke Tanah senilai Rp696.618.536,00 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap – Tanah senilai Rp421.862.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap – Tanah senilai Rp74.948.787,00 pada Badan Penanggulangan Bencana; dan
  - 3) Reklasifikasi dari Aset Tetap - Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap – Tanah senilai Rp199.807.749,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa pematangan lahan pabrik es.
2. Pengurangan senilai Rp20.155.072.176,00 terdiri dari:
- a) Mutasi keluar dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat senilai Rp74.948.787,00;
  - b) Hibah keluar senilai Rp18.840.775.516,00 terdiri dari:
    - 1) Mutasi Hibah Tanah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke TNI Angkatan Laut senilai Rp10.100.300.000,00; dan
    - 2) Mutasi Hibah Tanah Biro Tata Pemerintahan ke TNI Angkatan Laut senilai Rp8.740.475.516,00.
  - c) Reklasifikasi KIB senilai Rp1.239.347.873,00 yang terdiri dari:
    - 1) Tanah ke Konstruksi Dalam Pengerjaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah berupa Belanja Ganti Rugi Bangunan di lokasi Kawasan Bandara Tampa Padang pada Dinas Perhubungan Daerah senilai Rp54.774.554,00;
    - 2) Tanah ke Aset Lainnya senilai Rp760.349.995,00 berupa Hibah ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat dikarenakan belum adanya SK Penghapusan; dan
    - 3) Tanah ke Aset Lainnya senilai Rp424.223.324,00 pada Biro Tata Pemerintahan dan Kesra dikarenakan belum adanya SK Penghapusan.

Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/278/SULBAR/VII/2022 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi di Sulawesi Barat. Sesuai SK tersebut terdapat 28 ruas jalan yang merupakan jalan Provinsi. Dari 28 ruas jalan tersebut, baru enam ruas jalan yang telah dilakukan penilaian tanah di bawah jalan, sedangkan 22 ruas jalan lainnya belum dilakukan penilaian tanah di bawah jalannya. Ruas jalan provinsi yang telah dilakukan penilaian tanah di bawah jalan ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 63. Rincian Tanah di Bawah Jalan yang Telah Dinilai**

No.	Nama Ruas	KIB A – Tanah (m <sup>2</sup> )
1.	Ruas Jalan Batuisi - Batas Toraja	491.040
2.	Lampa (Mapilli) - Matangnga	502.480
3.	Matangnga - Keppe	342.100
4.	Salutambung – Urekang	401.060
5.	Urekang - Mambi	204.380
6.	Tikke - Bts Sulteng	104.500
	<b>Jumlah</b>	<b>2.045.560</b>

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>7.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.155.718.960.875,14</b>	<b>997.214.943.453,97</b>

Peralatan dan mesin dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp1.155.718.960.875,14 mengalami kenaikan senilai Rp158.504.017.421,17 atau 15,89% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp997.214.943.453,97. Rincian mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>997.214.943.453,97</b>
<b>PENAMBAHAN</b>		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	156.584.512.680,00
2. Mutasi Masuk SKPD	Rp	6.029.356.499,75
3. Utang	Rp	17.275.000,00
4. Hibah	Rp	3.477.960.437,00
5. BOS Afiriasi / Kinerja 2023	Rp	517.532.850,00
6. BOS Reguler 2023	Rp	7.145.828.977,00
7. Banpem 2022	Rp	1.658.295.050,00
8. Banpem 2023	Rp	3.043.308.000,00
9. Reklasifikasi KIB	Rp	1.427.717.843,00
10. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	Rp	76.087.200,00
11. Koreksi Saldo	Rp	1.008.298.975,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>180.986.173.511,75</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
1. Mutasi Keluar SKPD	Rp	6.029.356.499,75
2. Penghapusan Karena Penjualan	Rp	432.461.093,00
3. Penghapusan Dobel Catat	Rp	128.000.000,00
4. Reklasifikasi KIB	Rp	4.478.678.901,00
5. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	588.988.716,00
6. Ubah kondisi	Rp	6.661.401.228,80
7. Ekstrakomptabel	Rp	1.294.649.821,00
8. Koreksi Saldo	Rp	2.868.619.831,00
9. Pembulatan	Rp	0,03
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>22.482.156.090,58</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>1.155.718.960.875,14</b>

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin senilai Rp1.155.718.960.875,14 bersumber dari penambahan saldo awal 2023 senilai Rp997.214.943.453,97 ditambah penambahan realisasi peralatan dan mesin Tahun 2023 senilai Rp180.986.173.511,75 dikurangi pengurangan peralatan dan mesin Tahun 2023 senilai Rp22.482.156.090,58. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut:

1. Penambahan Peralatan dan Mesin senilai Rp180.986.173.511,75 terdiri dari:
  - a. Penambahan dari realisasi Belanja Modal Tahun 2023 senilai Rp156.584.512.680,00 dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 64. Rincian Penambahan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin dari Realisasi Belanja  
Modal Peralatan dan Mesin TA 2023**

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD	1.913.381.600,00
2	Biro Tata Pemerintahan Dan Kesra	56.616.964,00
3	Biro Hukum	85.064.550,00
4	Biro Perekonomian & Pemb	128.859.360,00
5	Biro Ortala	10.633.800,00
6	Biro Umum,Perl dan Umum	4.557.893.080,00
7	Dinas Pekerjaan Umum	317.968.000,00
8	Dinas Perumahan & Kaw. Pem	129.048.700,00
9	Dinas Perhubungan	629.307.390,00
10	Dinas Kesehatan	1.535.161.381,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah	90.801.892.591,00
12	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	28.439.092.400,00
13	Dinas Sosial	518.551.206,00
14	Badan Penanggulangan Bencana	1.103.509.900,00
15	Dinas Transmigrasi	423.181.245,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.345.984.930,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan	23.677.000,00
18	Dinas Tenaga Kerja	499.734.080,00
19	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultural	4.338.795.410,00
20	Dinas perkebunan daerah	344.813.370,00
21	Dinas Kehutanan	715.313.540,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.367.778.145,00
23	Dinas Ketahanan Pangan	122.692.500,00
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi	13.549.000,00
25	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	119.775.600,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	670.971.500,00
27	Inspektorat daerah	583.562.654,00
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	198.165.000,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	298.569.880,00
30	Dinas Lingkungan Hidup	384.559.040,00
31	Dinas Kepemudaan dan olahraga	255.369.100,00
32	Dinas Pariwisata	312.542.590,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61.254.000,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	118.956.480,00
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.703.150,00
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	43.676.100,00
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	665.687.200,00
38	Badan Penghubung Provinsi	832.289.250,00
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.025.000,00
40	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1.515.705.994,00
41	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	54.200.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>156.584.512.680,00</b>

- b. Penambahan dari mutasi masuk SKPD senilai Rp6.029.356.499,75 terdiri dari:
  - 1) Mutasi masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.257.226.100,00 yang bersumber dari Dinas Kesehatan berupa mobil ambulans;
  - 2) Mutasi masuk ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM senilai Rp127.500.000,00 yang bersumber dari Biro Perekonomian dan Pembangunan;
  - 3) Mutasi masuk ke Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp15.310.400,00 dari Badan Kepegawaian Daerah;
  - 4) Mutasi masuk ke Badan Penghubung senilai Rp4.566.289.999,75 dari Biro Umum dan Perlengkapan; dan
  - 5) Mutasi masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp63.030.000,00 dari Biro Umum dan Perlengkapan;
- c. Penambahan Utang pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp17.275.000,00;
- d. Penambahan Hibah dari Pemerintah Pusat senilai Rp3.477.960.437,00 terdiri dari:
  - 1) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp294.288.000,00; dan
  - 2) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp3.183.672.437,00;
- e. Penambahan BOS Afirmasi / Kinerja Tahun 2023 senilai Rp517.532.850,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Penambahan BOS Reguler Tahun 2023 senilai Rp7.145.828.977,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Penambahan Bantuan Pemerintah (Banpem) Tahun 2022 senilai Rp1.658.295.050,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Penambahan Bantuan Pemerintah (Banpem) Tahun 2023 senilai Rp3.043.308.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Penambahan reklasifikasi KIB ke peralatan mesin dari aset tetap lainnya senilai Rp1.427.717.843,00 terdiri dari:
  - 1) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan pada Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp30.500.000,00;
  - 2) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) senilai Rp43.672.350,00;
  - 3) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp419.087.933,00 terdiri dari:
    - a) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp64.519.533,00 berupa sumur pompa air dan tandon;
    - b) Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.589.000,00 berupa SPPD;
    - c) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp99.944.400,00; dan
    - d) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp253.035.000,00;
  - 4) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp188.839.796;
  - 5) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM senilai Rp99.739.357,00;
  - 6) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp217.642.450,00;
  - 7) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan berupa pengadaan interior pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp196.740.350,00;

- 8) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp219.174.607,00; dan
- 9) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik senilai Rp12.321.000,00.
- j. Penambahan reklasifikasi dari Barang dan Jasa ke Peralatan dan Mesin senilai Rp76.087.200,00 ke Dinas Kelautan dan Perikanan berupa pengadaan bahan *service cold storage*;
- k. Penambahan Koreksi Saldo senilai Rp1.008.298.975,00 terdiri dari:
  - 1) Koreksi penambahan aset pada Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp100.294.000,00;
  - 2) Koreksi kesalahan penghapusan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp190.000.000,00; dan
  - 3) Koreksi penambahan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp718.004.975,00.
2. Pengurangan dari Peralatan dan Mesin senilai Rp22.482.156.090,58 terdiri dari;
  - a. Pengurangan dari mutasi keluar SKPD senilai Rp6.029.356.499,75 terdiri dari;
    - 1) Peralatan dan Mesin dari Biro Perekonomian dan Pembangunan senilai Rp127.500.000,00 dimutasikan ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
    - 2) Peralatan dan Mesin dari Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp4.629.319.999,75 dimutasikan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa senilai Rp63.030.000,00 dan dimutasikan ke Badan Penghubung senilai Rp4.566.289.999,75;
    - 3) Peralatan dan Mesin dari Dinas Kesehatan senilai Rp1.257.226.100,00 dimutasikan ke Rumah Sakit Umum Daerah berupa mobil ambulans; dan
    - 4) Peralatan Mesin dari Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp15.310.400,00 yang dimutasikan ke Dinas Lingkungan Hidup berupa komputer unit;
  - b. Pengurangan mutasi dari penghapusan karena adanya penjualan senilai Rp432.461.093,00 terdiri dari Dinas Kesehatan senilai Rp418.286.093,00 dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp14.175.000,00;
  - c. Pengurangan mutasi dari penghapusan pencatatan ganda senilai Rp128.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - d. Pengurangan Reklasifikasi KIB dari Peralatan Mesin senilai Rp4.478.678.901,00 terdiri dari beberapa SKPD antara lain;
    - 1) Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp1.737.460.000,00 yang direklas ke Aset Lainnya berupa penghapusan karena penjualan yang masih menunggu SK Penghapusan;
    - 2) Sekretariat Daerah - Gubernur senilai Rp1.210.350.000,00 yang direklas ke Aset Lainnya berupa penghapusan karena penjualan yang masih menunggu SK Penghapusan;
    - 3) Biro Organisasi dan Tatalaksana senilai Rp80.868.901,00 dengan rincian ubah kondisi ke Rusak Berat senilai Rp81.468.901,00 dikurangi Ekstrakomtabel dari ubah kondisi senilai Rp600.000,00;
    - 4) Dinas Perkebunan Daerah senilai Rp50.000.000,00 yang direklas ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa sumur bor; dan
    - 5) Dinas Kelautan dan Perikanan yang direklas ke Gedung dan Bangunan dari Peralatan dan Mesin senilai Rp1.400.000.000,00.

- e. Pengurangan reklasifikasi ke Barang dan Jasa / Pemeliharaan dari Peralatan Mesin senilai Rp588.988.716,00 terdiri dari beberapa SKPD antara lain:
  - 1) Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) senilai Rp27.911.371,00;
  - 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp7.200.000,00 berupa kabel UTP sebanyak dua unit;
  - 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB senilai Rp8.982.000,00 berupa pengadaan sumur bor;
  - 4) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Peternakan senilai Rp10.898.810,00 berupa tender alat laboratorium;
  - 5) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp525.866.535,00 dengan rincian berupa:
    - a) Belanja keranjang senilai Rp115.995.000,00;
    - b) Belanja Pakaian Dinas senilai Rp13.500.000,00;
    - c) Belanja Listrik Sumare Angsuran I senilai Rp80.348.000,00;
    - d) Belanja Penerangan Listrik sementara di sumare senilai Rp23.020.123,00;
    - e) Belanja Listrik PP Banggae senilai Rp2.865.412,00;
    - f) Belanja Listrik PP Banggae senilai Rp80.348.000,00;
    - g) Reklasifikasi peralatan dan mesin ke barang dan jasa senilai Rp4.440.000,00;
    - h) Pembayaran Pemasangan Listrik Pabrik Es Majene senilai Rp102.675.000,00; dan
    - i) Pembayaran Pemasangan Listrik Mamuju senilai Rp102.675.000,00;
  - 6) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp4.230.000,00 berupa honor PPK;
  - 7) Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp300.000,00 berupa peralatan permainan; dan
  - 8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu senilai Rp3.600.000,00 berupa perabot kantor;
- f. Pengurangan dari Peralatan Mesin dengan adanya ubah kondisi senilai Rp6.661.401.228,80 terdiri dari beberapa SKPD antara lain:
  - 1) Sekretariat DPRD senilai Rp3.122.744.760,42;
  - 2) Dinas Energi Sumber Daya Mineral senilai Rp617.296.518,00;
  - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp908.318.057,15 dengan rincian nilai ubah kondisi senilai Rp929.709.697,15 dikurangi nilai ekstrakomtabel ubah kondisi senilai Rp21.391.640,00;
  - 4) Inspektorat Daerah senilai Rp442.132.095,46;
  - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp158.341.161,77 dengan rincian ubah kondisi senilai Rp159.141.161,77 dikurangi ekstrakomtabel ubah kondisi senilai Rp800.000,00;
  - 6) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp65.495.057,00;
  - 7) Badan kepegawaian Daerah senilai Rp296.354.235,00 dengan rincian ubah kondisi senilai Rp300.654.235,00 dikurangi ekstrakomtabel ubah kondisi senilai Rp4.300.000,00;
  - 8) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp208.781.500,00; dan
  - 9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp841.937.844,00.
- g. Pengurangan dari Peralatan Mesin dengan adanya Ekstra senilai Rp1.294.649.821,00 terdiri dari beberapa SKPD antara lain:
  - 1) Biro Perekonomian dan Pembangunan senilai Rp8.220.660,00;

- 2) Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) senilai Rp7.770.959,00;
  - 3) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Rp1.184.022.212,00 yang terdiri dari Ekstrakomptabel ke Beban Pemeliharaan senilai Rp1.165.553.212,00; ekstrakomptabel Bantuan Pemerintah Tahun 2023 senilai Rp17.069.000,00; dan pengurangan masa manfaat senilai Rp1.400.000,00;
  - 4) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan senilai Rp40.050.300,00;
  - 5) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp29.703.800,00;
  - 6) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp777.000,00;
  - 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp1.740.000,00;
  - 8) Dinas Pariwisata senilai Rp775.890,00;
  - 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp3.634.000,00; dan
  - 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp17.955.000,00.
- h. Adanya koreksi saldo Peralatan dan Mesin senilai Rp2.868.619.831,00 terdiri dari;
- 1) Koreksi kurang senilai Rp449.859,00 pada Dinas Perkebunan Daerah;
  - 2) Koreksi pengurangan volume senilai Rp2.693.893.180,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 3) Koreksi kesalahan jenis aset senilai Rp24.493.392,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - 4) Koreksi pengurangan volume senilai Rp149.783.400,00 pada Biro Umum.
- i. Pengurangan pembulatan senilai Rp0,03 hal ini disebabkan karena di Aplikasi SIPD hanya membaca dua angka dibelakang koma sedangkan di Aplikasi Simda BMD membaca lebih dari dua angka di belakang koma.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.748.556.044.690,84</b>	<b>1.615.326.861.288,88</b>

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.748.556.044.690,84. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp133.229.183.401,96 atau 8,25% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp1.615.326.861.288,88. Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2023</b>		<b>Rp</b>	<b>1.615.326.861.288,88</b>
<b>PENAMBAHAN</b>			
1.	Realisasi Belanja Modal	Rp	123.131.105.879,00
2.	Mutasi SKPD	Rp	3.540.886.454,00
3.	Utang	Rp	377.186.844,00
4.	Hibah	Rp	6.571.560.667,00
5.	Beban Dibayar Dimuka TA 2022	Rp	4.247.676.453,08
6.	Banpem 2023	Rp	873.099.000,00
8.	Banpem 2022	Rp	351.100.000,00
9.	Reklasifikasi KIB	Rp	40.955.609.329,93
10.	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	447.814.553,00
11.	Pembulatan	Rp	0,94

<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>180.496.039.180,95</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
1. Mutasi SKPD	Rp	3.540.886.454,00
2. Hibah	Rp	7.431.246.591,00
3. Reklasifikasi KIB	Rp	32.154.756.615,60
4. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	1.474.986.704,00
5. Ubah Kondisi	Rp	1.710.230.224,00
6. Koreksi Saldo	Rp	954.749.190,39
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>47.266.855.778,99</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>1.748.556.044.690,84</b>

Penjelasan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.748.556.044.690,84 bersumber dari penambahan saldo awal 2023 senilai Rp1.615.326.861.288,88 ditambah penambahan Realisasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp180.496.039.180,95 dikurangi pengurangan Gedung dan Bangunan senilai Rp47.266.855.778,99. Adapun rincian penjelasannya sebagai berikut:

1. Penambahan yang berasal dari Gedung dan Bangunan senilai Rp180.496.039.180,95 antara lain:
  - a. Penambahan realisasi Aset Tetap Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp123.131.105.879,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 65. Rincian Penambahan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023**

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	25.000.000,00
2.	Biro Umum dan Perlengkapan	186.608.652,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah	7.617.597.499,00
4.	Dinas Kesehatan Daerah	171.758.753,00
5.	Rumah Sakit Umum Daerah	19.342.839.185,00
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	75.024.898.818,00
7.	Dinas Sosial Daerah	122.176.790,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana	74.948.787,00
9.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah	8.878.401.365,00
10.	Dinas Perkebunan	59.963.624,00
11.	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah	4.289.059.849,00
12.	Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi	528.533.357,00
13.	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	712.728.015,00
14.	Inspektorat Daerah	111.108.792,00
15.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	604.486.741,00
16.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah	395.685.041,00
17.	Dinas Pariwisata Daerah	20.734.800,00
18.	Badan Penghubung Daerah	4.952.254.811,00
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	12.321.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>123.131.105.879,00</b>

- b. Penambahan Mutasi SKPD pada Gedung dan Bangunan senilai Rp3.540.886.454,00 terdiri dari:
  - 1) Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) senilai Rp1.007.721.896,00 dengan rincian mutasi Gedung dan Bangunan dari Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) senilai Rp743.171.896,00 ditambah mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp264.550.000,00;
  - 2) Dimutasikan ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan senilai Rp564.688.386,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 3) Dimutasikan ke UPTD P2RB Polewali Mandar - Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp681.764.520,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 4) Dimutasikan ke Inspektorat senilai Rp118.200.015,00 berupa rehab gedung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  - 5) Dimutasikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.168.511.637,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Penambahan Utang pada Gedung dan Bangunan SKPD senilai Rp377.186.844,00 terdiri dari:
  - 1) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp287.499.565,00 yang berasal dari Utang Gedung BLUD;
  - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp38.981.750,00 yang berasal dari Utang Gedung Tahun 2023; dan
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp50.705.529,00 yang berasal dari Utang Gedung di Tahun 2022 yang baru diakui di Tahun 2023;
- d. Penambahan Hibah ke Gedung dan Bangunan senilai Rp6.571.560.667,00 terdiri dari:
  - 1) Dinas Kelautan dan Perikanan dengan rincian Bangunan Lainnya senilai Rp68.522.000,00 ditambah Bangunan Gedung Instalasi lainnya senilai Rp127.371.000,00 ditambah Bangunan TPI Palipi senilai Rp751.446.104,00;
  - 2) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1.823.711.563,00 berupa hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup; dan
  - 3) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM senilai Rp3.800.510.000,00 berupa hibah Gedung Plut dari pemerintah pusat.
- e. Penambahan mutasi masuk akibat adanya beban dibayar dimuka DAK Swakelola SMK Tahun 2022 atas penyelesaian pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana ke Gedung dan Bangunan senilai Rp4.247.676.453,08 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- f. Penambahan Bantuan Pemerintah (Banpem) Tahun 2023 ke Gedung dan Bangunan senilai Rp873.099.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- g. Penambahan Bantuan Pemerintah (Banpem) Tahun 2022 ke Gedung dan Bangunan senilai Rp351.100.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- h. Penambahan reklasifikasi KIB ke Gedung dan Bangunan senilai Rp40.955.609.329,93 terdiri dari:
  - 1) Adanya penambahan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan senilai Rp850.168.561,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- 2) Adanya penambahan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan senilai Rp743.171.896,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD);
- 3) Adanya penambahan reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan senilai Rp23.930.843.775,93 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Adanya penambahan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan senilai Rp1.400.000.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Gedung pabrik es;
- 5) Adanya penambahan reklasifikasi KIB ke Gedung dan Bangunan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp14.031.425.097,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- i. Penambahan reklasifikasi KIB ke Gedung dan Bangunan dari Barang dan Jasa senilai Rp447.814.553,00 terdiri dari:
  - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp256.321.793,00;
  - 2) Badan Penghubung Provinsi senilai Rp191.492.760,00 berupa Rehab Gedung Mess Badan Penghubung Jakarta.
- j. Penambahan pembulatan senilai Rp0,94 hal ini disebabkan karena di Aplikasi SIPD hanya membaca dua angka dibelakang koma sedangkan di Aplikasi Simda BMD membaca lebih dari dua angka dibelakang koma.
2. Pengurangan yang berasal mutasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp47.266.855.778,99 terdiri dari:
  - a. Pengurangan akibat mutasi keluar dari Gedung dan Bangunan senilai Rp3.540.886.454,00 yang dimutasikan:
    - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.797.714.558,00 terdiri dari:
      - a) Mutasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp681.764.520,00;
      - b) Mutasi ke Inspektorat senilai Rp118.200.015,00;
      - c) Mutasi ke Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp264.550.000,00;
      - d) Mutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.168.511.637,00; dan
      - e) Mutasi ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan senilai Rp564.688.386,00.
    - 2) Rumah sakit Umum Daerah (BLUD) senilai Rp743.171.896,00.
  - b. Pengurangan akibat adanya Hibah keluar dari Gedung dan Bangunan senilai Rp7.431.246.591,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dihibahkan ke Kabupaten Mamuju;
  - c. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp32.154.756.615,60 bersumber dari:
    - 1) Reklasifikasi dari Gedung dan bangunan senilai Rp49.647.500,00 pada Biro Umum dan Perlengkapan yang direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp19.147.500,00 dan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp30.500.000,00;
    - 2) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp19.028.220.119,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
    - 3) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp5.642.879.066,60 yang direklasifikasikan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp327.125.214,00; direklasifikasikan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai



- Rp423.746.801,00; direklasifikasikan ke Aset Lainnya senilai Rp4.892.007.051,60;
- 4) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp3.159.082.073,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp311.711.086,00; direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin senilai Rp71.583.000,00; direklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jembatan senilai Rp5.992.113,00; direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin senilai Rp181.452.000,00; direklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp26.250.000,00; direklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jembatan senilai Rp2.011.020,00; dan direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp2.560.082.854,00;
  - 5) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap - Tanah ke Biro Tata Pemerintahan senilai Rp74.948.787,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 6) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.073.380.624,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
  - 7) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp59.963.624,00 pada Dinas Perkebunan Daerah;
  - 8) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp2.289.888.318,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang direklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.864.237.288,00 ditambah Rp37.003.485,00, ke Aset Tetap - Tanah senilai Rp199.807.749,00 berupa pematangan lahan dan ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin senilai Rp188.839.796,00 berupa perencanaan dan pengawasan pabrik es dan *cold storage*;
  - 9) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp99.739.357,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin;
  - 10) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp217.642.450,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin;
  - 11) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp207.989.090,00 terdiri dari reklas ke Peralatan dan Mesin berupa Interior senilai Rp196.740.350,00 ditambah reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp11.248.740,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - 12) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp19.880.000,00 pada Dinas Pariwisata yang direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan;
  - 13) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp219.174.607,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
  - 14) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan yang direklasifikasikan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp12.321.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan Statistik.
- d. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp1.474.986.704,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa senilai Rp9.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 2) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa berupa perjalanan dinas dan kegiatan senilai Rp1.448.847.554,00 dengan rincian

direklasifikasikan ke Barang dan Jasa senilai Rp1.211.376.628,00 ditambah reklas ke Persediaan senilai Rp237.470.926,00 berupa sekolah swasta yang belum diserahkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- 3) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa berupa honor PPK Pagar dan PPK renovasi Laboratorium tender renovasi laboratorium ditambah tender sarana pengairan senilai Rp2.799.150,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
  - 4) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa berupa honor PPK senilai Rp8.460.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
  - 5) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Barang dan Jasa senilai Rp5.880.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- e. Pengurangan akibat adanya ubah kondisi senilai Rp1.710.230.224,00 terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.680.230.224,00 dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp30.000.000,00;
- f. Pengurangan karena adanya koreksi saldo kekurangan volume Gedung dan Bangunan senilai Rp954.749.190,39 terdiri dari;
- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp32.121.637,49;
  - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp806.730.288,99;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp90.758.331,10;
  - 4) Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp15.699.054,89; dan
  - 5) Sekretariat DPRD senilai Rp9.439.877,92.

### 3. Gedung dan Bangunan (Aset Properti Investasi)

Aset Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Terdapat beberapa Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang masuk dalam kategori Properti Investasi dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 66. Rincian Gedung Bangunan (Aset Properti Investasi) Prov. Sulawesi Barat**

No.	Nama Aset	SKPD	Nilai Perolehan Ribuan (Rp)	Keterangan
1.	Rusunawa	Dinas Perumahan dan Pemukiman	7.796.579,11	Disewakan
2.	Mess Makassar	Biro Umum dan Perlengkapan	2.359.097,00	Disewakan
3.	Mess Aralle – Mambi	Biro Umum dan Perlengkapan	1.604.965,32	Disewakan
4.	Wisma Rawasari Barat	Badan Penghubung	3.749.107,80	Disewakan
<b>Jumlah</b>			<b>15.509.749,23</b>	

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>1.834.548.109.237,02</b>	<b>1.664.843.304.609,65</b>

Jalan, irigasi, dan jaringan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.834.548.109.237,02. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp169.704.804.627,37 atau 10,19% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp1.664.843.304.609,65. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut :

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>1.664.843.304.609,65</b>
<b>PENAMBAHAN</b>		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	106.195.431.644,00
2. Mutasi SKPD	Rp	200.945.300,00
3. Utang	Rp	1.105.160,00
4. Hibah	Rp	63.441.112.227,92
5. Reklasifikasi KIB	Rp	7.530.878.264,00
6. Pembulatan	Rp	0,01
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>177.369.472.595,93</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
1. Mutasi SKPD	Rp	200.945.300,00
2. Pembayaran Utang	Rp	924.827.190,00
3. Reklasifikasi KIB	Rp	1.660.397.095,00
4. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	1.947.512.103,59
5. Koreksi Saldo	Rp	2.930.986.279,97
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>7.664.667.968,56</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>1.834.548.109.237,02</b>

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.834.548.109.237,02 bersumber dari penambahan saldo awal 2023 senilai Rp1.664.843.304.609,65 ditambah penambahan realisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 senilai Rp177.369.472.595,93 dikurangi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp7.664.667.968,56. Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp177.369.472.595,93 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari realisasi Belanja Modal di Tahun 2023 senilai Rp106.195.431.644,00 terdiri dari:
    - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp63.322.047.968,00;
    - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman senilai Rp31.104.953.843,00;
    - 3) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp48.046.350,00;
    - 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.888.087.266,00;
    - 5) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan senilai Rp78.745.527,00;
    - 6) Dinas Perkebunan Daerah senilai Rp296.254.566,00; dan
    - 7) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp8.457.296.124,00.

- b. Penambahan Mutasi SKPD senilai Rp200.945.300,00 terdapat pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Peternakan;
- c. Penambahan Utang senilai Rp1.105.160,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- d. Penambahan Hibah senilai Rp63.441.112.227,92 terdiri dari;
  - 1) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp3.217.488.000,00 berupa Dermaga senilai Rp3.145.662.000,00 ditambah Bak penumpang senilai Rp71.826.000,00;
  - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp60.223.624.227,92 berupa hibah dari Kabupaten Polewali Mandar senilai Rp49.461.491.300,92 berupa 2 (dua) Ruas Jalan, yakni Ruas Jalan Tinambung0Alu dan Ruas Jaalan Mapilli-Piriang; Hibah dari Kabupaten Majene senilai Rp11.302.132.927,00 berupa Jalan senilai Rp7.340.432.927,00 dan Jembatan senilai Rp3.421.700.000,00;
- e. Penambahan reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp7.530.878.264,00 terdiri dari;
  - 1) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp4.147.905.702,00 dengan rincian reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp3.724.158.901,00 ditambah reklas dari Gedung dan Bangunan senilai Rp423.746.801,00;
  - 2) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp87.163.541,00 dengan rincian reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp79.160.408,00 ditambah reklas dari Gedung dan Bangunan berupa beban dibayar dimuka senilai Rp2.011.020,00 ditambah reklas dari Gedung dan Bangunan berupa Pengawasan MCK SMAN 2 Majene senilai Rp3.990.330,00 ditambah Pengawasan MCK SMAN 3 Majene senilai Rp2.001.783,00;
  - 3) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan senilai Rp1.073.380.624,00;
  - 4) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perkebunan Daerah senilai Rp109.963.624,00 terdiri dari reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp59.963.624,00 dan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin senilai Rp50.000.000,00; dan
  - 5) Reklasifikasi ke Jalan,Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp2.112.464.773,00 berupa reklas dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp37.003.485,00, ditambah reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp61.225.000,00 berupa dermaga dan *breakwater*, reklas dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Dermaga senilai Rp1.864.237.288,00 ditambah reklas dari Aset Tak Berwujud ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp149.999.000,00;
- f. Penambahan pembulatan senilai Rp0,01 hal ini disebabkan karena di Aplikasi SIPD hanya membaca dua angka di belakang koma sedangkan di Aplikasi Simda BMD membaca lebih dari dua angka di belakang koma.
- 2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp7.664.667.968,56 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pengurangan dari mutasi SKPD pada Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp200.945.300,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;

- b. Pengurangan dari pembayaran utang pada Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp924.827.190,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pengurangan dari reklasifikasi KIB SKPD senilai Rp1.660.397.095,00 terdiri dari:
  - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.268.097.500,00 yang direklasifikasi ke Aset Tak Berwujud senilai Rp249.950.000,00 dan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp1.018.147.500,00;
  - 2) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp43.672.350,00 yang direklasifikasikan ke Peralatan dan Mesin;
  - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp348.627.245,00;
- d. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp1.947.512.103,59 terdiri dari:
  - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.700.912.995,59;
  - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp226.804.641,00;
  - 3) Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) senilai Rp4.374.000,00; dan
  - 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp15.420.467,00;
- e. Pengurangan karena adanya koreksi saldo kekurangan volume senilai Rp2.930.986.279,97 terdiri dari:
  - 1) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp71.714.112,34;
  - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp48.348.471,41;
  - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp456.894.379,32; dan
  - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.354.029.316,90 terdiri dari koreksi kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.538.830.941,90 dan koreksi putus kontrak senilai Rp815.198.375,00.

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>7.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>31.190.162.064,10</b>	<b>27.799.312.540,10</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp31.190.162.064,10 Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp3.390.849.524,00 atau 12,20% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp27.799.312.540,10. Rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>27.799.312.540,10</b>
<b>Penambahan</b>		
1. Realisasi Belanja Modal	Rp	2.221.525.096,00
2. BOS Afiriasi /Kinerja 2023	Rp	365.174.476,00
3. BOS Reguler 2023	Rp	4.249.792.319,00
4. Banpem 2022	Rp	563.623.300,00
5. Reklasifikasi kib	Rp	26.250.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>7.426.365.191,00</b>
<b>Pengurangan</b>		
1. Reklasifikasi kib	Rp	1.179.479.296,00
2. Ekstra	Rp	2.856.036.371,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>4.035.515.667,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>31.190.162.064,10</b>

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp31.190.162.064,10 bersumber dari penambahan Saldo Awal 2022 senilai Rp27.799.312.540,10 ditambah penambahan realisasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 senilai Rp7.426.365.191,00 dikurangi pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp4.035.515.667,00. Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap Lainnya senilai Rp7.426.365.191,00 di Tahun 2023 terdiri dari:
  - a. Penambahan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.221.525.096,00 terdiri dari:

No	SKPD	Nilai
1.	Sekretariat DPRD	Rp 48.300.000,00
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 992.144.896,00
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	Rp 876.330.400,00
4.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Rp 304.749.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 2.221.525.096,00</b>

- b. Penambahan Bos Afirmasi / Kinerja 2023 senilai Rp365.174.476,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. Penambahan Bos Reguler Tahun 2023 senilai Rp4.249.792.319,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. Penambahan Bantuan Pemerintah Tahun 2022 senilai Rp563.623.300,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - e. Penambahan reklasifikasi KIB senilai Rp26.250.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pembelian buku.
2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya di Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.035.515.667,00 terdiri dari:
  - a. Pengurangan dari Aset Tetap Lainnya akibat adanya reklasifikasi KIB senilai Rp1.179.479.296,00 terdiri dari:
    - 1) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp992.144.896,00;
    - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp99.944.400,00; dan
    - 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp87.390.000,00.
  - b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya akibat adanya Ekstrakomptabel SKPD senilai Rp2.856.036.371,00 terdiri dari:
    - 1) Sekretariat DPRD senilai Rp723.690,00 berupa buku;
    - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.826.873.201,00; dan
    - 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp28.439.480,00.

	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>7.5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>41.160.498.055,98</b>	<b>59.151.181.184,91</b>

Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 senilai Rp41.160.498.055,98. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp17.990.683.128,93

atau 30,41% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp59.151.181.184,91. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>59.151.181.184,91</b>
<b>Penambahan</b>		
1. Utang	Rp	656.625.960,00
2. Reklasifikasi KIB	Rp	23.364.899.047,00
3. Koreksi saldo	Rp	818.678.375,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>24.840.203.382,00</b>
<b>Pengurangan</b>		
1. Reklasifikasi KIB	Rp	42.830.886.510,93
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>42.830.886.510,93</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>41.160.498.055,98</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan dikelompokkan sebagai Aset Tetap yang mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

1. Penjelasan atas penambahan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp24.840.203.382,00 adalah sebagai berikut :
  - a. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari utang senilai Rp656.625.960,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas pembangunan Mess DPRD Tahun 2022 yang baru diakui di Tahun 2023;
  - b. Penambahan reklasifikasi KIB ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp23.364.899.047,00 terdiri dari :
    - 1) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp19.147.500,00;
    - 2) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.345.272.714,00 bersumber dari Gedung dan Bangunan senilai Rp327.125.214,00 dan dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.018.147.500,00;
    - 3) Reklasifikasi dari Tanah ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp54.774.554,00 berupa Belanja Ganti Rugi bangunan;
    - 4) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp19.028.220.119,00;
    - 5) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.886.355.420,00 bersumber dari Gedung dan Bangunan senilai Rp313.368.826,00 dan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp12.903.740,00 dan reklas tambah dari Gedung dan Bangunan karena putus kontrak senilai Rp2.560.082.854,00;
    - 6) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp11.248.740,00; dan
    - 7) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pariwisata senilai Rp19.880.000,00.
  - c. Penambahan disebabkan adanya koreksi saldo senilai Rp818.678.375,00 terdiri dari;

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp3.480.000,00 berupa koreksi ekstrakomptabel Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi intrakomptabel; dan
  - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp815.198.375,00 yang merupakan koreksi saldo putus kontrak pekerjaan Jalan Ruas Pallang yang di reklas dari Jalan, Irigasi dan Jembatan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
2. Penjelasan atas pengurangan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp42.830.886.510,93 terdiri dari :
- a. Pengurangan reklasifikasi KIB dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp42.830.886.510,93 terdiri dari:
    - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp4.574.327.462,00 direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan senilai Rp850.168.561,00 dan direklasifikasikan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp3.724.158.901,00;
    - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp421.862.000,00 direklasifikasikan ke Tanah;
    - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp23.742.046.951,93 direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan senilai Rp23.662.886.543,93 dan direklasifikasikan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp79.160.408,00;
    - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp61.225.000,00 direklasifikasikan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan Dermaga dan *Breakwater*;
    - 5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp14.031.425.097,00 direklasifikasikan ke Gedung dan Bangunan.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>( 2.228.372.475.288,92 )</b>	<b>(1.863.850.565.983,23)</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 senilai (Rp2.228.372.475.288,92). Nilai tersebut bertambah senilai Rp364.521.909.305,69 atau 19,56% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai (Rp1.863.850.565.983,23).

**Tabel 67. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

*(dalam rupiah)*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	520.792.057.651,03	0,00	520.792.057.651,03
2.	Peralatan dan Mesin	1.155.718.960.875,14	768.203.241.448,68	387.515.719.426,46
3.	Gedung dan Bangunan	1.748.556.044.690,84	611.892.301.728,24	1.136.663.742.962,60
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.834.548.109.237,02	848.276.932.112,00	986.271.177.125,02
5.	Aset Tetap Lainnya	31.190.162.064,10	0,00	31.190.162.064,10
6.	KDP	41.160.498.055,98	0,00	41.160.498.055,98
<b>Jumlah</b>		<b>5.331.965.832.574,11</b>	<b>2.228.372.475.288,92</b>	<b>3.103.593.357.285,19</b>



#### 7.5.3.1.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp108.105.527.699,00. Nilai

**31 Desember 2023  
(Rp)**

**108.105.527.699,00**

**31 Desember 2022  
(Rp)**

Error! Reference source not found.

Aset Lainnya mengalami kenaikan senilai Rp4.796.851.260,86 atau 4,64% di bandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp103.308.676.438,14. Adapun rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada Tabel 68.

**Tabel 68. Rincian Aset Lainnya**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Tuntutan Perbendaharaan	Error! Reference source not found.	Error! Reference source not found.
2.	Tuntutan Ganti Rugi	Error! Reference source not found.	Error! Reference source not found.
3.	Aset Tidak Berwujud	67.276.884.257,00	Error! Reference source not found.
4.	Aset Lain-lain	181.100.901.484,65	84.818.025.374,77
5.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	2.452.595.724,20	0,00
6.	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	2.891.771.000,00	1.951.961.206,00
7.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(50.463.091.735,74)	Error! Reference source not found.
8.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(96.000.672.186,11)	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>108.105.527.699,00</b>	Error! Reference source not found.

#### 7.5.3.1.4.1 Tuntutan

##### Perbendaharaan

Saldo Tuntutan

**31 Desember 2023  
(Rp)**

Error! Reference source not found.

**31 Desember 2022  
(Rp)**

**174.000.000,00**

Perbendaharaan per 31 Desember 2023 senilai RpError! Reference source not found. yang merupakan saldo Tuntutan Perbendaharaan Tahun 2006 yang masih tertunggak dan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2023 terdapat penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp0,00, dengan rincian penyetoran s.d Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan penyetoran Tahun 2023 senilai Rp0,00. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 69.

**Tabel 69. Tuntutan Perbendaharaan**

No.	Nama	Tahun	Jabatan Terakhir	Sisa Pinjaman (Rp)	Setor Tahun 2023 (Rp)	Sisa s/d Tahun 2023 (Rp)	Ket
1.	MTR	2006	Bendahara	124.000.000,00	0,00	124.000.000,00	Barang Jaminan dalam proses
2.	ADF	2006	Bendahara	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Barang Jaminan dalam proses
	<b>JUMLAH</b>			<b>174.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000.000,00</b>	

Dari Tabel 69 di atas dapat dijelaskan bahwa saldo piutang telah dilengkapi dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), namun dalam SKTJM tersebut tidak dijelaskan batas akhir penyetoran dan pelunasan piutang dimaksud sehingga sampai sekarang belum diketahui kapan dapat terselesaikan.

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

	(Rp)	(Rp)
<b>7.5.3.1.4.2. Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>673.139.155,00</b>	<b>673.139.155,00</b>

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 senilai Rp**Error! Reference source not found.** yang merupakan saldo Tuntutan Ganti Rugi yang masih tertunggak dan terdapat penyetoran di tahun sebelumnya ke Kas Umum Daerah.

**Tabel 70. Tuntutan Ganti Rugi**

No.	Nama	Tahun	Jabatan Terakhir	Sisa TGR 2022 (Rp)	Penyetoran Tahun 2023 (Rp)	Sisa TGR 2023 (Rp)	Keterangan
1.	SM	2006	Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	Tidak ada Jaminan
2.	DJB	2006	Sekretaris Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat	106.109.143,00	0,00	106.109.143,00	Ada Jaminan
3.	YR	2006	Staf Ahli Bidang Hukum Provinsi Sulawesi Barat	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	Ada Jaminan
4.	IM	2006	Staf Ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	395.716.625,00	0,00	395.716.625,00	Ada Jaminan
5.	DD	2006	Pihak ke III	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	Tidak ada Jaminan
6.	FG	2008	Pihak ke III	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	Tidak ada Jaminan
7.	FH	2009	Pihak ke III	9.313.387,00	0,00	9.313.387,00	Tidak ada Jaminan
<b>Jumlah</b>				<b>673.139.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.139.155,00</b>	

Tabel 70 di atas dapat dijelaskan bahwa saldo piutang telah dilengkapi dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani pada Tahun 2011 akan tetapi dalam SKTJM tersebut tidak dijelaskan batas akhir penyetoran dan pelunasan piutang dimaksud sehingga sampai sekarang belum diketahui kapan dapat terselesaikan. Tim Tindak Lanjut Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan upaya-upaya penagihan dan telah dilakukan sidang TP-TGR dari hasil tersebut mendapatkan pengembalian Rp0,00, namun belum optimal sehingga sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2022 belum dapat terselesaikan 100%.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud</b>	<b>67.276.884.257,00</b>	<b>62.053.526.412,00</b>

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 senilai Rp67.276.884.257,00 mengalami kenaikan senilai Rp5.223.357.845,00 atau 8,42% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp62.053.526.412,00, dengan rincian pada Tabel 71.

Tabel 71. Daftar Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Aset Tak Berwujud	67.276.884.257,00	62.053.526.412,00
<b>Jumlah</b>		67.276.884.257,00	Error! Reference source not found.
Amortisasi		(50.463.091.735,74)	Error! Reference source not found.
<b>Nilai Buku</b>		<b>16.813.792.521,26</b>	<b>15.691.550.702,37</b>

**Saldo Awal per : 1 Januari 2023** Rp **62.053.526.412,00**

**Penambahan**

- |    |                         |    |                  |
|----|-------------------------|----|------------------|
| 1. | Realisasi Belanja Modal | Rp | 7.744.995.004,00 |
| 2. | Reklasifikasi masuk KIB | Rp | 586.313.000,00   |

**J u m l a h** **Rp 8.331.308.004,00**

**Pengurangan**

- |    |                                  |    |                  |
|----|----------------------------------|----|------------------|
| 1. | Penghapusan rusak berat          | Rp | 249.564.000,00   |
| 2. | Penghapusan                      | Rp | 2.265.694.059,00 |
| 3. | Reklasifikasi KIB                | Rp | 149.999.000,00   |
| 4. | Reklasifikasi ke Barang dan Jasa | Rp | 442.693.100,00   |

**J u m l a h** **Rp 3.107.950.159,00**

**Saldo per 31 Desember 2023** **Rp 67.276.884.257,00**

Penjelasan Penambahan Aset Tak Berwujud di Tahun 2023 senilai Rp67.276.884.257,00 berasal dari Saldo Awal Aset Tak Berwujud senilai Rp62.053.526.412,00 ditambahkan penambahan Aset Tak Berwujud senilai Rp8.331.308.004,00 dikurangi pengurangan senilai Rp3.107.950.159,00. Rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal Aset Tak Berwujud Tahun 2023 senilai Rp62.053.526.412,00
2. Penambahan Aset Tak Berwujud senilai Rp8.331.308.004,00 terdiri dari:
  - a. Penambahan realisasi Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2023 senilai Rp7.744.995.004,00 terdiri dari:

**Tabel 72. Rincian Penambahan Aset Tak Berwujud dari Realisasi  
Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023**

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	595.600.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	703.915.000,00
3.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	399.934.950,00
4.	Dinas Perhubungan	847.024.000,00
5.	Dinas Kesehatan	600.000.000,00
6.	Rumah Sakit Umum Daerah	400.000.000,00
7.	Dinas Transmigrasi	1.215.446.470,00
8.	Dinas Perkebunan Daerah	99.567.000,00

No.	SKPD	Nilai (Rp)
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	519.821.000,00
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	700.000.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	370.298.100,00
12.	Dinas Pariwisata	15.000.000,00
13.	Badan Penelitian dan Pengembangan daerah	599.771.984,00
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.000.000,00
15.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	378.616.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.744.995.004,00</b>

- b. Penambahan dari reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud senilai Rp586.313.000,00 bersumber dari beberapa SKPD berikut:
- 1) Adanya reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp249.950.000,00;
  - 2) Adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud pada Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) senilai Rp248.973.000,00; dan
  - 3) Adanya reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp87.390.000,00.
3. Pengurangan dari Aset Tak Berwujud senilai Rp3.107.950.159,00 terdiri dari:
- 1) Adanya penghapusan rusak berat pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp249.564.000,00 terdiri dari Biro Perekonomian dan Pembangunan senilai Rp239.564.000,00 dan Dinas Perpustakaan senilai Rp10.000.000,00;
  - 2) Adanya penghapusan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.265.694.059,00 terdiri dari Biro Hukum senilai Rp230.357.600,00, Dinas Kesehatan senilai Rp63.679.975,00 berupa penghapusan Aset Tak Berwujud, Dinas Transmigrasi senilai Rp589.215.000,00, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp51.823.484,00, Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp1.132.328.000,00 dan Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp198.290.000,00;
  - 3) Adanya reklasifikasi KIB dari Aset Tak Berwujud ke Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp149.999.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - 4) Adanya reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Barang dan Jasa senilai Rp442.693.100,00 terdiri dari:
    - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp320.020.000,00 berupa perjalanan dinas;
    - b) Dinas Perhubungan senilai Rp52.375.000,00 berupa perjalanan dinas; dan
    - c) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp70.298.100,00 berupa perjalanan dinas.

Penjelasan penambahan Amortisasi di Tahun Anggaran 2023 senilai Rp50.463.091.735,75 berasal dari saldo awal Amortisasi senilai Rp46.361.975.709,63 ditambah penambahan Amortisasi di Tahun Anggaran 2023 senilai Rp6.616.374.085,11 dikurangi penghapusan Aset Tak Berwujud senilai Rp2.515.258.059,00.

***Rincian Amortisasi:***

<b>Saldo Awal per 1 Januari 2023</b>	Rp	<b>46.361.975.709,63</b>
<b>Penambahan</b>		
1. Koreksi saldo	Rp	731.634.843,28
2. Beban Amortisasi	Rp	<u>5.884.739.241,83</u>

	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>6.616.374.085,11</b>
<b>Pengurangan</b>			
1. Penghapusan rusak berat		Rp	249.564.000,00
2. Penghapusan		Rp	2.265.694.059,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>2.515.258.059,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>		<b>Rp</b>	<b>50.463.091.735,74</b>

Rincian Amortisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp50.463.091.735,74 sebagai berikut:

1. Saldo Awal Amortisasi TA 2023 senilai Rp46.361.975.709,63.
2. Penambahan Amortisasi senilai Rp6.616.374.085,11 terdiri dari:
  - a. Koreksi Saldo senilai Rp731.634.843,28 terdiri dari:
    - 1) Biro Pemerintahan dan Kesra senilai Rp9.997.500,0000;
    - 2) Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp3.390.333,33;
    - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp415.581.297,15;
    - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp37.208.333,33;
    - 5) Dinas Perhubungan senilai Rp9.887.640,00;
    - 6) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp15.223.500,00;
    - 7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp7.890.666,67;
    - 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp5.329.500,00;
    - 9) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura senilai Rp7.328.500,00;
    - 10) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi senilai Rp4.497.666,67;
    - 11) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp8.333.328,00;
    - 12) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp24.522.993,13;
    - 13) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp32.167.166,67;
    - 14) Dinas Pariwisata senilai Rp2.850.000,00;
    - 15) Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp21.423.583,33;
    - 16) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp59.623.666,67;
    - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp33.477.393,33;
    - 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp26.132.000,00; dan
    - 19) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik senilai Rp6.769.775,00.
  - b. Beban Amortisasi senilai Rp5.884.739.241,83.
3. Pengurangan dari Penghapusan senilai Rp2.515.258.059,00 terdiri dari:
  - a. Penghapusan barang rusak berat senilai Rp249.564.000,00 terdiri dari Biro Perekonomian dan Pembangunan senilai Rp239.564.000,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp10.000.000,00;
  - b. Penghapusan di Tahun 2023 senilai Rp2.265.694.059,00 terdiri dari:
    - 1) Biro Hukum senilai Rp230.357.600,00;
    - 2) Dinas Kesehatan senilai Rp63.679.975,00;
    - 3) Dinas Transmigrasi senilai Rp589.215.000,00;
    - 4) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp51.823.484,00;
    - 5) Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp1.132.328.000,00; dan
    - 6) Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp198.290.000,00.

	<u>31 Desember 2023</u> (Rp)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)
<b>7.5.3.1.4.4. Aset Lain-Lain</b>	<b>181.100.901.484,65</b>	<b>84.818.025.374,77</b>

Pada Tahun 2023 terdapat perubahan penyajian akun Aset Lain-Lain yang semula disajikan secara netto menggunakan nilai buku yang kemudian berubah menjadi bruto menggunakan nilai perolehan. Sehingga Saldo Aset Lain-Lain Tahun 2023 disajikan senilai Rp181.100.901.484,65 yang terdiri dari:

***Rincian Aset Lain-Lain:***

Saldo Akhir Tahun 2022	Rp	84.818.025.374,77
<i>Penyesuaian Saldo Awal 1 Januari 2023</i>	Rp	137.648.756.095,70
<b>Saldo Awal per 1 Januari 2023</b>	Rp	<b>175.301.344.155,53</b>
<b>Penambahan</b>		
1. Reklasifikasi KIB ke RB	Rp	80.868.901,00
2. Aset Lainnya	Rp	9.024.390.370,60
3. Ubah kondisi	Rp	8.371.631.452,80
4. Koreksi saldo	Rp	39.820.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>17.516.710.724,40</b>
<b>Pengurangan</b>		
1. Penghapusan Rusak Berat	Rp	11.700.837.795,28
2. Koreksi saldo	Rp	16.315.600,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>11.717.153.395,28</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>181.100.901.484,65</b>

Penjelasan atas Penambahan dan Pengurangan Saldo Aset Lain-Lain Tahun 2023 senilai Rp181.100.901.484,65 bersumber dari penambahan reklasifikasi KIB ke Rusak Berat senilai Rp80.868.901,00, reklasifikasi KIB ke Aset Lainnya yang akan diserahkan ke Pihak Lain senilai Rp9.024.390.370,60, reklas Ubah Kondisi senilai Rp8.371.631.452,80, koreksi saldo awal senilai Rp39.820.000,00, dikurangi Penghapusan Aset Rusak Berat senilai Rp11.700.837.795,28 dan koreksi kurang saldo awal senilai Rp16.315.600,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain Tahun 2023 adalah sebagai berikut;

- 1) Adanya penambahan Reklasifikasi KIB SKPD pada aset kondisi rusak berat senilai Rp80.868.901,00 dari Biro Organisasi dan Tata Laksana;
- 2) Penambahan Aset Lainnya yang rencana akan diserahkan ke pihak lainnya senilai Rp9.024.390.370,60 dikarenakan aset yang akan dihapus dan dihibahkan masih menunggu SK Penghapusan, dengan rincian sebagai berikut;
  - a) Reklasifikasi Tanah pada Biro Tata Pemerintahan senilai Rp424.223.324,00;
  - b) Reklasifikasi Tanah pada Dinas Perumahan dan Pemukiman senilai Rp760.349.995,00;
  - c) Reklasifikasi Bangunan Sarana Olahraga Kolam Renang pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp4.892.007.051,60;
  - d) Reklasifikasi Kendaraan Roda Empat pada Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp1.737.460.000,00; dan

- e) Reklasifikasi Kendaraan Roda Empat pada Sekretariat Daerah, Gubernur senilai Rp1.210.350.000,00.
- 3) Penambahan Aset ke kondisi rusak berat yang disebabkan adanya ubah kondisi senilai Rp8.371.631.452,80 terdiri dari beberapa SKPD antara lain:
  - a) Sekretariat DPRD senilai Rp3.122.744.760,42;
  - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.680.230.224,00;
  - c) Dinas Energi sumber daya mineral senilai Rp617.296.518,00;
  - d) Badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah senilai Rp908.318.057,15;
  - e) Inspektorat Daerah senilai Rp442.132.095,46;
  - f) Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp158.341.161,77;
  - g) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp65.495.057,00;
  - h) Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp296.354.235,00;
  - i) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp238.781.500,00; dan
  - j) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp841.937.844,00.
- 4) Penambahan koreksi saldo senilai Rp39.820.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
- 5) Pengurangan koreksi saldo senilai Rp16.315.600,00 terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp11.115.600,00 ditambah Dinas Sosial senilai Rp5.200.000,00;
- 6) Pengurangan penghapusan rusak berat pada Aset Lain-Lain senilai Rp11.700.837.795,28 terdiri dari:
  - a) Sekretariat DPRD senilai Rp72.180.000,00;
  - b) Biro Hukum senilai Rp115.502.181,00;
  - c) Biro Ortala senilai Rp 43.730.402,00;
  - d) Biro Umum,Perl Dan Umum senilai Rp4.103.069.125,00;
  - e) Dinas Perhubungan senilai Rp447.503.623,00;
  - f) Dinas Kesehatan senilai Rp1.425.404.464,67;
  - g) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.193.356.244,47;
  - h) Dinas Kehutanan senilai Rp984.897.233,00;
  - i) Dinas Kelautan Dan Perikanan Rp177.615.000,00;
  - j) Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah senilai Rp734.256.950,55;
  - k) Inspektorat Daerah senilai Rp310.579.064,56;
  - l) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp69.881.049,00;
  - m) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga senilai Rp592.295.700,00;
  - n) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik senilai Rp132.708.334,00;
  - o) Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp57.978.000,00;
  - p) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp221.048.434,02; dan
  - q) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan senilai Rp18.831.990,00;

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain:**

Rp **90.483.318.780,77**

**Saldo Awal per 1 Januari 2023**

**Penambahan**

1.	Reklasifikasi KIB RB	Rp	80.868.901,00
2.	Reklasifikasi Aset Lainnya	Rp	3.192.410.353,00
3.	Ubah Kondisi	Rp	7.666.515.041,14
4.	Koreksi saldo	Rp	3.782.217.666,00
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp</b>	<b>14.722.011.961,14</b>

**Pengurangan**

1.	Penghapusan Rusak Berat	Rp	8.873.484.625,80
2.	Koreksi Saldo	Rp	331.173.930,00
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp</b>	<b>9.204.658.555,80</b>

**Saldo per 31 Desember 2023** **Rp 96.000.672.186,11**

- a. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain senilai Rp14.722.011.961,14 terdiri dari;
- 1) Adanya penambahan dari reklasifikasi KIB senilai Rp80.868.901,00 pada Biro Organisasi dan Tatalaksana;
  - 2) Penjelasan atas pengurangan Penyusutan Aset Lainnya senilai Rp3.192.410.353,00 yang bersumber dari reklasifikasi Penyusutan ke Aset Lainnya terdiri dari;
    - a) Reklasifikasi Penyusutan Bangunan Sarana Olahraga Kolam Renang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp244.600.353,00;
    - b) Reklasifikasi Penyusutan Kendaraan Roda Empat pada Biro Umum dan Perlengkapan senilai Rp1.737.460.000,00; dan
    - c) Reklasifikasi Penyusutan Kendaraan Roda Empat pada Sekretariat Daerah, Gubernur senilai Rp1.210.350.000,00.
  - 3) Adanya penambah dari ubah kondisi senilai Rp7.666.515.041,14 terdiri dari beberapa SKPD sebagai berikut:
    - a) Sekretariat DPRD senilai Rp3.116.202.702,53;
    - b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.023.630.975,00;
    - c) Dinas Energi Sumber Daya Mineral senilai Rp616.842.768,00;
    - d) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp895.930.348,15;
    - e) Inspektorat Daerah senilai Rp442.132.095,46;
    - f) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp157.393.688,00;
    - g) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp63.595.979,00;
    - h) Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp295.194.849,00;
    - i) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp213.653.792,00; dan
    - j) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp841.937.844,00.



- 4) Adanya penambahan koreksi saldo ke Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Tahun 2023 senilai Rp3.782.217.666,00 terdiri dari beberapa SKPD sebagai berikut:
  - a) Biro Perekonomian dan Pembangunan senilai Rp20.675.000,0000;
  - b) Biro Organisasi dan Tatalaksana senilai Rp6.750.000,00;
  - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp4.287.500,00;
  - d) Dinas Kesehatan senilai Rp135.348.559,00;
  - e) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp39.820.000,0000;
  - f) Badan Penanggulangan Bencana senilai Rp29.559.236,0000;
  - g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp10.500.000,00;
  - h) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura senilai Rp90.763.369,0000;
  - i) Dinas Kehutanan senilai Rp342.767.445,0000;
  - j) Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp144.545.150,00;
  - k) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi senilai Rp1.095.333.586,00;
  - l) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp13.800.000,00;
  - m) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp2.450.000,00;
  - n) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp51.475.000,00;
  - o) Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp13.350.000,00;
  - p) Dinas Pariwisata senilai Rp14.237.599,00;
  - q) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp16.350.000,00;
  - r) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp467.883.036,00;
  - s) Badan Penghubung Provinsi senilai Rp1.247.850.000,00; dan
  - t) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik senilai Rp34.472.186,00.
- b. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat senilai Rp9.204.658.555,80 yang bersumber dari:
  - 1) Pengurangan Akumulasi Penyusutan dari Penghapusan barang rusak berat senilai Rp8.873.484.625,80 terdiri dari :
    - a) Sekretariat DPRD senilai Rp12.680.126,00;
    - b) Biro Hukum senilai Rp115.502.181,00;
    - c) Biro Organisasi dan tatalaksana senilai Rp43.730.402,00;
    - d) Biro Umum dan perlengkapan senilai Rp2.546.219.200,00;
    - e) Dinas Perhubungan senilai Rp333.973.073,00;
    - f) Dinas Kesehatan senilai Rp1.392.855.418,00;
    - g) Dinas Pendidikan & Kebudayaan senilai Rp1.489.692.915,67;
    - h) Dinas Kehutanan senilai Rp966.715.444,00;
    - i) Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah senilai Rp716.725.473,55;
    - j) Inspektorat Daerah senilai Rp310.579.064,56;
    - k) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp69.881.049,00;
    - l) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga senilai Rp459.270.616,00;
    - m) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik senilai Rp127.643.229,00;
    - n) Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp57.978.000,00;

- o) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp221.048.434,02; dan
- p) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan senilai Rp8.990.000,00;
- 2) Pengurangan Akumulasi Penyusutan dari Koreksi saldo senilai Rp331.173.930,00 terdiri dari;
  - a) Sekretariat DPRD senilai Rp30.685.771,00;
  - b) Biro Umum, dan Perlengkapan senilai Rp626.158,00;
  - c) Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp292.426.798,00;
  - d) Dinas Kesehatan senilai Rp1.428.204,00;
  - e) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp777.542,00;
  - f) Dinas Kehutanan senilai Rp133.333,00;
  - g) Dinas Kelautan Dan Perikanan senilai Rp5.096.124,00;

UUDP tahun sebelumnya senilai Rp316.998.120,00 yang belum di setor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023, namun selama Tahun 2022 tidak terjadi penyetoran dan tindak lanjut sehingga saldo tersebut tidak mengalami perubahan. Rincian UUDP dapat dilihat pada Tabel 733.

**Tabel 73. Rincian UUDP**

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)		Sisa (Rp)	Keterangan
			Bertambah	Berkurang		
1.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	162.513.834,00	-	-	162.513.834,00	Sisa Kas TA 2009. Penanggung jawab adalah Saudara MS, AR, dan FP
2.	Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah	154.484.286,00	-	-	154.484.286,00	Sisa Kas TA 2011 yang sampai saat ini masih dalam proses Tim Tindak Lanjut
<b>JUMLAH</b>		<b>316.998.120,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>316.998.120,00</b>	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2023 masih terdapat sisa UUDP yang belum disetor atau belum selesai ditindaklanjuti senilai Rp316.998.120,00, yaitu pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah senilai Rp154.484.286,00 dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp162.513.834,00.

Saldo Aset Lain-Lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 senilai Rp2.833.864.160,00 terdiri dari:

- 1) Piutang Potongan PPh 21 atas Tunjangan Komunikasi Intensif dan Biaya Operasional Anggota DPRD Tahun Anggaran 2006 yang telah disetor ke Kas Negara dan belum dikembalikan ke Kas Daerah senilai Rp617.490.000,00; dan
- 2) Piutang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Biaya Operasional Anggota DPRD Tahun Anggaran 2008 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah senilai Rp2.216.874.160,00, dilakukan pembayaran senilai Rp500.000,00 sehingga mengalami perubahan menjadi Rp2.216.374.160,00.

Sehingga Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp85.100.229.298,53 mengalami kenaikan senilai Rp282.203.923,76 atau 0,33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp84.818.025.374,77, rincian aset lain-lain tersebut dapat dilihat pada Tabel 73 berikut.

Tabel 74. Rincian Saldo Aset Lain-Lain

No.	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1.	Aset Rusak Lain-lain	81.949.367.018,53	81.667.163.094,77
2.	UU DP	316.998.120,00	316.998.120,00
3.	TKI DPRD	2.833.864.160,00	2.833.864.160,00
	<b>Jumlah</b>	<b>85.100.229.298,53</b>	<b>84.818.025.374,77</b>

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.1.4.5. Kas yang di Batasi Penggunaannya</b>	<b>2.452.595.724,20</b>	<b>0,00</b>

Kas yang di Batasi Penggunaannya merupakan penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Jaminan Kesungguhan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP). Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp2.452.595.724,20 dengan rincian ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 75. Rincian Kas yang di Batasi Penggunaannya  
Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas ESDM	Jaminan Reklamasi dan Pascatambang	649.415.955,00	0,00
2.	Dinas PM dan PTSP	Jaminan Kesungguhan	1.803.179.769,20	0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>2.452.595.724,20</b>	<b>0,00</b>

Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 12.a,12.b.12.c

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.1.4.6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)</b>	<b>2.891.771.000,00</b>	Error! Reference source not found.

*Treasury Deposit Facility (TDF)* merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF-TKD Pemda di Bank Indonesia. Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp2.891.771.000,00. Dana tersebut disimpan dalam rekening di Kantor Pusat Bank Indonesia Nomor 519000685980.

Berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) ke RKUD dalam rangka mendukung kebutuhan Belanja Daerah TA 2024 senilai Rp1.951.961.206,00 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam rangka mendukung kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan Tahun 2024.

- 2) Rincian besaran sisa dana TDF yang disalurkan ke RKUD masing-masing daerah.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.2. Kewajiban</b>	<b>334.524.121.296,20</b>	Error! Reference source not found.

Saldo Kewajiban per 31

Desember 2023 adalah senilai Rp334.524.121.296,20, sedangkan 31 Desember 2022 senilai Rp355.349.599.078,80. Terdapat penurunan senilai Rp20.825.477.782,60 atau 5,86%. Adapun rincian Kewajiban adalah sebagai berikut:

**Tabel 76. Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	149.122.625.808,00	Error! Reference source not found.
2.	Kewajiban Jangka Panjang	185.401.495.488,20	Error! Reference source not found.
	<b>Jumlah</b>	<b>334.524.121.296,20</b>	Error! Reference source not found.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>149.122.625.808,00</b>	<b>91.873.524.599,00</b>

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp149.122.625.808,00 naik senilai Rp57.249.101.209,00 atau 62,31% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp91.873.524.599,00. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

**Tabel 77. Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Utang PFK	3.899.846,00	Error! Reference source not found.
2.	Utang Bunga	0,00	Error! Reference source not found.
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	99.488.141.339,00	Error! Reference source not found.
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	49.630.584.623,00	Error! Reference source not found.
	<b>Jumlah</b>	<b>149.122.625.808,00</b>	Error! Reference source not found.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>	<b>3.899.846,00</b>	<b>924.609.879,00</b>

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) timbul disebabkan atas pajak yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara. Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 senilai Rp3.899.846,00 turun senilai Rp920.710.033,00 atau 99,58% dibandingkan saldo Tahun 2022 senilai Rp924.609.879,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.2.1.2. Utang Bunga</b>	Error! Reference source not found.,00	<b>429.202.556,00</b>

Periode 31 Desember 2023 tidak terdapat lagi utang bunga.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>7.5.3.2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>99.488.141.339,00</b>	<b>62.451.777.632,00</b>

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp99.488.141.339,00 sedangkan per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp62.451.777.632,00. Utang tersebut merupakan sisa utang jangka panjang pinjaman yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu Pusat Investasi Pemerintahan (PIP) yang akan jatuh tempo Tahun 2023. Rincian perhitungan Utang Jangka Panjang dan Bagian lancar Utang Jangka Panjang ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 78. Daftar Rincian Perhitungan Utang Jangka Panjang dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Tahapan Pencairan	Nominal Pencairan	Dana telah ditransfer ke pelaksana kegiatan	Dana yang telah dibayarkan	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Sisa
<b>Pinjaman ke PIP berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 34 Tanggal 28 Januari 2015 untuk Pembanguna RSUD Provinsi Sulawesi Barat</b>					
<b>2016</b>	<b>84.202.633.618,00</b>	<b>84.202.633.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2016	29.362.086.300,00	29.362.086.300,00	0,00	0,00	0,00
2016	15.800.717.374,00	15.800.717.374,00	0,00	0,00	0,00
2016	20.420.352.285,00	20.420.352.285,00	0,00	0,00	0,00
2016	18.619.477.659,00	18.619.477.659,00	0,00	0,00	0,00
<b>2017</b>	<b>98.741.561.162,00</b>	<b>98.741.561.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2017	14.594.914.364,00	14.594.914.364,00	0,00	0,00	0,00
2017	15.706.758.698,00	15.706.758.698,00	0,00	0,00	0,00
2017	20.999.764.122,00	20.999.764.122,00	0,00	0,00	0,00
2017	21.286.574.455,00	21.286.574.455,00	0,00	0,00	0,00

Tahapan Pencairan	Nominal Pencairan	Dana telah ditransfer ke pelaksana kegiatan	Dana yang telah dibayarkan	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Sisa
2017	26.153.549.523,00	26.153.549.523,00	0,00	0,00	0,00
<b>2018</b>	<b>46.202.378.525,00</b>	<b>46.202.378.525,00</b>	21.133.965.964,00	0,00	0,00
2018	8.610.005.220,00	8.610.005.220,00	0,00	0,00	0,00
2018	37.592.373.305,00	37.592.373.305,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	46.225.023.856,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	46.225.023.856,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	46.225.023.856,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	46.225.023.856,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	23.112.511.917,00	0,00	0,00
<b>Jumlah I</b>	<b>229.146.573.305,00</b>	<b>229.146.573.305,00</b>	<b>229.146.573.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pinjaman ke PT SMI berdasarkan Surat Perjanjian Nomor Nomor : PERJ-140/SMI/1020 Tanggal 27 Oktober 2020 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)</b>					
2020	37.059.311.612,00	37.059.311.612,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	7.720.688.690,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	9.264.826.428,00	9.264.828.627,00	0,00
<b>Jumlah II</b>	<b>37.059.311.612,00</b>	<b>37.059.311.612,00</b>	<b>16.985.515.118,00</b>	<b>9.264.828.627,00</b>	<b>10.808.967.867,00</b>
<b>Pinjaman ke PT SMI berdasarkan Surat Perjanjian Nomor Nomor : PERJ-129/SMI/0821 Tanggal 26 Oktober 2021 untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)</b>					
2021	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	7.518.609.994 ,00	67.481.390.006,00	0,00
2022	195.669.938.135,00	195.669.938.135,00	788.083.532,00	22.741.922.706,00	172.139.931.897,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah III</b>	<b>270.669.938.135,00</b>	<b>270.669.938.135,00</b>	<b>8.306.693.526,00</b>	<b>90.223.312.712,00</b>	<b>172.139.931.897,00</b>
<b>Total</b>	<b>536.875.823.052,00</b>	<b>536.875.823.052,00</b>	<b>254.438.781.949,00</b>	<b>99.488.141.339,00</b>	<b>182.948.899.764,00</b>

	<b>31 Desember 2023</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b>
<b>7.5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>49.630.584.623,00</b>	<b>28.067.934.532,00</b>

Utang Jangka Pendek Lainnya berupa utang kepada pihak ketiga. Saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp49.630.584.623,00 sedangkan per 31 Desember 2022 senilai Rp28.067.934.532,00 atau terjadi peningkatan senilai Rp21.562.650.091,00 atau 76,82%. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 79. Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Utang Beban	25.251.346.204,00
2.	Utang Pengadaan Aset	24.345.995.858,00
3.	Utang Pengembalian Jasa Giro	17.999.861,00
4.	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	15.242.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>49.630.584.623,00</b>

1. Utang Beban senilai Rp25.251.346.204,00 terdiri dari Utang Beban Pegawai dan Utang Barang dan Jasa. Utang Beban Pegawai merupakan utang pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Utang Beban Barang dan Jasa merupakan utang pembayaran kepada pihak ketiga terkait pengadaan

barang dan jasa. Saldo Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp7.472.416.229,00 dan Rp17.778.929.975,00 Rincian utang beban per tahun ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 80. Daftar Utang Beban Per Tahun**

No.	Tahun	Utang Beban Pegawai (Rp)	Utang Beban Barang dan Jasa (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	s.d 2022	47.604.353,00	350.797.520,00	398.401.873,00
2	2023	7.424.811.876,00	17.428.132.455,00	24.852.944.331,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.472.416.229,00</b>	<b>17.778.929.975,00</b>	<b>25.251.346.204,00</b>

Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 13.a,13.b.13.c

2. Utang Pengadaan Aset Tetap merupakan utang pembayaran kepada pihak ketiga terkait pengadaan aset tetap. Saldo Utang Pengadaan Aset Tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp24.345.995.858,00. Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap per tahun disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 81. Daftar Utang Pengadaan Aset Tetap Per Tahun**

No.	Tahun	Nilai Utang Pengadaan Aset Tetap (Rp)
1.	2015	233.173.227,00
2.	2016	99.955.100,00
3.	2018	408.580.074,00
4	2021	25.075.657,00
5	2022	547.205.463,00
6	2023	23.032.006.337,00
	<b>Jumlah</b>	<b>24.345.995.858,00</b>

Adapun rincian secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 14.

3. Utang Pengembalian Jasa Giro per 31 Desember 2023 senilai Rp17.999.861,00. Adapun rincian secara lengkap dapat tabel berikut.

**Tabel 82. Pengembalian Jasa Giro**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	822.000,00
2.	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Kas Daerah	6.373.857,00
3.	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	10.804.004,00
	<b>Jumlah</b>	<b>17.999.861,00</b>

4. Setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp15.242.700,00, berupa kelebihan penyetoran pengembalian gaji.

		<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>7.5.3.2.2.</b>	<b>Kewajiban</b>		
	<b>Jangka Panjang</b>	<b>185.401.495.488,20</b>	<b>263.476.074.479,80</b>

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 senilai Rp185.401.495.488,20. Nilai saldo Kewajiban Jangka Panjang tersebut menurun senilai Rp78.074.578.991,60 atau 29,63% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 senilai

Rp263.476.076.479,80. Rincian kewajiban jangka panjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ditunjukkan dalam berikut.

**Tabel 83. Rincian Kewajiban Jangka Panjang**

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	182.948.899.764,00	260.669.295.342,00
2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	2.452.595.724,20	2.806.779.137,80
	<b>Jumlah</b>	<b>185.401.495.488,20</b>	Error! Reference source not found.

<b>7.5.3.2.2.1. Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
	<b>182.948.899.764,00</b>	Error! Reference source not found.

Saldo Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2023 senilai Rp182.948.899.764,00 merupakan pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) / PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang dilakukan pada Tahun 2015, 2020, 2021, dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 84. Rekap Utang Pinjaman Pusat Investasi Pemerintah (PIP)**

No	Tahun Peminjaman	Peruntukan Utang	Nilai Utang (Rp)	Pembayaran	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Utang per 31 Desember 2023	Nomor Perjanjian
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	2015	Pembangunan RSUD	229.146.573.305,00	229.146.573.305,00	0,00	0,00	Nomor : 34 Tanggal 28 Januari 2015
2.	2020	PEN	37.059.311.612,00	16.985.515.118,00	9.264.828.627,00	10.808.967.867,00	Nomor : PERJ- 140/SMI/1020 Tanggal 27 Oktober 2020
3.	2021	PEN	75.000.000.000,00	7.518.609.994,00	67.481.390.006,00	0,00	Nomor : PERJ- 129/SMI/0821 Tanggal 26 Oktober 2021
4	2022	PEN	195.669.938.135,00	788.083.532,00	22.741.922.706,00	172.139.931.897,00	Nomor : PERJ- 129/SMI/0821 Tanggal 26 Oktober 2021
<b>Jumlah</b>			<b>536.875.823.052,00</b>	<b>254.438.781.949,00</b>	<b>99.488.141.339,00</b>	<b>182.948.899.764,00</b>	

- a. Utang kepada PIP pada Tahun 2015 digunakan untuk pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pinjaman Daerah dari Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kelas B. Jumlah pinjaman tersebut senilai Rp229.146.573.305,00.



Jangka waktu pinjaman adalah 7 (tujuh) tahun termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan ketentuan apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud telah berakhir, namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Besaran bunga pinjaman senilai 9,75% pertahun yang dibayarkan setiap tiga bulan yaitu terhitung sejak tanggal dan bulan pencairan tahap I dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 25 bulan jatuh tempo, serta perhitungan bunga berdasarkan hari kalender dengan ketentuan satu tahun dihitung 360 hari sebagai faktor pembagi tetap.

Jumlah pinjaman (Kewajiban Jangka Panjang) yang sudah diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp229.146.573.305,00, yang ditransfer dalam 11 tahap melalui nomor rekening 071.001.000008776.6 an. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

**Tabel 85. Tahapan Transfer Pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah**

No	Tanggal Transfer	Nomor Bukti	Nilai (Rp)
<b>I.</b>	<b>Tahun 2016</b>		
1.	17 Juni 2016	00376/STS/1.20.00.00/2016	29.362.086.300,00
2.	17 Juni 2016	00377/STS/1.20.00.00/2016	15.800.717.374,00
3.	23 November 2016	00377/STS/1.20.00.00/2016	20.420.352.285,00
4.	16 Desember 2016	00890/STS/1.20.00.00/2016	18.619.477.659,00
<b>II.</b>	<b>Tahun 2017</b>		
5.	07 Februari 2017	0034/STS/4.4.0.1/2017	14.594.914.364,00
6.	31 Maret 2017	0039/STS/4.4.0.1/2017	15.706.758.698,00
7.	09 Juni 2017	0035/STS/4.4.0.1/2017	20.999.764.122,00
8.	24 Agustus 2017	0036/STS/4.4.0.1/2017	21.286.574.455,00
9.	14 Desember 2017	0037/STS/4.4.0.1/2017	26.153.549.523,00
<b>III.</b>	<b>Tahun 2018</b>		
10.	4 Juni 2018	380/STS/4.04.00.01/2018	8.610.005.220,00
11.	19 Oktober 2018	00671/STS/4.04.00.01/2018	37.592.373.305,00
	<b>Jumlah</b>		<b>229.146.573.305,00</b>

Pada Tahun 2022, sisa pinjaman ke PIP senilai Rp23.112.511.917,00 dan telah direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, pada Tahun 2023 pinjaman ke PIP senilai Rp23.112.511.917,00 telah dibayarkan sehingga utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke PIP sudah selesai atau lunas.

- b. Tahun 2020 terdapat penambahan utang untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp37.059.311.612,00 berdasarkan Surat Perjanjian Utang Nomor PERJ-140/SMI/1020 tanggal 27 Oktober 2020. Jangka waktu pinjaman selama enam tahun dan *Grace Periode* selama dua tahun. Utang tersebut dipergunakan untuk pembangunan empat ruas jalan Provinsi sebagai berikut.

**Tabel 86. Daftar Proyek PEN yang Dibiayai Utang Tahun 2020**

No	Nama Proyek dan Kegiatan	Nilai Proyek dan Kegiatan (Rp)
<b>1.</b>	<b>Jalan Ruas Jalan Martadinata-Sumare-Batas Tapalang Barat</b>	
a.	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Martadinata-Sumare-Batas Tapalang Barat	11.959.871.695,00

No	Nama Proyek dan Kegiatan	Nilai Proyek dan Kegiatan (Rp)
b.	Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Jalan Martadinata-Sumare-Batas Tapalang Barat	90.129.050,00
<b>2.</b>	<b>Jalan Ruas Salubatu-Bonehau</b>	
a.	Peningkatan Jalan Ruas Salubatu-Bonehau	4.081.423.600,00
b.	Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Salubatu-Bonehau	60.133.150,00
<b>3.</b>	<b>Jalan Ruas Salutambung-Urekang</b>	
a.	Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Urekang	8.898.864.765,00
b.	Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Salutambung-Urekang	72.740.800,00
<b>4.</b>	<b>Jalan Ruas Mapilli-Piriang</b>	
a.	Peningkatan Jalan Ruas Mapilli-Piriang	11.804.258.402,00
b.	Supervisi Peningkatan Jalan Ruas Mapilli-Piriang	91.890.150,00
	<b>Total</b>	<b>37.059.311.612,00</b>

Pada Tahun 2022 telah dilakukan pembayaran pokok utang senilai Rp7.720.688.690,00 sehingga sisa utang per 31 Desember 2022 senilai Rp29.338.622.922,00. Senilai Rp9.264.826.428,00 jatuh tempo pada Tahun 2023 sehingga direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Dengan demikian saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 senilai Rp20.073.795.019,00.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang senilai Rp9.264.827.903,00 sehingga pokok utang per 31 Desember 2023 senilai Rp10.808.968.591,00.

- c. Tahun 2021 terjadi penambahan utang untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp75.000.000,00 berdasarkan Nomor PERJ-129/SMI/0821 tanggal 26 Oktober 2021. Jangka waktu pinjaman lima tahun dengan *Grace Periode* dua tahun. Tahun 2022 terjadi penambahan utang untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp195.669.938.135,00, sehingga total utang senilai Rp270.669.938.135,00, Utang yang akan jatuh tempo pada Tahun 2023 senilai Rp8.306.693.526,00 sehingga direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Dengan demikian saldo utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 senilai Rp262.363.244.609, ditahun 2023 direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang senilai Rp90.223.312.712,00, sehingga pokok utang per 31 Desember 2023 senilai Rp172.139.931.897,00.

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.3.2.2. Utang Jangka Panjang Lainnya</b>	<b>2.452.595.724,20</b>	<b>2.806.779.137,80</b>

Utang jangka panjang lainnya merupakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dari 25 Pemegang IUP senilai Rp2.452.595.724,20. Rincian pada Lampiran 12.a, 12.b, dan 12.c.

	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.3.3. Ekuitas</b>	<b>3.111.404.572.664,06</b>	Error! Reference source not found.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 senilai Rp3.111.404.572.664,06 sedangkan tahun 2022 adalah senilai Rp2.987.803.037.208,91 terjadi peningkatan senilai Rp123.601.535.455,15 atau 4,14%. Adapun rincian ekuitas sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp	2.987.803.037.208,91
Surplus Defisit-LO	Rp	130.700.575.625,91
Koreksi Nilai Persediaan	Rp	88.016.000,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(7.187.056.170,76)
	<b>Rp</b>	<b>3.111.404.572.664,06</b>

#### 7.5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan yang mencakup Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional, yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2023. Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2022. Adapun kegiatan operasional pendapatan dan belanja sebagai berikut.

	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.4.1. Pendapatan – LO</b>	<b>2.126.040.123.202,34</b>	<b>1.953.809.056.978,35</b>

Pendapatan - LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah Pendapatan - LO untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.126.040.123.202,34, sedangkan Tahun 2022 senilai Rp1.953.809.056.978,35. Terjadi kenaikan senilai Rp172.231.066.223,99 atau 8,82%. Pendapatan – LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat Tabel 87.

**Tabel 87. Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah – LO	469.492.200.023,42	Error! Reference source not found.
2.	Pendapatan Transfer – LO	1.553.869.881.732,00	Error! Reference source not found.
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	102.678.041.446,92	Error! Reference source not found.
	<b>Jumlah</b>	<b>2.126.040.123.202,34</b>	Error! Reference source not found.

Adapun rincian dari masing-masing jenis Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO</b>	<b>469.492.200.023,42</b>	<b>457.704.495.917,35</b>

Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah pendapatan untuk periode 1 Januari s.d. tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp469.492.200.023,42, sedangkan Tahun 2022 senilai Rp457.704.495.917,35. Terjadi peningkatan senilai Rp11.787.704.106,07 atau 2,58%. Secara rinci Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2023 dan TA 2022 dapat dilihat pada Tabel 87.

**Tabel 88. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Pajak Daerah – LO	383.078.313.260,00	Error! Reference source not found.
2.	Retribusi Daerah – LO	2.523.518.343,00	Error! Reference source not found.
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	8.097.676.056,00	Error! Reference source not found.
4.	Lain Lain PAD yang Sah – LO	75.792.692.364,42	Error! Reference source not found.
	<b>Jumlah PAD – LO</b>	<b>469.492.200.023,42</b>	<b>457.704.495.917,35</b>

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah LO dapat diuraikan sebagai berikut:

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.4.1.1.1. Pajak Daerah LO</b>	<b>383.078.313.260,00</b>	Error! Reference source not found.

Pendapatan dari Pajak Daerah – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp383.078.313.260,00, sedangkan Tahun 2022 senilai Rp376.418.749.983,00. Terjadi peningkatan senilai Rp6.659.563.277,00 atau 1,77%. Secara rinci realisasi Pajak Daerah – LO TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 89.

**Tabel 89. Daftar Rincian Realisasi Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	95.189.283.335,00	89.715.129.926,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	89.006.716.233,00	92.158.454.750,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	88.532.410.557,00	79.361.420.457,00
4.	Pajak Air Permukaan	379.668.000,00	350.306.208,00
5.	Pajak Rokok	109.970.235.135,00	114.833.438.642,00
	<b>Jumlah</b>	<b>383.078.313.260,00</b>	Error! Reference source not found.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.4.1.1.2. Retribusi Daerah – LO</b>	<b>2.523.518.343,00</b>	<b>3.436.491.600,00</b>

Pendapatan dari Retribusi Daerah – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.523.518.343,00, sedangkan Tahun 2022 senilai Rp3.436.491.600,00, terjadi penurunan senilai Rp912.973.257,00 atau 26,57%. Secara rinci realisasi Retribusi Daerah – LO TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 90.

**Tabel 90. Daftar Rincian Realisasi Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	520.498.940,00	633.802.000,00
2.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	17.460.000,00	15.780.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	0,00	1.099.340.000,00
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	887.401.303,00	727.663.000,00
5.	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	215.540.000,00	0,00
6.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	101.030.000,00	177.315.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	781.588.100,00	63.365.000,00
8.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	0,00	719.226.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.523.518.343,00</b>	Error! Reference source not found.

<b>7.5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah – LO</b>	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	<b>8.097.676.056,00</b>	Error! Reference source not found.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp8.097.676.056,00, sedangkan Tahun 2022 senilai Rp8.183.285.026,00. Terjadi penurunan senilai Rp85.608.970,00 atau 1,05%. Adapun Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah – LO</b>	<b>75.792.692.364,42</b>	<b>69.665.969.308,35</b>

Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp75.792.692.364,42, sedangkan Tahun 2022 adalah senilai Rp69.665.969.308,35. Terjadi peningkatan senilai

Rp6.126.723.056,07 atau 8,79%. Secara rinci realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 91.

**Tabel 91. Daftar Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	518.873.401,00	2.756.667.142,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	50.000.000,00	73.000.000,00
3.	Jasa Giro-LO	5.831.801.131,00	11.333.594.692,73
4.	Pendapatan Bunga-LO	47.632.673,04	473.409,97
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.320.302.059,00	1.075.378.684,09
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.527.390.987,00	10.194.783.186,89
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	2.014.896.061,00	1.526.572.312,00
8.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00	3.422.230.525,26
9.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.429.244.200,38	277.831.656,41
10.	Pendapatan dari BLUD-LO	62.418.529.402,00	38.453.762.499,00
11.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	634.022.450,00	551.675.200,00
	<b>Jumlah</b>	<b>75.792.692.364,42</b>	<b>69.665.969.308,35</b>

	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO</b>	<b>1.553.869.881.732,00</b>	<b>1.436.545.261.740,00</b>

Pendapatan Transfer dalam bentuk Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya. Selama Tahun 2023 Pendapatan Transfer senilai Rp1.553.869.881.732,00 sedangkan Tahun 2022 adalah senilai Rp1.436.545.261.740,00, terjadi peningkatan senilai Rp117.324.619.992,00 atau 8,17%. Secara rinci realisasi Pendapatan Transfer-LO dapat dilihat pada Tabel 92.

**Tabel 92. Daftar Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	25.235.498.000,00	20.886.554.055,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.013.152.771.627,00	969.853.896.329,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	506.861.104.105,00	402.941.678.356,00
5.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	42.863.133.000,00
6.	Dana Insentif Fiskal	8.620.508.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.553.869.881.732,00</b>	<b>1.436.545.261.740,00</b>

Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Dana Bagi Hasil - LO**

Dana Bagi Hasil – LO yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2023 senilai Rp25.235.498.000,00 sedangkan Tahun 2022 senilai Rp20.886.554.055,00, terjadi kenaikan senilai Rp4.348.943.945,00 atau 20,82%. Rincian Dana Bagi Hasil - LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 93.

**Tabel 93. Daftar Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	DBH PBB-LO	2.883.595.000,00	6.993.911.804,00
2.	DBH PPh Pasal 21-LO	12.718.020.000,00	13.193.252.510,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	310.064.000,00	394.780.827,00
4.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	35.509.600,00	134.485.575,00
5.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	87.628.400,00	104.302.339,00
6.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-L	169.709.000,00	20.589.000,00
7.	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	8.653.679.000,00	0,00
8.	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	377.293.000,00	45.232.000,00
	<b>Jumlah Dana Bagi Hasil - LO</b>	<b>25.235.498.000,00</b>	Error! Reference source not found.

## 2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2023 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.013.152.771.627,00. Pendapatan tersebut mengalami peningkatan senilai Rp43.298.875.298,00 atau 4,46% dibandingkan Tahun 2022 yaitu senilai Rp969.853.896.329,00.

## 3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2023 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp506.861.104.105,00 meningkat senilai Rp103.919.425.749,00 atau 25,79% dibandingkan Tahun 2022 yaitu senilai Rp402.941.678.356,00. Rincian Pendapatan transfer DAK Fisik Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 15.

## 4. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk TA 2023 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0,00 menurun senilai Rp42.863.133.000,00 atau 100% dibandingkan Dana Insentif Daerah Tahun 2022 yaitu senilai Rp42.863.133.000,00.

## 5. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk TA 2023 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp8.620.508.000,00 naik senilai Rp8.620.508.000,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2022 yaitu senilai Rp0,00.

7.5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
	102.678.041.446,92	59.559.299.321,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp102.678.041.446,92 sedangkan Tahun 2022 adalah senilai Rp59.559.299.321,00 menurun senilai Rp43.118.742.125,92 atau 72,40%. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 94. Daftar Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah- LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
	<b>Pendapatan Hibah</b>	102.678.041.446,92	Error! Reference source not found.
a.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	100.022.823.041,92	53.807.325.941,00
b.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	7.814.357,00	0,00
c.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	355.444.200,00	4.036.804.280,00
d.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	2.291.959.848,00	1.715.169.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>102.678.041.446,92</b>	Error! Reference source not found.

#### 7.5.4.2. Beban dan Transfer

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>1.998.010.625.724,97</b>	<b>1.918.483.333.546,20</b>

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selama Tahun 2023, jumlah Beban untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.998.010.625.724,97, sedangkan Tahun 2022 adalah senilai Rp1.918.483.333.546,20, terjadi penurunan senilai Rp79.527.292.178,77 atau 4,15%, dengan rincian pada Tabel 95.

**Tabel 95. Realisasi Beban dan Transfer Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Operasi	1.795.426.314.255,97	Error! Reference source not found.
2.	Beban Transfer	202.242.694.912,00	Error! Reference source not found.
3.	Beban Tidak Terduga	341.616.557,00	Error! Reference source not found.
	<b>Jumlah</b>	<b>1.998.010.625.724,97</b>	<b>1.918.483.333.546,20</b>

TA 2023	TA 2022
---------	---------



(Rp)	(Rp)
<b>1.795.426.314.255,97</b>	<b>1.679.457.574.912,20</b>

#### 7.5.4.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban Operasi antara lain meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Lain-Lain. Selama Tahun 2023 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, Beban Operasi adalah senilai Rp1.795.426.314.255,97 sedangkan Tahun 2022 adalah senilai Rp1.679.457.574.912,20, terjadi penurunan senilai Rp115.968.739.343,77 atau 6,91%. Rincian Beban Operasi dapat digambarkan dalam Tabel 9696.

**Tabel 96. Daftar Realisasi Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Pegawai	640.750.198.635,00	608.886.977.326,29
2.	Beban Barang dan Jasa	683.390.497.829,31	664.565.522.666,50
3.	Beban Bunga	18.003.482.946,00	24.506.284.232,00
4.	Beban Hibah	66.615.570.779,00	56.996.878.535,00
5.	Beban Bantuan Sosial	4.055.000.000,00	1.610.000.000,00
6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	382.258.312.906,66	322.891.912.152,41
7.	Beban Penyisihan Piutang	353.251.160,00	0,00
	<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>1.795.426.314.255,97</b>	<b>1.679.457.574.912,20</b>

Secara rinci uraian Beban Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>640.750.198.635,00</b>	<b>608.886.977.326,29</b>

##### 7.5.4.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan, dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pegawai yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun Anggaran 2023. Beban Pegawai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp640.750.198.635,00 sedangkan Tahun 2022 adalah senilai Rp608.886.977.326,29 terjadi peningkatan senilai Rp31.863.221.308,71 atau 5,23% dengan rincian pada Tabel 977.

**Tabel 97. Daftar Realisasi Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	401.816.124.028,00	388.200.566.109,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	97.192.968.799,00	96.431.259.392,29
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	118.785.632.236,00	101.079.117.326,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	21.683.131.622,00	21.833.032.404,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	70.835.758,00	141.714.045,00

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	1.201.506.192,00	1.201.288.050,00
	<b>Jumlah</b>	<b>640.750.198.635,00</b>	Error! Reference source not found.

	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>683.390.497.829,31</b>	<b>664.565.522.666,50</b>

Beban Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dan Beban Barang dan Jasa BOS serta BLUD. Realisasi Beban Barang dan Jasa dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp683.390.497.829,31 sedangkan Tahun 2022 adalah senilai Rp664.565.522.666,50, terjadi peningkatan senilai Rp18.824.975.162,81 atau 2,83%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 98.

**Tabel 98. Daftar Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Persediaan	210.992.959.975,69	Error! Reference source not found.
2.	Beban Jasa	320.258.287.247,04	Error! Reference source not found.
3.	Beban Pemeliharaan	29.678.134.540,00	Error! Reference source not found.
4.	Beban Perjalanan Dinas	122.461.116.066,58	Error! Reference source not found.
	<b>Jumlah</b>	<b>683.390.497.829,31</b>	Error! Reference source not found.

	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.4.2.1.3. Beban Bunga</b>	<b>18.003.482.946,00</b>	Error! Reference source not found.

Beban Bunga adalah pengeluaran anggaran untuk membayar bunga pinjaman atas utang pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) / PT SMI atas pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat guna mendanai pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Provinsi Sulawesi Barat dan Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi. Beban Bunga Tahun 2023 senilai Rp18.003.482.946,00, sedangkan Tahun 2022 adalah senilai Rp24.506.284.232,00, terdapat penurunan senilai Rp6.502.801.286,00 atau 26,54%.

#### 7.5.4.2.1.4. Beban Hibah

Beban Hibah adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Barat selama Tahun 2023 dari kelompok beban hibah dalam bentuk uang dan barang. Realisasi Beban Hibah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp66.615.570.779,00 sedangkan Tahun 2022 adalah senilai Rp56.996.878.535,00, terdapat kenaikan senilai Rp9.618.692.244,00 atau 16,88%. Secara rinci dapat digambarkan pada tabel 99 sebagai berikut.

**Tabel 99. Daftar Realisasi Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.500.000.000,00	0,00
2.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	25.900.459.779,00	3.234.347.500,00
3.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.233.500.000,00	36.397.136.434,00
4.	Beban Hibah Dana BOS	16.907.361.400,00	16.291.145.001,00
5.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.074.249.600,00	1.074.249.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>66.615.570.779,00</b>	Error! Reference source not found.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.4.2.1.5. Beban Bantuan Sosial</b>	<b>4.055.000.000,00</b>	<b>1.610.000.000,00</b>

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 senilai Rp4.055.000.000,00 sedangkan Tahun 2022 senilai Rp1.610.000.000,00. Nilai Beban Bantuan Sosial mengalami kenaikan Rp2.445.000.000,00 atau 151,86%.

	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>7.5.4.2.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>382.258.312.906,66</b>	<b>Error! Reference source not found.</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) dan diamortisasi selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2023 senilai Rp382.258.312.906,66 sedangkan Tahun 2022 adalah senilai RpError! Reference source not found. terjadi kenaikan senilai Rp59.366.400.754,25 atau 18,39%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 100.

**Tabel 100. Datar Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	110.947.576.928,83	102.694.153.019,98
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	84.704.563.929,00	76.842.954.507,00

3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	180.721.432.807,00	138.635.129.677,00
4.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
5.	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.884.739.241,83	4.719.674.948,43
	<b>Jumlah</b>	<b>382.258.312.906,66</b>	<b>322.891.912.152,41</b>

	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.4.2.1.7. Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>353.251.160,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan tahun berjalan uang muka. Tahun 2023 merupakan tahun kelima belum ditindaklanjuti atas pekerjaan peningkatan jalan ruas Salutambung-Urekang Kabupaten Majene, dengan Nomor Perjanjian 602/821/DPU.PR/BM/IV/2018 tanggal 10 April 2018 atas nama PT SPA, dengan nilai perjanjian senilai Rp8.831.279.000,00. Pada tanggal 5 Juni 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) telah mencairkan uang muka senilai 20%, dengan nilai Rp1.766.255.800,00 dengan SP2D Nomor 01137/SP2D-LS/VI/2018. Namun demikian PT SPA tidak dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud sehingga pada tanggal 3 September 2018 telah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Dinas PUPR sesuai dengan surat Nomor 1800-000.001/1656/IX/2018. Atas kejadian tersebut pihak penyedia diwajibkan untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima ke Kas Daerah karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan sampai selesai. Sampai dengan 31 Desember 2023 PT SPA belum melakukan penyetoran ke Kas Daerah dan masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Mamuju.

	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.4.2.2. Beban Transfer</b>	<b>202.242.694.912,00</b>	<b>237.723.309.630,00</b>

Beban Transfer adalah pengeluaran anggaran berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Beban Bagi Hasil, Beban Bantuan Keuangan, dan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa. Selama Tahun 2023, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi Beban Transfer adalah senilai Rp202.242.694.912,00 sedangkan Tahun 2022 adalah senilai Rp237.723.309.630,00, terdapat penurunan senilai Rp35.480.614.718,00 atau 14,93%. Rincian Beban Transfer dapat ditunjukkan dalam Tabel 101.

**Tabel 101. Daftar Realisasi Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	194.035.194.912,00	203.437.930.795,00
2.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	8.207.500.000,00	20.318.689.935,00

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
3.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	13.966.688.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>202.242.694.912,00</b>	Error! Reference source not found.

#### 1. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten

Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tahun 2023 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp194.035.194.912,00. Realisasi tersebut diperuntukkan untuk enam kabupaten se-Sulawesi Barat Tahun 2023 triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan rincian pada 102.

**Tabel 102. Daftar Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mamuju	46.261.668.410,00	46.451.628.175,00
2.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Majene	23.534.464.922,00	25.524.891.280,00
3.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Polman	48.701.804.663,00	52.027.318.167,00
4.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mamasa	18.365.552.887,00	18.978.097.829,00
5.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pasangkayu	32.263.655.551,00	33.601.496.723,00
6.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mamuju Tengah	24.908.048.479,00	26.854.498.621,00
	<b>Jumlah</b>	<b>194.035.194.912,00</b>	<b>203.437.930.795,00</b>

#### 2. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2023 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp8.207.500.000,00 sedangkan Tahun 2022 adalah senilai Rp20.318.689.935,00 dengan rincian, dengan rincian pada Tabel 103.

**Tabel 103. Daftar Realisasi Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Polman	0,00	327.577.200,00
2.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Majene	0,00	63.550.000,00
3.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamasa	0,00	1.034.251.000,00
4.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Pasangkayu	287.500.000,00	334.756.001,00
5.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamuju Tengah	1.500.000.000,00	55.493.334,00
6.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamuju	6.420.000.000,00	18.503.062.400,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.207.500.000,00</b>	<b>20.318.689.935,00</b>

#### 3. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa Tahun 2023 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai 0,00 sedangkan Tahun 2022 adalah senilai RpError! Reference source not found., dengan rincian pada Tabel 104.

**Tabel 104. Daftar Realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Polman	0,00	494.208.800,00
2.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Majene	0,00	746.193.000,00
3.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamasa	0,00	10.524.209.600,00
4.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Pasangkayu	0,00	593.158.000,00
5.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamuju Tengah	0,00	949.066.500,00
6.	Beban Bantuan Kepada Desa di Kabupaten Mamuju	0,00	659.853.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>13.966.688.900,00</b>

	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
<b>7.5.4.2.3. Beban Tidak Terduga</b>	<b>341.616.557,00</b>	<b>1.302.449.004,00</b>

Beban Tidak Terduga selama Tahun 2023, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp341.616.557,00, sedangkan tahun 2022 adalah senilai Rp1.302.449.004,00. Realisasi Beban Tidak Terduga Tahun 2023 diperuntukan untuk penanganan banjir di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Polewali Mandar, serta Pembayaran Utang atas Kesalahan Transfer Jasa Giro Bos untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Mamasa.

#### **7.5.4.3. Surplus / (Defisit) Non Operasional**

Surplus / (Defisit) dari kegiatan Non Operasional Tahun 2023 senilai Rp2.671.078.148,54 dan Tahun 2022 senilai Rp14.500.431.752,63 terdiri dari:

##### **1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.**

Selama Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terdapat transaksi Surplus dari Kegiatan non Operasional Lainnya senilai Rp5.498.431.318,00, sedangkan pada Tahun 2022 terdapat transaksi senilai Rp23.694.063.338,00 sebagai akibat dari penyertaan modal atas PT Sebuku Energi Malaqbi.

##### **2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.**

Selama Tahun 2023 Defisit non Operasional senilai Rp2.827.353.169,46 sedangkan pada Tahun 2022 terdapat transaksi sebesar Rp9.193.631.585,37.

#### **7.5.4.4. Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Tahun 2023 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

##### **1. Pendapatan Luar Biasa**

Pendapatan	Rp	0,00
Pendapatan	Rp	0,00 +
Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00

##### **2. Beban Luar Biasa**

Beban Bencana Alam	Rp	0,00
Beban Luar Biasa Lainnya	Rp	0,00 +
Beban Luar Biasa	Rp	0,00

Beban Luar Biasa Tahun 2023 senilai Rp0,00, sedangkan Tahun 2022 senilai Rp29.322.500,00. Telah dilakukan pembayaran atas kelebihan pembayaran uang pengembalian kepada (CV. FHAFHA MEDIA SARANA INDONESIA an Hasanuddin), berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 05/Pid. Sus Tpk/2016/PN.Mam tanggal 13 Juni 2016.

#### 7.5.4.5. Surplus / (Defisit) – LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus /(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Adapun Surplus / (Defisit) – LO sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp130.700.575.625,91, sedangkan Tahun 2022 adalah senilai Rp49.796.832.684,78.

#### 7.5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Penyajian Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Kenaikan / penurunan kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 105.

**Tabel 105. Kenaikan/(Penurunan) Kas Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kenaikan/(penurunan) dari Aktivitas Operasi	402.323.216.725,38	Error! Reference source not found.
Kenaikan/(penurunan) dari Aktivitas Investasi	(414.078.470.049,00)	Error! Reference source not found.
Kenaikan/(penurunan) dari Aktivitas Pendanaan	(40.684.031.871,00)	Error! Reference source not found.
Kenaikan/(penurunan) dari Aktivitas Transitoris	(1.051.692.193,00)	Error! Reference source not found.
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	<b>(53.490.977.387,62)</b>	Error! Reference source not found.

Pada Tahun 2023 penurunan kas senilai Rp53.490.977.387,62. Penurunan tersebut diperoleh dari arus kas bersih aktivitas operasi senilai Rp402.323.216.725,38, arus kas bersih aktivitas investasi senilai Rp(414.078.470.049,00), arus kas bersih aktivitas pendanaan senilai Rp(40.684.031.871,00), dan aktivitas transitoris senilai Rp(1.051.692.193,00). Adapun rincian arus kas sebagai berikut.

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
-----------------	-----------------

**7.5.5.1. Arus Kas dari  
Aktivitas Operasi**

**402.323.216.725,38**

Error! Reference source  
not found.

Arus Kas dari Aktivitas

Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2023. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah senilai Rp402.323.216.725,38.

**Tabel 106. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas	2.019.818.734.382,38	1.891.862.128.192,39
Arus Keluar Kas	1.617.495.517.657,00	1.542.171.370.385,29
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>402.323.216.725,38</b>	<b>349.690.757.807,10</b>

Arus Masuk Kas senilai Rp2.019.818.734.382,38 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan Arus Kas Keluar senilai Rp1.617.495.517.657,00 merupakan realisasi belanja selain Belanja Modal.

**7.5.5.2. Arus Kas dari**

**Aktivitas Investasi**

**(414.078.470.049,00)**

**(544.790.179.699,00)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas Investasi pada Tahun 2023 menunjukkan arus kas bersih senilai Rp(414.078.470.049,00) dengan rincian pada Tabel 107.

**Tabel 107. Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas	518.873.401,00	2.756.667.142,00
Arus Keluar Kas	414.597.343.450,00	547.546.846.841,00
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(414.078.470.049,00)</b>	<b>(544.790.179.699,00)</b>

Arus Masuk Kas senilai Rp518.873.401,00 bersumber dari penjualan aset lainnya sedangkan Arus Kas Keluar senilai Rp414.597.343.450,00 bersumber dari Belanja Modal Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya.

**7.5.5.3. Arus Kas dari**

**Aktivitas Pendanaan**

**(40.684.031.871,00)**

**141.724.225.589,00**



Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dalam Tahun 2023 adalah senilai Rp(40.684.031.871,00) dengan rincian pada Tabel 108.

**Tabel 108. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas	0,00	195.669.938.135,00
Arus Keluar Kas	40.684.031.871,00	53.945.712.546,00
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(40.684.031.871,00)</b>	<b>141.724.225.589,00</b>

Arus Kas Masuk senilai Rp0,00, sedangkan Arus Kas Keluar senilai Rp(40.684.031.871,00) merupakan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri - lembaga bukan Bank (PT.SMI).

**7.5.5.4. Arus Kas dari  
Aktivitas  
Transitoris**

TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
<b>(1.051.692.193,00)</b>	<b>786.101.938,00</b>

Arus Kas Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Dalam Tahun 2023, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah senilai Rp(1.051.692.193,00) dengan rincian pada Tabel 109.

**Tabel 109. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Masuk Kas	144.176.373.424,00	129.482.174.278,00
Arus Keluar Kas	145.228.065.617,00	128.696.072.340,00
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(1.051.692.193,00)</b>	<b>786.101.938,00</b>

Dengan demikian pada akhir Tahun Anggaran 2023 terdapat saldo akhir kas di BUD (Kas Daerah), Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas di Bendahara BOS, dan Kas di Bendahara BLUD, yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal Kas	Rp 117.600.756.927,84
Kenaikan/(Penurunan) Kas	Rp (53.490.977.387,62)
Saldo Akhir Kas	Rp 64.109.779.540,22

Rincian saldo akhir Kas di BUD pada Neraca dapat dilihat pada Tabel 110.

**Tabel 110. Rincian Saldo Kas di BUD Pada Neraca per 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	60.747.618.338,33

No.	Uraian	Nilai (Rp)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Error! Reference source not found.
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	42.257.640,89
4	Kas di Bendahara BOS	34.090,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	73.538.118,00
6	Kas di Bendahara BLUD	3.246.331.353,00
	<b>Jumlah</b>	<b>64.109.779.540,22</b>

### 7.5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. LPE ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

LPE merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal

Jumlah ekuitas awal senilai Rp2.987.803.037.208,91 merupakan reklasifikasi dari ekuitas akhir Tahun 2023.

2. Surplus/(Defisit) - LO pada periode bersangkutan

Surplus/(Defisit) - LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Adapun Surplus/(Defisit) - LO sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp130.700.575.625,91

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Pada Tahun 2023 terdapat koreksi ekuitas lainnya senilai Rp(7.099.040.170,76) yang terdiri dari:

a. Koreksi Nilai Persediaan

Sampai dengan 31 Desember 2023 terjadi kesalahan-kesalahan atas transaksi pada periode sebelumnya yang menyebabkan penambahan atas nilai aset tetap tersebut senilai Rp88.016.00,00.

b. Koreksi Nilai Ekuitas Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2023 terjadi kesalahan-kesalahan atas transaksi pada periode sebelumnya yang menyebabkan pengurangan atas nilai ekuitas lainnya tersebut senilai Rp(7.187.056.170,76).

4. Ekuitas akhir

Ekuitas Akhir adalah selisih antara ekuitas awal tambah/kurang surplus / (defisit) tambah/kurang koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyajikan ekuitas akhir TA 2023 senilai Rp3.111.404.572.664,06 dan merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

## **7.6. KEWAJIBAN KONTINJENSI**

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mam tanggal 21 November 2019, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 08/PDT/2020/TP MKS tanggal 26 Februari 2020 terkait Gugatan Wanprestasi Pengadaan Pupuk NPK Tahun Anggaran 2016 antara PT Kusuma Dipa Nugraha melawan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memiliki kewajiban untuk membayar kepada PT Kusuma Dipa Nugraha senilai total Rp21.737.016.000,00 yang terdiri dari:

1. Pembayaran prestasi atas pekerjaan pengadaan Pupuk NPK mendukung budidaya jagung di lahan khusus Tahun 2016 senilai Rp20.701.920.000,00; dan
2. Pembayaran ganti rugi materiil senilai Rp1.035.096.000,00.

Berdasarkan akta pernyataan permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh kuasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 08/pdtG/2019/PN Mam tanggal 14 Maret 2023, sebagai termohon /tergugat sebagai pemohon peninjauan kembali terhadap putusan:

- a. Mahkamah Agung RI tanggal 05 November 2020 Nomor 2799 K /Pdt.2020;
- b. Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Februari 2020 Nomor 08 PDT/2020/PT MKS; dan
- c. Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 November 2019 Nomor 8/pdt G /2019/PN Mam.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Belum menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan selama putusan Peninjauan Kembali belum keluar.

## **7.7. PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulawesi Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

### **7.7.1. Laporan Realisasi Anggaran**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2023 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan**

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat TA 2023 secara kumulatif direncanakan senilai Rp2.048.907.120.318,00 dan terealisasi senilai Rp2.020.337.607.783,38 atau 98,61% yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dianggarkan senilai Rp479.470.440.628,00 dan terealisasi senilai Rp464.752.317.440,38 atau 96,93%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah TA 2023 ini direncanakan senilai Rp393.538.458.610,00 terealisasi senilai Rp383.079.135.260,00 atau 97,34%;
  - 2) Retribusi Daerah TA 2023 ini direncanakan senilai Rp3.896.180.000,00 terealisasi senilai Rp2.523.518.343,00 atau 64,77%;
  - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2023 ini direncanakan senilai Rp8.183.285.026,00 terealisasi senilai Rp8.097.676.056,00 atau 98,95%; dan
  - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 direncanakan senilai Rp73.852.516.992,00 terealisasi senilai Rp71.051.987.781,38 atau 96,21%.
- b. Pendapatan Transfer TA 2023 dianggarkan senilai Rp1.568.344.679.690,00 yang sampai akhir TA 2023 terealisasi senilai Rp1.552.930.071.938,00 atau 99,02% dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2023 dianggarkan senilai Rp13.085.566.000,00 terealisasi senilai Rp15.032.557.628,00 atau 114,88%;
  - 2) Dana Alokasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan senilai Rp604.482.000,00 dan terealisasi senilai Rp9.263.130.578,00 atau 1.532,41%;
  - 3) Dana Alokasi Umum dianggarkan senilai Rp1.006.215.801.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.013.152.771.627,00 atau 100,69%;
  - 4) Dana Alokasi Khusus dianggarkan senilai Rp539.818.322.690,00 dan terealisasi senilai Rp506.861.104.105,00 atau 93,89%; dan
  - 5) Dana Insentif Fiskal dianggarkan senilai Rp8.620.508.000,00 dan terealisasi senilai Rp8.620.508.000,00 atau **Error! Reference source not found.**%;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan senilai Rp1.092.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp2.655.218.405,00 atau 243,15%.

## 2. Belanja dan transfer

Pada Tahun 2023, program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dianggarkan ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Di dalam APBD TA 2023, dialokasikan dana untuk belanja daerah senilai Rp2.103.379.795.985,00 sampai akhir TA 2023 terealisasikan senilai Rp2.032.092.861.107,00 atau 96,61% seperti pada Tabel 111.

**Tabel 111. Daftar Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023**

(dalam rupiah)

No.	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Belanja Daerah</b>			
	a. Belanja Pegawai	644.454.066.816,00	641.336.657.512,00	99,52
	b. Belanja Barang dan Jasa	733.250.373.532,00	707.493.944.795,00	96,49
	c. Belanja Bunga	18.432.685.502,00	18.432.685.502,00	100,00
	d. Belanja Hibah	41.574.100.788,00	40.715.111.000,00	97,93
	e. Belanja Bantuan Sosial	4.065.000.000,00	4.055.000.000,00	99,75
	f. Belanja Modal	445.772.978.540,00	414.597.343.450,00	93,01
	g. Belanja Tak Terduga	5.990.269.459,00	349.322.500,00	5,83
<b>2.</b>	<b>Transfer</b>			
	a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	196.905.296.348,00	196.905.296.348,00	100,00

No.	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
	b. Transfer Bantuan Keuangan	12.935.025.000,00	8.207.500.000,00	63,45

### 3. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Pembiayaan Penerimaan Daerah pada Tahun 2023 dianggarkan setelah perubahan senilai 116.924.453.299,00 dan terealisasi senilai Rp116.545.164.888,84 atau 99,68%; dan
- b. Pembiayaan Pengeluaran Daerah dianggarkan setelah perubahan pada Tahun 2023 senilai Rp62.451.777.632,00 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasi senilai Rp40.684.031.871,00 atau 65,14%.

#### 7.7.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp116.924.453.298,84 yang merupakan SiLPA Tahun 2022, sementara Saldo Anggaran Lebih akhir yang merupakan SiLPA TA 2023 senilai Rp64.105.879.694,22.

#### 7.7.3. Laporan Neraca

##### 1. Aset

Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan pada Tahun 2023 senilai Rp3.445.928.693.960,26 dan mengalami peningkatan 3,07% dibanding tahun 2022 senilai Rp3.343.152.636.287,71. Aset tersebut terdiri atas:

##### a. Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 senilai Rp163.678.255.738,07, sedangkan pada Tahun 2022 Aset Lancar senilai Rp183.457.037.851,26 atau mengalami penurunan 10,78%.

##### b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 senilai Rp75.773.207.446,00, sedangkan pada Tahun 2022 Investasi Jangka Panjang senilai Rp70.274.776.128,00 atau mengalami kenaikan 7,82%.

##### c. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat setelah penyusutan pada Tahun 2023 senilai Rp3.098.371.703.077,19, sedangkan pada Tahun 2022 senilai Rp2.986.112.145.870,31 atau mengalami kenaikan 3,76%.

##### d. Aset Lainnya

Aset Lainnya pada Neraca Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat senilai Rp108.105.527.699,00 sementara pada Tahun 2022 senilai Rp103.308.676.438,14 atau mengalami kenaikan 4,64%.

##### 2. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 senilai Rp334.524.121.296,20, mengalami penurunan 5,86% dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp355.349.599.078,80.

3. Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2023 senilai Rp3.111.404.572.664,06 dan mengalami kenaikan 4,14% jika dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp2.987.803.037.208,91

**7.7.4. Laporan Operasional**

**1. Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp2.126.040.123.202,34 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah senilai Rp469.492.200.023,42;
- b. Pendapatan Transfer/Perimbangan senilai Rp1.553.869.881.732,00; dan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah senilai Rp102.678.041.446,92.

**2. Beban**

Beban per 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp1.998.010.625.724,97 sedangkan per 31 Desember 2022 senilai Rp1.918.483.333.546,20 atau naik sebesar 4,15%.

**7.7.5. Laporan Arus Kas**

Pada Tahun 2023, saldo akhir Kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp64.109.779.540,22 mengalami penurunan kas senilai Rp53.490.977.387,62 atau 45,49% dari Tahun 2022 senilai Rp117.600.756.927,84.

**7.7.6. Laporan Perubahan Ekuitas**

Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah senilai Rp3.111.404.572.664,06 sedangkan per 31 Desember 2022 senilai Rp2.987.803.037.208,91 dan mengalami kenaikan senilai 4,14

